

SKRIPSI

**ORGANISASI LEMBAGA KARYAWAN ISLAM (LEMKARI) JAWA
TIMUR TAHUN 1972-1989**



Oleh:

DEVI ASDAH ARIVANTI

NIM. 121211431081

**PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2016**



SKRIPSI

**ORGANISASI LEMBAGA KARYAWAN ISLAM (LEMKARI) JAWA
TIMUR TAHUN 1972-1989**



Oleh:

DEVI ASDAH ARIVIANI

121211431081

**PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2016**

**ORGANISASI LEMBAGA KARYAWAN ISLAM (LEMKARI) JAWA
TIMUR TAHUN 1972-1989**

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Program Studi Ilmu Sejarah
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga**

Oleh:

**DEVI ASDAH ARIVIANI
121211431081**

**PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2016**

PERSETUJUAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI

SKRIPSI INI TELAH DISETUJU

TANGGAL 6 Juni 2016

Oleh:

Pembimbing Skripsi



Drs. Muryadi, M. IP.

NIP. 196402181994031002

**Mengetahui,
Ketua Departemen Ilmu Sejarah**



Gayung Kasuma, S.S., M. Hum

NIP. 197306112008011015

**PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2016**

PENGESAHAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI

Skripsi ini telah dipertahankan
di hadapan komisi penguji pada 13 Juni 2016

KOMISI PENGUJI SKRIPSI

Ketua



Pradipta Niwandhono, S.S., M.Hum.
NIP.198103062008011006

Anggota



Arya Wanda Wirayuda, S.S., M.A.
NIP. 198409012015041002

Anggota



Drs. Muryadi, M. IP.
NIP. 196402181994031002

HALAMAN MOTO

**BERUSAHA, BERDOA, BERTAWAKAL, BERBAKTI KEPADA
AGAMA, ORANG TUA DAN NEGARA ADALAH KUNCI UNTUK
MERAH KESUKSESAN**

(Devi Asdah Arivianti)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk-Nya sang pencipta alam dan pemberi nafas, orang tua, saudara-saudaraku, keluargaku, Guru-guruku, sahabat, serta teman-teman yang sedang berfastabikul khoirot.

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena rahmat taufik serta hidayah-Nya kami dapat menyusun penulisan skripsi yang berjudul “ORGANISASI LEMBAGA KARYAWAN ISLAM (LEMKARI) JAWA TIMUR TAHUN 1972-1989”.

Penulisan ini dilaksanakan setelah mengamati Organisasi Lembaga Karyawan Islam (LEMKARI) di Jawa Timur. Lembaga ini muncul untuk menampung dan memberikan pembinaan kepada mantan anggota faham-faham keagamaan Islam yang dianggap sesat dan menimbulkan keresahan masyarakat di Jawa Timur. Sehingga peran Lemkari ini menarik untuk ditulis.

Sebagai penulis tidak lupa kami panjatkan syukur kepada Allah SWT, karena-Nya, dari-Nya, dan Oleh-Nya lah sumber kekuatan utama penulis dalam hidup dan menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terimakasih dan rasa sayang yang tak dapat diukur dengan apapun penulis ucapkan dengan tulus kepada Bapak dan Ibu. Kasih sayang dan perjuangan yang tak terhingga mereka adalah sumber kekuatan dan dorongan yang mengantarkan penulis bisa sampai saat ini. Terimakasih kepada senyum bidadari kecil kesayangan Dewi dan Dina, adik kakak yang selalu berdoa dan menjadi sumber motivasi. Ucapan terimakasih kepada Mas Arif (alm) dan Mb. Rom sekeluarga yang telah memberi dukungan kasih dan sayang. Terimakasih kepada Ibu Hasfita Wali Kelas dan Bunda yang selalu menyemangati penulis. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan Bidik Misi PTN angkatan pertama di SMA yaitu Silfi, Adam, Hakim, Ach. Aris, serta Ziqiyah yang telah berjuang bersama dari awal sampai sekarang. Jazakallahukhoiroh kepada Kakak Haris sekeluarga yang selalu memberi motivasi dari penulis kecil sampai sekarang. Jazakumullahukhoiroh kepada seluruh warga LDII yang bersedia membantu proses penyelesaian skripsi ini. Terimakasih kepada teman-teman TK, SD, SMP dan SMA (khususnya Biba) yang selalu ceria dan mendukung penulis. Terimakasih saya ucapkan kepada Seluruh Staf pengajar Departemen Ilmu Sejarah, terutama kepada Bpk. Muryadi yang menjadi dosen wali dan pembimbing skripsi penulis. Terimakasih karena Bapak selalu mendukung dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih kepada dosen penguji skripsi yang telah telaten menguji penulis. Terimakasih kepada Mbak Asti yang selalu menularkan keceriaannya kepada penulis. Terimakasih kepada seluruh staf Rektorat dan FIB UNAIR. Terimakasih kepada kawan-kawan pengurus HMD ILMU SEJARAH 2012-2016, Evi, Yunida, Aim, Arofah, Moli, Mbak Nia, Mas Baihaqi, Mbak Vina, Aris, Abi, Pandu, Ace, Dzani dan semuanya. Kepada teman-teman BLM 2014, 2015 Nj, Ikko, Arum, Cak Ken, Muhriz, Imaf, Oliv, Duta, Lisa, Intan, dan BLM 2016, terimakasih atas dukungan dan senyum kalian. Terimakasih kepada semua teman-teman DLM dan MPM UNAIR. Terimakasih kepada seluruh teman-teman Ormawa FIB UNAIR periode 2015. Terimakasih kepada Tim *King Cobra Of Lawu* Yasmin, Rani, Yasida, Arnold, Oza dan dua temannya, Jalu, Imam, Aril, Dimas, mas Adryan, Kubur, Syahrul, Umam dan Irma yang telah mengenalkan dan menemani penulis main didunia gunung. Terimakasih kepada HMI Komisariat Ilmu Budaya Unair dan Kohati Cabang Surabaya Mb. Dani yang selalu mendukung dan menjadi penasihat, Mb Sofi, Fila, Vixki, Ulfa, Dhanti dan semuanya. Terimakasih kepada Tim PKMP yang solid, Mbak Ayu, Manda, Dina, Mb Lela, dan Alfa (teman Dina) yang unik. Terimakasih kepada teman-teman UINSA Raisa, Badik, Rif'atul, Umi, Queen yang telah membantu dan menghibur penulis. Terimakasih kepada teman-teman KKN-BBM 51 Ketandan Nganjuk, kalian terbaik. Terimakasih kepada Cece yang selalu support. Terimakasih kepada Kos Dharmawangsa Community yang selalu mengajari penulis menjadi centil Fitri, Mb Luxi, Alfa, Tiara, Mb. Ayda, Mb. Devi, Ita, Okta dan semuanya. Terimakasih kepada teman-teman Ilmu Sejarah 2012 Vina, Ni'mah, Mita, Ana, Dila, Sopi, Dian, Tiwi, Syarifah, Reyna, Oliv, Alfa, Fahri, NC, dan semua teman-teman seangkatan, serta senior dan junior yang tidak bisa penulis sebutkan semua. Terimakasih banyak kepada Nusantara dan Rakyat Indonesia yang telah menjadi motivasi dan pendukung penulis dalam menyelesaikan masa studi S1.

Penulis Menyadari bahwa dalam penyusunan penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi hasil yang lebih baik untuk penulisan selanjutnya. Akhir kata,

penulis berharap penulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis, dunia akademis, dan masyarakat pada umumnya.

Surabaya, 6 Juni 2016

Penulis

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ini adalah karya tulis saya asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana, baik di Universitas Airangga, maupun diperguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penelitian, dan tulisan saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing.
3. Karya tulis ini bukan karya jiplakan, dan didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan sebagai acuan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surabaya, 6 Juni 2016

Yang membuat pernyataan,



DEVI ASDAH ARIVIAN TI
NIM. 121211431081

ABSTRAK

Lembaga Karyawan Islam atau Lemkari merupakan organisasi yang mewadahi mantan anggota aliran yang pernah dianggap sesat, yakni Islam Jamaah atau sejenisnya. Organisasi ini berdiri pada 03 Januari 1972. Berdirinya organisasi ini dilatar belakangi oleh aspirasi dari mantan-mantan anggota Islam Jamaah atau sejenisnya yang ingin diberi kesempatan sekali lagi. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari heuristik yang merupakan tahap pengumpulan sumber-sumber sejarah yang relevan terhadap topik pembahasan. Kritik sumber, merupakan tahap pengkajian terhadap otentisitas dan kredibilitas sumber-sumber yang diperoleh. Interpretasi merupakan proses penafsiran untuk mencari keterkaitan dalam menyusun peristiwa-peristiwa sejarah secara periodik. Tahap terakhir adalah historiografi yakni penulisan sejarah secara sintetis dalam bentuk karya ilmiah. Pada awal pembentukan, Lemkari adalah lembaga yang menampung mantan anggota Islam Jamaah di Jawa Timur. Pusat kegiatan organisasi Lemkari Jawa Timur pada tahun 1972-1981 berada di Kediri Jawa Timur. Pada tahun 1975, diadakan reuni Pondok Pesantren Burengan Kediri. Agenda reuni tersebut adalah merumuskan satu nama untuk lembaga yang menampung mantan anggota Islam Jamaah se-Indonesia. Pada hasil Musyawarah Kerja I yang dilakukan di Kediri diputuskan untuk membentuk garis organisasi secara vertikal, yakni dari pusat sampai ke cabang. Hal ini untuk manajemen dan menertibkan organisasi Lemkari di Indonesia. Implementasi dari keputusan tersebut dilaksanakan paska Mubes II Lemkari diselenggarakan. Yakni dengan memindahkan pusat kegiatan organisasi Lemkari di Jakarta dan membentuk Dewan Perwakilan Daerah di 19 Daerah, salah satunya adalah Jawa Timur. Usaha-usaha Lemkari dalam menetralsir organisasinya dari ajaran-ajaran Islam Jamaah tidak serta merta diterima oleh Pemerintah. MUI selaku organisasi yang mengkoordinir lembaga agama Islam turut mencurigai Lemkari. Hal ini terlihat dari laporan-laporan MUI Jawa Timur kepada Pemerintah Daerah Jawa Timur. Sehingga hal ini membuat Pemerintah Daerah Jawa Timur mengeluarkan Surat Keputusan larangan kepada pengurus Lemkari Tingkat I Propinsi Jawa Timur.

Kata kunci: Organisasi, Lemkari, Jawa Timur

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN.....	i
SAMPUL DALAM.....	ii
PRASYARAT GELAR.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....	v
HALAM MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PERNYATAAN.....	xi
ABSTRAK.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiii
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	xv
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xvi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
DAFTAR ISTILAH.....	xix
DAFTAR SINGKATAN.....	xx
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Penelitian.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka.....	9
F. Kerangka Konseptual.....	11
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	19
 BAB II SEJARAH LEMBAGA KARYAWAN ISLAM (LEMKARI)	
A. Latar Belakang Berdirinya Lembaga Karyawan Islam (LEMKARI).....	21
B. Profil Pendiri Lemkari	26
C. Lembaga Karyawan Islam (LEMKARI) Jawa Timur.....	36

BAB III LEMBAGA KARYAWAN ISLAM (LEMKARI) JAWA TIMUR	
A. Peran dan Kegiatan Lembaga Karyawan Islam (LEMKARI) Jawa Timur.....	48
B. Respon Masyarakat Jawa Timur Terhadap Lembaga Karyawan Islam (LEMKARI) Jawa Timur.....	57
C. Respon Pemerintah Jawa Timur Terhadap Lembaga Karyawan Islam (LEMKARI) Jawa Timur.....	73
BAB IV SIMPULAN.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN.....	91

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1:	Paket pelajaran dalam proses pengkaderan anggota Lemkari Jawa Timur.....	50
Tabel 2:	Prediksi Prosentase Jumlah Anggota Lemkari tahun 1986-1989 di Pondok Burengan Kediri.....	53
Tabel 3:	Daftar pejabat yang melakukan kunjungan kerja dan memberikan bantuan kepada Lemkari Jawa Timur tahun 1979-1986.....	55
Tabel 4:	Susunan keanggotaan tim pembinaan dan pengawasan organisasi Lemkari Propinsi Daerah tingkat I Jawa Timur.....	82

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1:	Pendiri Lemkari pertama Nur Hasan Al-ubaidah.....	29
Gambar 2:	Nur Hasjim.....	34
Gambar 3:	Struktur Kepengurusan Lemkari.....	40
Gambar 4:	Ruang Belajar Pondok Burengan Kediri.....	48

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman		
<i>Lampiran 1:</i>	Hikayat Singkat Pondok Lemkari Burengan Banjarn Kediri Jawa Timur tahun 1986.....	92
<i>Lampiran 2:</i>	Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Pembekuan Pengurus Perwakilan Lemkari tingkat I Propinsi Jawa Timur tahun 1988.....	94
<i>Lampiran 3:</i>	Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang pembinaan dan pengawasan organisasi keasyarakatan Lemkari di Jawa Timur tahun 1988.....	99
<i>Lampiran 4:</i>	Penetapan Presiden pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama tahun 1965.....	104
<i>Lampiran 5:</i>	Instruksi Menetri Agama tentang tugas pendataan dan pembinaan aliran-aliran/ faham-faham keagamaan.....	108
<i>Lampiran 6:</i>	Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang pelaksanaan tugas aparatur pemerintah dalam menjamin ketertiba dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadat agama oleh pemeluk pemeluknya.....	111
<i>Lampiran 7:</i>	Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang tata cara pelaksanaan dan penyiaran agama..	114
<i>Lampiran 8:</i>	Kegiatan Darul Hadist meningkat lagi di Jatim.....	117
<i>Lampiran 9:</i>	Ulama Jatim usulkan pembubaran Lemkari.....	121
<i>Lampiran 10:</i>	Said Setujui Usul Pembubabaran Lemkari.....	122

<i>Lampiran 11:</i>	Akhirnya, Lemkari Jatim Dibekukan.....	123
<i>Lampiran 12:</i>	Pembekuan Lemkari baru langkah awal.....	124
<i>Lampiran 13:</i>	Lemkari minta dibina sekali lagi.....	125
<i>Lampiran 14:</i>	Beberapa tokoh Lemkari Jatim mengundurkan diri.....	126
<i>Lampiran 15:</i>	Ketua Lemkari Jatim juga mengundurkan diri.....	127
<i>Lampiran 16:</i>	Bupati Kediri tak akan bekukan organsiasi Lemkari.....	128

DAFTAR ISTILAH

Amir	:	Imam atau pemimpin
Bai'at	:	Mengucapkan janji dihadapan saksi
Jamaah	:	Kelompok dalam Lemkari
Manqul	:	Mengaji dengan mengartikan Al-Quran yang dipimpin oleh seorang guru atau orang yang sudah manqul sebelumnya
Sempalan	:	Menyimpang
Trobos	:	Mengunjungi atau menjemput (ke acara Lemkari seperti pengajian) salah satu anggota Lemkari

DAFTAR SINGKATAN

AD/ART	:Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga
DEPAG	:Departemen Agama
DEPDAGRI	:Departemen Dalam Negeri
DIRJEN	:Direktur Jenderal
GOLKAR	: Golongan Karya
IAIN	:Institut Agama Islam Negeri
JATIM	:Jawa Timur
KEJATI	:Kejaksaan Agung Jawa Timur
K.H	:Kiai Haji
LDII	:Lembaga Dakwah Islam Indonesia
LEMKARI	:Lembaga Karyawan Islam Indonesia/ Lembaga Karyawan Dakwah Islam
LPIAK	:Lembaga Penelitian Ilmu Agama
MENAG	:Menteri Agama
MUBES	:Musyawarah Besar
MUI	:Majelis Ulama Indonesia
NU	:Nahdatul Ulama
ORBA	:Orde Baru
ORMAS	:Organisasi Masyarakat
PAKEM	:Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat
PJO	:Penanggung Jawab Operasional

PKP	:Penanggung Jawab Keberhasilan
PTDI	:Perguruan Tinggi Dakwah Indonesia
RI	:Republik Indonesia
SOSPOL	:Sosial Politik
TNI	:Tentara Negara Indonesia
UU	:Undang-undang
YPIJ	:Yayasan Pendidikan Islam Jamaah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebebasan beragama telah dijamin oleh pemerintah dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 bahwa, Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.¹ Berdasarkan UU tersebut, secara jelas bahwa negara menjamin kebebasan setiap warganya untuk memeluk agama. Kendati demikian, dalam implementasinya tidak semua organisasi atau lembaga keagamaan dapat berdiri. Pasalnya masih ada beberapa kelompok keagamaan yang dilarang. Salah satunya adalah kelompok agama Islam. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas keamanan dan kenyamanan negara.

Lembaga kemasyarakatan seperti organisasi Islam merupakan sebuah implementasi manajerial sebuah kelompok. Karena dengan organisasi atau lembaga yang sah, maka kelompok tersebut dapat menjalankan fungsinya. Organisasi atau lembaga ini nantinya juga berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat khususnya anggota dalam mengarahkan kehidupan, baik untuk kepentingan individu maupun sosial kemasyarakatan.

Di Indonesia terdapat berbagai macam aliran dan organisasi Islam, salah satunya adalah Lembaga Karyawan Islam (LEMKARI). Organisasi Lemkari

¹ Anonim, *Undang-undang Dasar'45 Negara Republik Indonesia* (Surabaya: Satya Nusantara). hlm. 35.

berdiri pada 03 Januari 1972 yang didirikan di Kediri Jawa Timur.² Lemkari berdiri sebagai implementasi aspirasi dari mantan anggota Islam Jamaah. Dimana Islam Jamaah ini merupakan aliran agama Islam yang dicurigai oleh masyarakat. Sehingga untuk menampung mantan anggotanya serta memperbaiki hal-hal yang dicurigakan kepada mereka, Lemkari didirikan sebagai wadah untuk mengawasi dan membimbing mereka. Perkembangan Lemkari ini kemudian ajaran dan budayanyadikait-kaitkan dengan Islam Jamaah. Sehingga hal tersebut mempengaruhi gerak laju perkembangan Lemkari.

Lembaga Karyawan Islam atau Lemkari merupakan salah satu organisasi keagamaan berbasis Islam yang memfokuskan kegiatannya pada bidang dakwah. Lemkari oleh Pemerintah Jawa Timur dimandatkan tugas untuk menjadi organisasi keagamaan yang dapat membina mantan-mantan anggota ajaran sempalan Islam Jamaah atau sejenisnya di Jawa Timur. Selain di Jawa Timur juga ada organisasi semacam Lemkari di daerah lain dengan nama yang berbeda. Misalnya di Jawa Tengah bernama Yayasan Karyawan Indonesia (YAKARI), di Jawa Barat dikenal dengan Lembaga Karyawan Dakwah Islam (LKDI), sedangkan di Jakarta adalah Karyawan Dakwah Islam (KADIM).³

Pada 29 Oktober 1971, Jaksa Agung RI mengeluarkan *Surat keputusan No.089/D.A/10/1971* yang berisi larangan atau pembekuan terhadap seluruh

² Habib Setiawan, *After New Paradigm* (Jakarta: Pusat Studi Islam Madani Institute, 2008), hlm. 2.

³ Lukman Setiawan, *Jamaah Islam Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Studi Deskriptif: Konstruksi Sosial Islam Jamaah LDII Terhadap Ajaran Agama Islam LDII di Desa Wonorejo Kecamatan Tandes Kota Surabaya, Skripsi Strata I Sosiologi* (Surabaya: Universitas Airlangga, 2011), hlm. 20.

aktivitas Islam Jamaah, Darul Hadist⁴ dan semacamnya, baik itu kegiatan dakwahnya maupun kegiatan organisatorisnya⁵. Berangkat dari keresahan dan kerusuhan masyarakat ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut. Nama Lemkari dikeluarkan bersama dengan gagasan untuk melegalkan Lemkari sebagai organisasi.

Perjalanan Lemkari tidak mulus. Banyak pihak yang curiga dengan ajaran-ajarannya. Terutama semenjak diklaim sebagai organisasi yang masih menggunakan ajaran Islam Jamaah, Jamaah Quran-Hadist atau sejenisnya yang disinyalir oleh banyak orang sebagai ajaran sesat atau sempalan. Pembaharuan metode dalam kegiatan dakwahnya dikecam oleh banyak orang.

Sejak diklaim sebagai ajaran yang tidak bisa lepas dari ajaran-ajaran sebelumnya, Lemkari mulai menjadi sorotan kelompok masyarakat dan Media.. Di Jawa Timur misalnya terdapat keputusan Pemerintah Daerah Gubernur Jawa Timur yang mengeluarkan Surat Keputusan kepada pengurus Lemkari tentang pembekuan dan larangan mereka untuk aktif di Lemkari. Pemerintah juga membentuk tim untuk membina dan memberikan pengawasan kepada mereka. Keputusan Pemerintah Daerah Jawa Timur dipicu oleh protes-protes yang dilakukan oleh tokoh masyarakat. Misalnya Organisasi berbasis keagamaan Islam misalnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang melakukan penelitian dan membuat petisi kepada Pemerintah Daerah Jawa Timur

⁴ Islam Jamaah, Darul Hadist dan semacamnya merupakan beberapa nama lembaga yang melatar belakangi berdirinya Lemkari.

⁵ M. Amin Djamaluddin, *Kupas Tuntas Kesesatan dan Kebohongan LDII: Lembaga Dakwah Islam Indonesia* (Jakarta: LPPI, 2008), hlm. 19.

Rumor yang mengaitkan Lemkari beredar di masyarakat. Seperti masalah penyimpangan yang terjadi di Kediri, rumor penggelapan dana organisasi, sampai strategi mencari uang dari sistem koperasi. Mengakibatkan beragam masalah. Misalnya penolakan warga atas Lemkari. Penjagaan polisi dalam aktivitas Lemkari dan sebagainya. Sampai pada pembakaran rumah warga, misalnya pembakaran rumah anggota Lemkari di Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Hampir seluruh aktivitas Lemkari dikecam oleh masyarakat. Tidak terkecuali usaha dakwahnya, seperti model pengajian, bai'at dan sebagainya. Banyak anggapan, bahwa bai'at merupakan aktivitas yang sesat. Bai'at merupakan upaya seorang pimpinan dalam melegitimasi anggotanya. Baiat juga diasumsikan sebagai kegiatan agama yang diharamkan, karena menaati perintah manusia bukan Tuhannya.

Pembinaan dan pengawasan terhadap Lemakri dilakukan oleh Pemerintah Daerah Jawa Timur. Pemerintah Gubernur Propinsi Jawa Timur mengeluarkan surat keputusan pemberhentian Lemkari.⁶ Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan surat pembinaan dan pengawasan kepada Lemkari. Hal ini dilakukan pemerintah untuk meredam ketegangan yang terjadi dimasyarakat. Serta untuk mengantisipasi persebaran bawah tanah yang dilakukan oleh Lemkari.

Pembinaan dan pengawasan yang dicanangkan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur tidak berjalan mulus. Koran Jawa Post terbitan 1988 mengabarkan bahwa anggota Lemkari susah dan terkesan menghindar.

⁶ Surat MUI Jawa Timur yang ditujukan kepada Pemerintah Gubernur Jawa Timur No. 030/MUI/JTM/IV/1989 (Surabaya:1989), hlm.26.

Ketegangan keagamaan semacam ini terjadi sejak paska kemerdekaan Indonesia. Hal ini seringkali ditimbulkan dari kelompok-kelompok radikal dalam Islam yang menyebut ajaran modernisasi Islam dan membawa pada disintegrasi atau konflik⁷. Seperti ketegangan antara beberapa golongan Islam, salah satunya Lemkari dengan pemerintah. Bahkan pada masa Orde Lama, ketegangan yang terjadi sampai pada pemberontakan-pemberontakan.

Oleh karena itu, Lemkari yang tergolong sebagai organisasi Islam baru di era tersebut menarik untuk diteliti. Kegigihannya dalam menjaga eksistensi dakwahnya patut untuk diteliti. Usaha dan strategi dari sebuah organisasi yang dilarang sampai mampu mendapatkan kepercayaan kembali menjadi hal yang menarik untuk diketahui.

Lemkari pada mulanya bukan sebuah organisasi. Hanya sebuah kelompok pengajian yang mengutamakan pengajaran Al-Quran dan Al-Khadist. Sehingga ajaran dan kegiatan dakwah mereka (pengajian) dianggap sebagai pengajian gelap⁸. Agar tidak disangka pengajian gelap, maka beberapa dari murid K.H Nur Hasan al Ubaidah berinisiatif untuk melegalkan Lemkari.

Lemkari di Jawa Timur menjadi menarik untuk diteliti. Pasalnya Jamaah Quran-Hadist yang menjelma menjadi Lemkari berdiri di Jawa Timur, tepatnya di Kediri dan Kertosono yang menjadi kota kedua persebaran setelah Kediri. Selain itu sikap pemerintah kepada Lemkari juga perlu untuk diteliti. Untuk memberikan sanksi kepada Lemkari pemerintah tidak serta merta melarang dan memboikot

⁷Heru Cahyono, *Peranan Ulama Dalam Golkar 1971-1980* (Jakarta: Sinar Harapan, 1992), hlm. 9.

⁸ Ludhy Cahyana, *Islam Jamaah dibalik pengadilan Media masa* (Yogyakarta: Benang Merah, 2003), hlm. 35.

seluruh aktivitasnya. Melainkan pengurus Lemkari Tingkat I Provinsi Jawa Timur. Pemerintah juga melakukan tindakan berupa penelitian untuk memastikan perkembangan Lemkari di Jawa Timur dan memerikan pembinaan kepada pengurus Lemkari di Jawa Timur.

B. Rumusan Masalah

Menggambarkan keadaan sosial dan keagamaan di Jawa Timur pada tahun 1970-1980 an tidak lepas dari hal yang melatar belakangi peristiwa-peristiwa tersebut. Salah satunya adalah masalah keagamaan yang dapat mempengaruhi keadaan sosial. Seperti pada sikap skeptis masyarakat Jawa timur terhadap salah satu organisasi Islam yang berdiri diatas kemapanan organisasi-organisasi Islam lainnya. Organisasi tersebut adalah Lemkari. Beragam argumen dari berbagai pihak dikeluarkan sebagai bentuk kontra dan protes mereka atas hadirnya organisasi tersebut. Ajaran sempalan yang dilarang oleh pemerintah juga dikait-kaitkan. Kendati demikian peristiwa dan isu-isu yang berkembang tidak membuat Lemkari terhempas dan keluar menjadi organisasi yang kalah. Lemkari tetap berdiri sampai saat ini.

Eksistensi dan dinamika Lemkari di Jawa Timur tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor yang menjadi stimulusnya untuk bertahan. Membahas organisasi Lemkari tidak dapat dilepaskan dari hal-hal yang berkaitan dengan kekuatan intern dan pandangan ekstern. Intern adalah berkaitan dengan keorganisasian Lemkari. Ekstern adalah respon pemerintah dan masyarakat terhadap Lemkari. Dari latar

belakang diatas maka permasalahan yang dapat dirumuskan lagi dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan organisasi Lemkari Jawa Timur tahun 1972-1989?
2. Bagaimana respon pemerintah dan masyarakat terhadap Organisasi Lemkari Jawa Timur tahun 1972-1989?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dalam penulisan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan perkembangan Lemakri Jawa Timur pada tahun 1972-1989.
2. Menguraikan upaya pemerintah mengatasi ketegangan yang disebabkan oleh Lemkari serta program dan pembinaan pemerintah kepada Lemkari.

Manfaat penulisan ini secara umum adalah untuk menambah wawasan masyarakat tentang Lemkari serta menjadi refrensi tentang organisasi keislaman, Lemkari Jawa Timur tahun 1971-1989.

D. Batasan Ruang Lingkup Penelitian

Supaya tidak terjadi perluasan dalam pembahasan, maka perlu adanya pembatasan tematik, ruang lingkup tempat dan ruang lingkup waktu. Batasan tematik dari penulisan ini adalah sejarah komunitas keagamaan. Penulisan ini mengambil ruang lingkup organisasi Lemkari Jawa Timur sebagai batasan spasial. Alasannya karena Lemkari berdiri di Jawa Timur. Organisasi ini didirikan sebagai

lembaga yang menampung dan memberikan bimbingan kepada mantan anggota Islam Jamaah di Jawa Timur.

Dalam perkembangan Lemkari, menurut pandangan tokoh keagamaan Islam masyarakat Jawa Timur tidak dapat lepas dari ajaran Islam Jamaah. Maka timbullah kecaman dan protes dari tokoh keagamaan di Jawa Timur, yakni dengan membuat dan mengirim petisi ke Pemerintah Daerah Jawa Timur. Hal tersebut kemudian berdampak pada terganggunya stabilitas keamanan dan kedamaian wilayah Jawa Timur. Sehingga Pemerintah Daerah Gubernur Jawa Timur melarang dan membekukan pengurus Lemkari tingkat I Provinsi Jawa Timur.

Pemerintah Jawa Timur juga melakukan penelitian, pengawasan dan pembinaan terhadap pengurus dan anggota Lemkari. Hal ini dilakukan untuk mencapai ketentraman dan kedamaian di Daerah Jawa Timur. Lemkari yang pada mulanya dipercaya untuk membina mantan anggota ajaran yang diklaim sempalan (Islam Jamaah dan semacamnya) pada akhirnya tidak dipercaya lagi. Sehingga Pemerintah Jawa timur turut andil dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan organisasi Lemkari di Jawa Timur.

Batasan temporal dari penelitian ini adalah sejak tahun 1972 dimana organisasi Lembaga Karyawan Islam di Jawa Timur berdiri sebagai organisasi yang akan menampung dan memberikan pembinaan kepada mantan pengikut Islam Jamaah atau aliran sejenisnya. Dalam usahanya Lemkari tidak lepas pula dari pengawasan masyarakat khususnya tokoh-tokoh keagamaan Islam di Jawa Timur. Seperti pada laporan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait keresahan mereka dan tidak setuju atas keberadaan Lemkari yang diajukan kepada

Pemerintah Daerah Jawa Timur. Hasil penulisan penelitian diakhiri pada tahun 1989 untuk menjadi tolok ukur perkembangan organisasi Lemkari paska mendapat pengawasan dan pembinaan dari tim yang dibentuk Oleh Pemerintah Daerah Jawa Timur.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang mengulas Lemkari telah disinggung oleh beberapa penulis ataupun peneliti. Namun kebanyakan judul dan pembahasan utamanya adalah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Karena Lemkari merupakan cikal bakal dari Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Buku tersebut diantaranya adalah *Mengupas Pasang Surut Lembaga Dakwah Islam Indonesia*, karya Hilmi Muhammadiyah⁹. Buku ini mengkaji awal pergerakan LDII di Kediri dengan pendekatan antropologi. Buku ini mengupas simbol-simbol awal dari LDII, yakni pondok pesantren Burengan Kediri, Jawa Timur. Buku ini sebagai peninjau dan pembanding antara Lemkari yang berkembang di Kediri dengan di Surabaya. Serta sebagai pendukung dari penelitian, bagaimana perkembangan Lemkari di awal-awal, yang notabenenya diawali di Kediri.

Jamaah Islam Lembaga Dakwah Indonesia (LDII) Studi Deskriptif: Konstruksi Sosial Jamaah Islam LDII Terhadap Ajaran Agama Islam LDII di Desa Wonorejo Kecamatan Tandes Kota, karya Lukman Setiyawan¹⁰ juga

⁹ Hilmi Muhammadiyah, *LDII (Pasang Surut Relasi Agama dan Negara)* (Depok: Elsas, 2013). Buku ini merupakan hasil disertasi yang diterbitkan menjadi buku.

¹⁰ Lukman Setiyawan. "Jamaah Islam Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Studi Deskriptif: Konstruksi Sosial Islam Jamaah LDII Terhadap Ajaran Agama Islam LDII di Desa Wonorejo Kecamatan Tandes Kota Surabaya". Dalam tulisan *Skripsi* (Surabaya: FISIP, Universitas Airlangga, 2011/2012).

mengulas LDII. Kajian dalam penelitiannya fokus pada permasalahan kemunculan ajaran Islam LDII yang dikaitkan dengan Darul Hadist. Dimana dalam hal ini mendapat bantahan dari anggota Lemkari. Ulasan penelitian ini kemudian dikaitkan dengan teori konstruksi sosial. Mendeskripsikan konstruksi masyarakat luar (bukan anggota Lemkari) dengan masyarakat yang telah mengikuti Lemkari. Penulis membandingkan konstruksi antara anggota Lemkari dengan masyarakat yang tidak menjadi anggota Lemkari. Proses pengenalan dan penerimaan anggota dikaji, seperti pengenalan sejak kecil oleh keluarga, menjadi anggota sejak menikah dengan orang Lemkari dan sebagainya. Skripsi ini menjelaskan LDII di Tandes. Hal ini berbeda dengan penelitian ini. Letak perbedaannya adalah metode yang digunakan sejarah, sehingga hasil penelitian dikemas dengan memperhatikan sebuah perubahan. Skripsi Lukman, memfokuskan pada kajian kontemporer, yakni sekitar tahun 1999-2000-an, sedangkan penelitian ini memfokuskan penelitian pada tahun 1972-1990, dimana nama organisasi masih Lemkari. Kajian tidak hanya mengupas konstruksi anggota dan diluarnya, keterkaitan Golkar yang pernah ada di dalam AD/ART Lemkari juga akan diteliti. Skripsi ini akan dijadikan acuan bagaimana perkembangan LDII di Tandes. Karena pada bagian latar belakang, menyinggung LDII pada periode 1970-an, yakni masa Lemkari baru didirikan.

Buku lain yang mengupas Lemkari adalah *Islam Jamaah dibalik pengadilan media Massa*¹¹. Buku ini menjelaskan bagaimana peran media cetak terhadap pemberitaan Lemkari. Dimana dalam artikel berita kabar yang

¹¹ Ludhy Cahyana, *op.cit.*

diberitakan memunculkan informasi tentang Lemkari. Informasi ini kemudian tertransfer langsung ke masyarakat dan menciptakan sebuah peradilan non formal yang memberi kebebasan ruang dan waktu terhadap masyarakat dalam berpendapat. Jadi, buku ini mendeskripsikan dinamika informasi-informasi Lemkari melalui media masa dan pandangan masyarakat terhadap Lemakri atas informasi yang berkembang.

F. Kerangka Konseptual

Teori organisasi merupakan teori yang digunakan untuk menganalisis fenomena organisasi di dalam masyarakat. Berbagai pandangan dan pemikiran yang muncul mengenai fenomena organisasi ini memunculkan pengetahuan baru yang berfokus pada teori organisasi. perkembangan teori organisasi juga dipengaruhi oleh perkembangan dalam ilmu administrasi, manajemen ilmiah dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Berikut adalah teori-teori organisasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli, diantaranya adalah;

Organisasi dari jenisnya menurut Herbert G. Hicks dibedakan menjadi dua yakni organisasi formal dan organisasi non-formal. Namun konsep yang digunakan dan sesuai dengan pembahasan penelitian ini adalah menggunakan organisasi formal. Dimana suatu organisasi formal mempunyai struktur yang dinyatakan dengan baik yang dapat menggambarkan hubungan-hubungan wewenang, kekuasaan, akuntabilitas, dan tanggung jawab. struktur dapat juga menunjukkan saluran-saluran melalui aliran hubungan. organisasi formal mempunyai perincian pekerjaan yang jelas bagi tiap-tiap anggota. jenjang tujuan organisasi formal dinyatakan dengan tegas. status, prestige, gaji, pangkat dan lain-

lain penghasilah diatur dan dikontrol secara baik. organisasi formal tahan lama dan terencana, sebab penempatannya sesuai peraturan, mereka relatif tidak flexibel. keanggotaan dalam organisasi formal diperoleh dengan sadar, pada waktu tertentu, dan biasanya terbuka.¹²

Lembaga Karyawan Islam yang mulanya merupakan perkumpulan kemudian ditransformasi menjadi Organisasi Formal sejak tahun 1972. Hal ini dilakukan untuk memperkuat eksistensi melalui jalur legalitas hukum. Organisasi Lemkari dapat dikatakan formal karena organisasi ini terdapat pembagian yang jelas, sesuai dengan apa yang didefinisikan oleh Herbert G. Hicks dalam buku Dasar-dasar organisasi yang dikarang oleh Sutarto. Hal ini terlihat pula pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Lemkari yang diterbitkan pada tahun 1972.

Pendekatan dalam teori organisasi ini adalah teori sistem. Para ahli teori organisasi melihat organisasi dari dua sudut pandang. Sudut pandang pertama adalah melihat organisasi sebagai satu kesatuan unit yang memiliki suatu tujuan. Pendekatan ini memusatkan perhatiannya pada pembagian kerja dalam pencapaian tujuan organisasi serta prosedur-prosedur kerja yang ditetapkan dalam mencapai tujuan. Kedua, pendekatan yang melihat hubungan antar elemen, baik dalam lingkup intern maupun eksternal organisasi. Pendekatan ini melihat organisasi tersusun dari elemen-elemen yang saling berhubungan.

Dalam organisasi Lemkari yang merupakan organisasi baru dalam mewadahi aspirasi-aspirasi, mencoba menjadikan dirinya sebagai organisasi yang

¹² Sutarto, *Dasar-Dasar Organisasi* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press: 1987), hlm. 12-13.

sistematis. Pada awal pembentukan, Lemkari berusaha membuat pembagian kerja, prosedur kerja yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lemkari. Selain itu perkembangan Lemkari juga tidak dapat dilepaskan dari hubungan Lemkari dengan pihak luar, seperti lembaga, organisasi atau sebuah perkumpulan. Sehingga hal demikian membawa Lemkari untuk selalu mengaktualisasikan diri dengan masyarakat. Misalnya, paska Lemkari berdiri di Kediri sebagai pusat, Lemkari dalam Muker ataupun Mubes mencoba memperbaiki diri dan menyesuaikan diri dengan keadaan. Seperti mencoba membuat struktur organisasi secara vertikal, dari pusat sampai anak cabang.

Adapun kerangka konseptual pendukung yang ditujukan sebagai pengarah dari pembahasan kedua yang berkaitan dengan pandangan eksternal adalah teori “*Konstruksi Sosial*” (Peter L. Berger). Konsep konstruksi sosial oleh Berger adalah manusia merupakan *homo sapiens* dan *homo socius* jika kemanusiaan manusia yang spesifik dan sosialitasnya jalin-menjalin secara tidak terlepas¹³.

Inti dari kepribadian manusia baik secara individu maupun kelompok adalah kesadaran dan kebebasannya (dunia subjektif)¹⁴. Pemikiran individu maupun kelompok atau organisasi tidak dapat dilepaskan dengan perilaku sosial. Kebebasan dan kesadaran dapat dilakukan siapa saja dan kelompok mana saja. Kendati demikian hal tersebut juga dibatasi oleh keadaan lingkungan. Sehingga tercipta pola atau perilaku kehidupan yang dipengaruhi oleh interaksi sosial dan

¹³ Berger:1990 dalam Lukman Setiyawan, “Jamaah Islam Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Studi Deskriptif: Konstruksi sosial Jamaah LDII Terhadap Ajaran Agama Islam LDII di Desa Wonorejo Kecamatan Tandes Surabaya”, *Skripsi*, (Surabaya: Fisip Unair, 2011).

¹⁴ Paloma,(1942:397) dalam Esti Damarwati, “aktivitas Mahasiswa Kelompok Dakwah Tarbiyah Ikhwanul Muslimin, *Skripsi*, (Surabaya: Fisip Unair 2013), hlm.9.

respon masyarakat. Pola tersebut kemudian menentukan eksistensi individu atau kelompok pada realitas sosial.

Jika dikaitkan dengan Lemkari, konsep ini untuk mendeskripsikan respon masyarakat dan pemerintah Jawa Timur terhadap Lemkari. Pasalnya respon masyarakat Jawa Timur, khususnya yang diwakili oleh tokoh masyarakat Jawa Timur, seperti MUI mempengaruhi kebijakan Pemerintah Jawa Timur terhadap agama. Khususnya Lemkari itu sendiri. Sehingga ritme gerak Lemkari dipengaruhi oleh keadaan masyarakat disekitarnya. Misalnya pada perubahan Lemkari, dari bergabung dengan Golkar, namun tahun 1980an hubungannya menjadi longgar. Hal tersebut disebabkan oleh undang-undang organisasi masyarakat tahun 1985 dan respon masyarakat yang masih menganggap Lemkari sebagai organisasi yang masih menggunakan ajaran aliran yang dianggap sempalan sebelumnya.

Menurut Troeltsch, munculnya suatu sekte atau komunitas baru merupakan akibat dari konflik batin atau ketidak puasan terhadap prinsip nilai yang sudah mapan.¹⁵ Dalam hal ini Lemkari muncul sebagai ormas Islam adlaah sebagai wujud ketidak puasan pendiri terhadap ajaran-ajaran pada kelembagaan Islam yang telah mapan. Ada hal baru yang ingin dicapai dan wujudkan. Misalnya adalah meng*khittahkan* kembali ajaran Islam. Seperti mengadakan keamiran, pengajaran manqul dan sanad. Hal ini kemudian yang mempengaruhi jalannya perkembangan organisasi Lemkari itu sendiri. Ajaran baru yang diperkenalkan, perlu disosialisasikan dan mendapat respon positif untuk dapat mempertahankan

¹⁵ Hilmi, *op.,cit*, hlm. 25.

eksistensinya. Jika sebuah organisasi baru tidak mendapatkan hal tersebut, maka yang terjadi adalah organisasi tersebut terhempas dan mengalami dislokasi sosial. Dislokasi sosial merupakan tercabutnya anggota masyarakat dari kedudukan sosial tertentu dan diganti dengan kedudukan sosial tertentu. Hal ini kemudian terjadi pada organisasi Lemkari. Meskipun Lemkari berubah menjadi sebuah organisasi formal, namun Lemkari belum mendapatkan kepercayaan di masyarakat. Dislokasi sosial ini terjadi sebagai bentuk tidak terciptanya integrasi antara Lemkari dengan masyarakat.¹⁶

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode sejarah yang meliputi: Heuristik (pengumpulan sumber), Verifikasi (Kritik Intern dan Ekstern serta keabsahan sumber), interpretasi (analisis dan sintesis), serta penulisan (Historiografi).¹⁷

Heuristik merupakan tahap pertama, yakni pengumpulan sumber-sumber sejarah. Proses ini merupakan tahap pencarian literatur baik itu tertulis maupun lisan yang dijadikan bahan. Sumber yang ditemukan oleh penulis kemudian dikategorikan menjadi dua, yakni sumber primer dan sumber sekunder.

Sumber primer merupakan sumber-sumber asli yang dijadikan bukti sejaman dari suatu peristiwa yang terjadi seperti arsip Lemkari (AD/ART), artikel-artikel di surat kabar dan majalah sejaman. Sumber primer ini nantinya

¹⁶ Herutomo, *Perbandingan Sistem Pers*, Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Sumatera Utara, tt, hlm. 1.

¹⁷ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2001), hlm. 91.

akan didukung oleh sumber-sumber lainnya, sumber lainnya ini disebut sumber sekunder yang dijadikan sebagai bahan rujukan penulisan dalam melakukan penelitian. Sumber sekunder dapat berupa tulisan-tulisan baik itu dalam bentuk buku, artikel maupun jurnal serta sumber lisan.

Pengumpulan sumber dilakukan diberbagai tempat yang menyimpan arsip-arsip, buku-buku serta artikel yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yang akan ditulis oleh peneliti anantara lain kantor DPP LDII, kantor DPD LDII Jawa Timur, dan kantor LDII yang ada didaerah-daerah, Arsip Provinsi Jawa Timur, Arsip Kota Surabaya, , Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Perpustakaan Nasional Jakarta (PERPUSNAS). Arsip yang ditemukan dapat berupa surat keputusan ataupun kebijakan-kebijakan, baik itu dari negara (pemerintah) ataupun institusi atau organisasi yang terkait.

Penelusuran sumber lainnya dilakukan di perpustakaan pusat kampus B Universitas Airlangga Surabaya, Ruang Baca Departemen Ilmu Sejarah Universitas Airlangga, Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Timur, perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, Perpustakaan Medayu Agung Surabaya, Ruang Referensi Skripsi dan Disertasi Universitas Negeri Surabaya dan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya serta Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Jakarta dan Surabaya, perpustakaan AWS Stikosa Surabaya, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Peprustakaan Nasional Republik Indonesia Jakarta (PERPUSNAS).

Penulis juga akan menggunakan sumber artikel, selain itu sumber pendukung dari internet pula akan digunakan untuk membantu dalam penulisan penelitian ini guna menambah wawasan akan topik yang diangkat. Penggunaan sumber lisan yang dilakukan melalui wawancara dengan pelaku sejarah, saksi dari peristiwa sejarah, orang yang mendapat informasi langsung dari pelaku sejarah dan yang terkena dampak langsung dari peristiwa sejarah, dalam hal ini adalah tokoh-tokoh LDII di Surabaya dan sekitarnya.

Sebelum melakukan wawancara, terlebih dahulu diadakan penelusuran informasi dan seleksi terhadap para koresponden atau narasumber. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan wawancara, yang *pertama* adalah narasumber merupakan pelaku langsung atau sejamin. *Kedua*, narasumber diusahakan masih memiliki ingatan yang baik (*waras, tidak lupa ingatan, pikun*). *Ketiga*, ketika narasumber atau pelaku mengalami peristiwa tersebut, usianya minimal 15 tahun, hal ini berkaitan dengan kekuatan daya ingatnya.¹⁸

Setelah pengumpulan sumber dilakukan, tahap ketiga ialah Verifikasi sumber yakni pengujian kebenaran dan ketepatan dari sumber tersebut. Verifikasi sumber dalam metode penulisan atau penelitian sejarah dikenal dengan dua cara, yaitu kritik eksternal (Autentisitas) dan kritik internal (Kredibilitas).¹⁹

Kritik eksternal (Autentisitas) merupakan kritik yang dilakukan untuk mengetahui apakah sumber data yang telah terkumpul asli, turunan, atau palsu. Kritik eksternal ini diberlakukan pada semua sumber, baik itu tulisan maupun

¹⁸ Abd. Rahman Wahid dkk., *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Ombak, 2008), hlm. 46.

¹⁹ *ibid.*, hlm.100

lisan. Kritik eksternal pada sumber tertulis menyangkut semua penampilan luarnya, seperti jenis kertasnya, tinta yang digunakan, jenis tulisan, gaya bahasa yang digunakan, kalimat dalam ungkapannya, kata-kata, huruf dan sebagainya, apakah sejaman atau tidak. Kritik eksternal harus menegakkan fakta dari kesaksian, bahwa kesaksian itu benar-benar diberikan oleh orang tersebut dengan kesaksian yang telah diberikan itu berdasarkan fakta dari suatu peristiwa yang terjadi dan tidak mengalami perubahan.

Setelah menentukan sumber-sumber autentik, langkah selanjutnya adalah menkritik sumber secara internal (kredibilitas) dengan meneliti apakah dokumen tersebut bisa dipercaya. Penelitian untuk mencari kebenaran konten dari sumber tersebut dilakukan agar hasil dari penelitian tidak diragukan, oleh karena itu perlu upaya meyakinkan bahwa data yang diperoleh adalah benar adanya.

Setelah melalui tahap verifikasi maka selanjutnya dilakukan interpretasi terhadap data tersebut. Namun sebelum itu perlu adanya pengklasifikasian sumber, untuk mempermudah penulisan. Klasifikasi ini didasarkan pada kesamaan tahun terbit sumber dan konten sumber. Sehingga peristiwa yang terjadi dapat dilihat dan pembahasan terhadap suatu permasalahan diusahakan dapat lebih terperinci dan prosedural.

Pada tahap penafsiran atau interpretasi, tidak dapat dipungkiri subjektivitas tak dapat dihindarkan, karena tanpa subjektivitas maka sumber atau peristiwa sejarah tidak akan berbicara.²⁰ Uraian tulisan dari sumber ini nantinya akan disesuaikan dengan konsep yang akan kita gunakan.

²⁰ *Ibid.*, hlm.102

Tahap terakhir adalah Historiografi, yakni penulisan. Penafsiran dan interpretasi ditulis berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh sumber yang ditemukan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan ide-ide pokok penulisan yang menjadi bagian dari hasil historiografi diklasifikasi menurut bab-bab yang memuat satu kerangka pembahasan. Dimana dalam bab-bab tersebut akan diperinci kedalam sub-bab. Hal ini dimaksud untuk memfokuskan dan membuat pembahasan menjadi terstruktur.

Bab I berisi pendahuluan yang memuat latar belakang permasalahan, rumusan masalah, konsep dan kerangka penulisan, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan bab gambaran umum yang mendeskripsikan latar belakang berdirinya Lemkari di Jawa Timur. Menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan sebab berdirinya Lemkari di Jawa Timur. Dalam bab ini juga akan dijelaskan sejarah berdirinya Lemkari di Jawa Timur.

Bab III membahas peran dan aktivitas Lembaga Karyawan Islam di Jawa Timur pada tahun 1972-1989 sebagai salah satu organisasi yang bergerak pada bidang dakwah. Mendeskripsikan respon masyarakat dan pemerintah terhadap keberadaan dan proses perkembangan Lembaga Karyawan Islam (LEMKARI) di Jawa Timur. Memuat argumen-argumen masyarakat Jawa Timur kepada Lembaga Karyawan Islam (LEMKARI) Jawa Timur. Mendeskripsikan

respon Pemerintah Jawa Timur kepada LEMKARI melalui program penelitian dan pembinaan yang dilakukan oleh tim pengawasan dan pembinaan yang dibentuk oleh Pemerintah Jawa Timur.

Bab IV berisi penutup dan kesimpulan dari hasil pembahasan historiografi. Pada bab penutup dan simpulan ini merupakan kesimpulan atau inti sari dari pembahasan penulisan. Kesimpulan dalam bab ini merupakan pembacaan dan analisis dari penelitian dan pembahasan terhadap data yang ditemukan dan diseleksi dalam tahap yang tercantum pada metode penelitian sekaligus sebagai penutup historiografi.

BAB II

SEJARAH LEMBAGA KARYAWAN ISLAM (LEMKARI)

A. Latar Belakang Berdirinya Lembaga Karyawan Islam (LEMKARI)

Berdirinya Lemkari tidak dapat dilepaskan dari berbagai isu atau peristiwa yang pernah dikaitkan terhadap organisasinya. Lemkari pada awal pendirian diklaim sebagai jelmaan beberapa organisasi yang dilarang atau dibekukan oleh pemerintah dan berbagai pihak karena ajarannya dianggap serupa. Selain itu beberapa orang dari mantan anggota Islam Jamaah dan sejenisnya yang ditampung Lemkari dicurigai telah memberikan pengaruh ajaran mereka kepada Lemkari. Sehingga Lemkari tidak bisa lepas dari kecurigaan masyarakat bahwa beberapa dari ajarannya masih menggunakan dan menyebarkan ajaran-ajaran aliran Islam Jamaah dan semacamnya.¹

Pada tahun 1940, H. Nur Hasan Al Ubaidah yang merupakan pendiri dan penggagas Lemkari pulang dari Mekkah setelah menjalankan ibadah haji yang kedua. Kedatangannya disertai dengan membawa faham tentang konsep keagamaan bagi masyarakat. Konsep-konsep tersebut terdiri dari keamiran, baiat, sistem sanad dan manqul.

Konsep pertama adalah keamiran yakni mengangkat seseorang untuk menjadi amir atau imam. Secara harfiah, amir atau imamah adalah pemimpin yang berasal dari kata imam. Amir diangkat dengan cara diabai'at untuk dijadikan imam atau pemimpin. Tujuannya adalah agar ia menjadi penasehat dalam bidang

¹ Amin Djamaluddin, *Kupas Tuntas Kesesatan dan Kebohongan LDII* (Jakarta: LPPI, 2008), hlm 14.

pengalaman ibadah agama. orang yang membai'atnya adalah orang-orang yang juga mengikuti ajaran keagamaan tersebut. Orang yang memberikan nasihat dan arahan keagamaan kepada Lemkari. Keamiran ini hanya direpresentasikan sebagai amir dalam Lemkari saja. Untuk pemimpin negara atau pemimpin lainnya, Lemkari menganggap bahwa pemimpin yang sudah ada tersebutlah yang memimpin negara atau daerahnya.

Konsep yang kedua yakni Baiat. Menurut arti bahasa baiat adalah pengangkatan atau pelantikan yang bersifat mengikat. Secara definisi seperti pada baiat pada masa Nabi Muhammad SAW, maksud dari adanya baiat adalah mengutarakan janji setia kepada nabi. Ajaran ini merupakan hasil adopsi dari ajaran pada masa Nabi Muhammad. Ajaran ini diterima dan diimplementasikan dalam aliran Islam Jamaah. Sehingga sebelum menjadi pemimpin atau anggota wajib dibaiat terlebih dahulu.

Selanjutnya adalah sistem sanad dan manqul. Sistem sanad adalah memberikan ilmu keagamaan secara berantai. Menyampaikan ilmu dari guru ke murid, murid tersebut kemudian mentransfer ilmunya ke murid selanjutnya. Sedangkan manqul adalah cara belajar seseorang yang langsung mendengarkan gurunya. Doktrin lain yang menjadi alasan resahnya masyarakat, khususnya para tokoh agama adalah karena Islam Jamaah hanya menganggap anggotanya yang paling benar. Bahwa hanya anggota Islam Jamaah adalah benar dan yang lain tidak.²

² *ibid*, hlm vii.

Selain konsep, Nur Hasan dalam mendirikan aliran ini juga disertai dengan motivasi. Adapun motif yang dibawa oleh Nur Hasan adalah bahwa di Indonesia belum ada sistem keamiran di Indonesia. Keamiran³ hanya bertugas mengurus nasehat-nasehat agama berdasarkan Quran dan Hadist yang murni . Ajaran Islam dikembalikan pada ajaran yang sebenarnya.

Sedangkan tujuan pokok yang hendak dicapai adalah mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk memeluk agama Islam yang murni atau benar dengan berjamaah, beramir, berbai'at dan taat kepada Allah, Rasul dan amirnya. Mengajak umat Islam untuk berpegang teguh kepada ajaran Islam yang berpedoman pada Al-quran dan Al-hadist. Mengharapkan surga dan takut neraka.

Pada tahun 1941, Nur Hasan mulai menyebarkan faham keagamaannya. Sasaran pertama adalah dari lingkungan terdekatnya seperti keluarga, sanak saudara, kerabat dan kawan-kawannya. Bertempat di Surau Dusun Santren Bangi, teaptnya di kediaman H. Abdul Aziz. Dua orang melakukan baiat yakni H. Nur Asnawi dan Bahrn (H. Ahmad Salam), dan keduanya juga mengangkat Nur Hasan sebagai amir. Pada tahun 1943, anggotanya bertambah diantaranya adalah, Sanusi, Khotimah (Istri H. Nur Asnawi), Alsuntikah (Istri Nur Hasan), dan H Rifa'i (Man Baet). Pada tahun 1950-an Nur Hasan menyewa pekarangannya H. Ghozali di jalan Kenari Gg. I/ No. 9C Burengan Kediri. Nur Hasan juga mengajarkan Alquran, Juz Amma, dan Hadist asa'i bab sholat. Adapun peertanya adalah Ahmad Sholeh, Tasripin, Khasun, Musibun, Nuruddin, Sofwan, H. Nur

³ Kemairan adalah seorang pemimpin. Orang yang memimpin disebut Amir. Bertugas memberikan nasehat-nasehat agama kepada masyarakat atau pengikut-pengikutnya. Nasehat-nasehat agama yang disampaikan didasarkan pada Al-Quran dan Al-Hadist yang muhlis (murni) tanpa ada campuran dari aspek lainnya seperti politik dan negara.

Rahmad Da'im, Abu Yamin, Abdul Rosyid, Abdul Busyro, Mbah Damah, H. Harun, Dukhak, Mu'alif, dan H. Wahid.⁴ Bertambahnya anggota ini dikarenakan pamor Nur Hasan sebagai lulusan pondok di Mekkah. Sehingga banyak orang yang percaya dan belajar kepadanya.

Setelah berhasil mengumpulkan anggota, Nur Hasan kemudian diangkat sebagai amir oleh pengikut-pengikutnya. Pengangkatan Nur Hasan sebagai amir adalah dengan diba'at⁵. Pembaiatan dilakukan di Desa Bangi Kecamatan Purwosari Kabupaten Kediri. Adapun pengikut yang menjadi saksi atas pembaiatannya adalah Alm. Sabar dari Dukuh Bangi-Kediri, Alm. Abdul Rasyid dari Dukuh Bangi-Kediri, H. Sanusi dari Dukuh Bangi-Kediri, H. Abdul Salam dari Moromarto-Kediri, H. Nur Asnawi dari Desa Balongjeruk-Kediri, dan H. Ahmad dari Burengan-Kediri.⁶

Proses baiat yang telah dilaksanakan Nur Hasan merupakan awal disahkannya sebagai pemimpin aliran tersebut. Selain melakukan penyebaran, strategi pertahanan juga dilakukan. Hal ini dikarenakan jalannya perkumpulan mereka tidak berjalan dengan lancar. Salah satu cara untuk bertahan adalah dengan merubah nama-nama perkumpulan mereka.

Adapun nama-nama yang pernah digunakan oleh perkumpulan tersebut diantaranya adalah Jamaah Quran Hadist, Pondok Darul Hadist, Yayasan

⁴ anonim, Sejarah Bapak Imam H. Nur Hasan Al Ubaidah, diterbitkan dari pondon Burengan Kediri. 25 Maret 2013

⁵ Baiat merupakan prosesi mengucapkan janji setia kepada muridnya yang menjadi saksi bahwa Nur Hasan bersedia untuk menjadi amir.

⁶ Pernyataan dan Seruan Bersama MUI dan Ormas Islam Dati I Jatim, No. 030/MUI/JTM/IV/1989, Bab I hlm. 6.

Pendidikan Islam Jamaah, Jamaah Motor Club atau Duta Motor Club, dan Pondok Golkar.⁷

Jamaah Quran Hadist adalah nama pertama yang dikaitkan dengan Lemkari. Merupakan perkumpulan yang mengadakan aktivitas pengajian Alquran dan Hadist dengan model pengajian manqul⁸. Perkumpulan ini berlangsung sejak tahun 1949. Setelah itu muncul nama baru yakni Pondok Darul Hadist, berdiri pada tahun 1950. Karena didirikan oleh orang yang sama maka pondok ini dikaitkan dengan keberadaan dan kelanjutan dari aktivitas Jamaah Quran Hadist. Pondok Darul Hadist berdiri di Burengan Kediri Jawa Timur. Namun tidak lama kemudian pondok ini dicurigai sebagai pusat kegiatan yang memberikan pengaruh-pengaruh negatif terhadap masyarakat. Misalnya dalam hal ceramah-ceramah pengajian yang disampaikan oleh para tokoh agama Darul Hadist. Sehingga hal ini memicu keresahan masyarakat. Maka pada tanggal 28 Juni 1967, Darul Hadist dilarang dan dibubarkan oleh Pangdam VIII Brawijaya Jawa Timur selaku penguasa Dwikora Daerah Jawa Timur. Larangan tersebut dilegalkan oleh tanda tangan Mayor Jendral M. Yasin dengan surat keputusan No: Kep/28/26/1967, tentang larangan gerakan Darul Hadist dalam wilayah Jawa Timur.⁹

Paska Darul Hadist dilarang muncul nama baru pada tahun 1971 yakni Yayasan Pendidikan Islam Jamaah atau Islam Jamaah. Namun nama dan kegiatannya dicurigai lagi oleh masyarakat. Hal ini kemudian membuat

⁷ *ibid*, hlm. 6-7.

⁹ *ibid*, hlm. 7.

pemerintah melalui Kejaksaan Agung mengeluarkan Surat Keputusan No. kep: 089/DA/X/1971 bahwa segala jenis kegiatan dakwah dan kegiatan lainnya Islam Jamaah dan sejenisnya telah dilarang.¹⁰

Disela-sela kegiatan yang mendapat larangan, Islam Jamaah juga mendirikan Jamaah Motor Club atau duta Motor. Club ini dibentuk untuk memperbaiki hubungan dengan pemerintah. Sejak dibentuknya club ini, mereka mulai mengadakan aktifitas-aktifitas peringatan pada hari-hari besar Nasional seperti 17 Agustus dan Hari Kartini.

Nama lain yang kemudian diklaim sebagai jelmaan Lemkari adalah Pondok Golkar. Nama ini dikaitkan dengan Golkar karena menurut MUI Jawa Timur dalam suratnya yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur, mereka pernah bergabung menjadi tim sukses Golkar pada Pemilihan Umum (Pemilu) 03 Juli 1971. Hal ini juga berdampak pada perubahan nama pondok Burengan yang semula “Darul Hadist” menjadi Pondok Golkar.¹¹

Asumsi lain yang dikaitkan antara Lemkari dengan organisasi diatas adalah disebabkan oleh adanya beberapa anggota Lemkari yang merupakan mantan anggota atau pengikut perkumpulan-perkumpulan tersebut. Ajaran-ajaran Lemkari menjadi sorotan. Banyak pihak khawatir bahwa ajaran aliran Islam Jamaah masih ada dan berdampak buruk terhadap masyarakat khususnya anggota yang baru. Sehingga hal ini berdampak pula terhadap eksistensi Lemkari.

¹⁰ Hilmi Muhammadiyah, *LDII: Pasang Surut Relasi Agama dan Negara* (Depok: Elsas, 2013), hlm. 128.

¹¹ Pernyataan dan seruan bersama MUI dan Ormas Islam Dati I Jatim No. 030/MUI/JTM/IV/1989 , log.cit, hlm. 8.

Larangan dari pemerintah tidak serta merta membuat mantan anggota Islam Jamaah surut. Pasalnya beberapa diantara mereka meminta kesempatan kepada pemerintah untuk diberi ijin mendirikan lembaga yang dapat menampung dan memberikan bimbingan kepada mereka. Adapun lembaga yang diusulkan adalah Lembaga Karyawan Islam (Lemkari).¹²

Pada setiap aliran atau lembaga keagamaan termasuk ormas Islam, menggunakan mazhab sebagai pedoman atau metode dalam membawa kegiatan serta tujuan keagamaannya. Lemkari sebagai salah satu ormas Islam juga menjadikan mazhab sebagai pedoman atau pegangan mereka. Mazhab yang diamalkan adalah paham Salafi. Paham Salafi merupakan sebuah paham yang mengajarkan umat Islam agar menjadikan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya sebagai panutan. Terbebas dari hal-hal yang berkaitan dengan *tahayul*, *bid'ah*, dan *khurafat*. Mencita-citakan untuk memurnikan ajaran agama Islam dalam segi praktek ibadah.

Dalam perkembangannya, perjuangan Salafi mengalami pengembangan dalam dua dimensi. *Pertama*, dimensi ideologi yang terpecah menjadi dua yakni ekstrem kanan dan ekstrem kiri. *Kedua*, yakni pengembangan pada pandangan Salafi itu sendiri kedalam empat aspek. *Pertama*, menolak taklid yang ditawarkan oleh fiqh dan teologi dalam pemahaman Islam yang tradisional. *Kedua*, pemikiran sosial-politik, yang melihat kekuasaan hanya pada Allah SWT, agama Islam memiliki konsep untuk kemasyarakatan dan kenegaraan. *Ketiga*, metode pendidikan yang fokus pada nilai moral agama, seperti *taqwa* dan menerima

¹² Amin Djamaludin, *op. cit.*, hlm. 2

pemberian Allah atau bersyukur, bersikap sederhana, sabar, dan tawakal.¹³ Lemkari dalam implementasi ajaran-ajarannya menggunakan Salafi sebagai pedoman. Hal ini terlihat pada tujuan pendirian dan ibadahnya yang mengedepankan kemurnian dari setiap ajaran-ajarannya. Misalnya mengadakan amir, kembali kepada Quran dan Hadist sebagai pedoman. Mengkader setiap anggotanya untuk merima metode pendidikan yang fokus pada nilai moral agama, seperti *taqwa* dan menerima pemberian Allah atau bersyukur, bersikap sederhana, sabar, dan tawakal.

B. Profil Pendiri Lembaga Karyawan Islam (LEMKARI)

Berdirinya sebuah organisasi tidak dapat lepas dari peran seseorang yang menjadi penggagas dan penggerak. Orang yang menjadi penggagas ini selain berperan dalam pendirian juga akan menjadi seseorang yang dihormati dikalangan organisasinya. Begitu pula dengan organisasi Lemkari, dibalik pendiriannya terdapat orang yang berperan untuk menggerakkan dan mengembangkan organisasi tersebut.

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia orang yang memiliki ciri tersebut disebut sebagai kiai. Arti kata kiai secara leksikal terdapat beberapa pengertian. *Pertama*, sebutan bagi alim ulama (cerdik-pandai dalam ilmu agama Islam). *Kedua*, sebutan bagi guru ilmu gaib. Pemaknaan mengenai kata kiai juga dapat diartikan sebagai seorang ahli yang berfokus pada bidang keagamaan.¹⁴

¹³ Habib Setiawan, dkk., *After New Paradigm: Catatan Para Ulama Tentang LDII* (Depok: Pusat Studi Islam Madani Institut) hlm. 7-9.

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Tesaurus Bahasa Indonesia* Pusat Bahasa (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 7.

Kiai dalam struktur masyarakat diposisikan dalam kelompok atas. Secara status sosial ditempatkan sebagai tokoh, karena dianggap memiliki kelebihan dalam hal ilmu pengetahuan agama dan kebijaksanaan. Oleh karena itu kiai sering didatangi dan diminta untuk memberikan nasihat. Menurut Zamakhsyari, secara teknis seseorang pantas dan berkembang untuk disebut sebagai kiai adalah apabila telah memiliki pesantren. Namun hal ini tidak mempengaruhi orang yang disebut kiai dan tidak memiliki pesantren. Hal tersebut tergantung pada karakter dan faktor sosialnya masing-masing.¹⁵

Dari segi kekuatan politik maupun kharisma personalnya, kiai merupakan sosok yang mempengaruhi proses pembentukan institusi sosial masyarakat (organisasi). Karena kiai atau orang yang menjadi pendiri sebuah organisasi akan dikenal lebih dahulu. Sehingga citra sebuah organisasi didalam masyarakat juga selalu diaitkan dengan sosok yang ada dibelakangnya.

Lembaga Karyawan Islam (Lemkari) dalam pendirian dan perkembangannya tidak lepas dari sosok Nurhasan Al-Ubaidah sebagai pendiri dan penggerak. Selain Nur Hasan juga ada Nur Hasjim yang dianggap sebagai guru kedua setelah Nur Hasan. Nur Hasjim dengan latar belakangnya sebagai akademisi, mensosialisasikan Lemkari dengan cara ilmiah. Caranya adalah dengan memperkenalkan Lemkari dengan tulisan-tulisan yang dimuat di media kabar dan buku yang diterbitkan.

Kedua orang tersebut memiliki peran dalam pendirian dan pengembangan Lemkari. Nur Hasan sebagai tokoh yang dianggap berjasa dalam pendirian sampai

¹⁵ Sayfa Auliya Achidsti, *Kiai dan Pembangunan Institusi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 29-30.

pada Lemkari didirikan masih menjadi sosok yang dihormati. Meskipun pada saat Lemkari berdiri sebagai organisasi ia mengundurkan diri dari kepemimpinan formal Lemkari. Kendati demikian ia tetap disegani dan diminta untuk memberikan nasihat-nasihat keagamaan. Sedangkan Nur Hasjim adalah orang yang memiliki andil penting dalam pengembangan Lemkari.

1. Nur Hasan Al-ubaidah

Lembaga Karyawan Islam atau (LEMKARI) didirikan oleh Nur Hasan Al Ubaidah Lubis. Nama Aslinya adalah Muhammad Madigol. lahir pada tahun 1908 di Desa Woromarto Purwodadi, Kabupaten Kediri. Anak ketujuh dari pasangan H. Abdul Aziz Bin H, Thohir Bin H. Irsyad. Namanya berubah paska menjalankan ibadah Haji. Haji pertama 1929 namanya dirubah menjadi Nurhasan, haji kedua pada tahun 1933 nama Al-Ubaidah menjadi imbuhan namanya yang pertama menjadi Nurhasan Al-Ubaidah dan nama Lubis sebagai nama terakhir merupakan gelar yang diberikan murid-muridnya. Lubis berarti Luar Biasa.¹⁶

Gambar 1

Foto pendiri Lembaga Karyawan Islam (Lemkari) K.H Nur Hasan Al-Ubaidah



Sumber: *Tempo*, 26 November 1988. hlm. 32

¹⁶ LPPI, *Bahaya Islam Jamaah Lemkari LDII* (Jakarta: LPPI, 1998), hlm. 6.

Semasa kecil ia tinggal bersama kedua orang tuanya. Paska menikah beliau tinggal di rumah mertuanya bersama istri di Mojoduwur Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang selama dua tahun. Pada tahun 1950 pindah ke Kediri dengan menyewa rumah bersama istrinya di perbatasan Desa Burengan dan Banjaran, kotamadya Kediri. Rumah sewaan tersebut kemudian dibangun oleh pemiliknya dan ia pindah dengan menyewa rumah Bapak K. H. Ghozali di Banjaran Kediri.

Nurhasan Al-Ubaidah Lubis merupakan lulusan dari Sekolah Rakyat (SR) III. Sejak dini ia ditanamkan ilmu agama oleh orangtuanya. Ia di SR hanya sampai kelas 3 SD.¹⁷ Selepas menempuh Sekolah Rakyat ia kemudian melanjutkan pendidikan yang fokus pada agama yakni Pondok Pesantren (Ponpes) di Balongjeruk Plemahan, Pondok Semelo, Jombang, Pondok Jamsaren, Solo, Pondok Kauman Sampang, Madura dan Madrasah Darul Hadist di Mekkah.¹⁸ Pesantren pertama yang ia kunjungi adalah Pondok Sawelo, Nganjuk lalu pindah ke Pondok Jamsaren. Ia disana menempuh pendidikan selama tujuh bulan keterangan K.H Ali Darokah dalam muatan artikel Tempo yang berjudul *Kisah Madigol*. Juga disebutkan keterangan Kyai Haris Haidaroh yang menyatakan bahwa ia juga pernah menempuh pendidikan agama di Dresmo Surabaya. Ia juga pernah belajar di Sampang Madura oleh Kiyai Al-Ubaidah dari Batuampar.¹⁹ Nurhasan juga pernah menjadi santri di Lirboyo Kediri dan Tebuireng Jombang.

¹⁷ MUI, Surat Pernyataan MUI dan Ormas Jatim, 6 April, hlm. 4.

¹⁸ Surat MUI (Surabaya, 06 April 1989, hlm. 3)

¹⁹ Tempo 15 September 1979, Kisah Muhammad Madigol, hlm. 50

Nurhasan berangkat haji pertama pada 1929. Kembali menjalankan ibadah Haji pada tahun 1933. Keberangkatan Nurhasan yang kedua dilakukan dari Sampang, Madura menuju ke Jeddah. Sesampai disana ia kerumah kakanya yang bernama H. Mahfudz di Rubbat Nasyabandi di Mekah.²⁰ Selain melakukan ibadah Haji, Nurhasan juga menimba ilmu di Mekah. Ia mempelajari hadist Bukhari dan muslim kepada Syeikh Abu Umar Hamdan dari Maroko dan belajar di Madrasah Darul Hadist yang letaknya tidak jauh di Masjidil Haram.²¹

Sepulang dari Haji yang kedua yakni pada tahun 1940 ia menikah dengan seorang gadis yang berasal dari Desa Mojowarno, Jombang yang bernama Suntikah. Dari hasil pernikahannay ia dianugerahi enam anak. Adapun nama-nama anak mereka adalah Abdul Dhohir (H. Suwaih), Abdul Aziz (H. Sulthon), Abdus Salam (H. Salam Al-Basyah), Sumai Da'u (Hj. Nurlaila), Muhammada Dawud (H. Syamah), dan Abdullah Syakar. Selain menikah dengan Suntikah, ia juga menikah dengan Sukarni dari Solo, Fatimah dari Solo dan Iffah dari Mojokerto. Pernikahan yang dilakukan lebih dari satu ini kemudian menjadi sorotan publik tidak terkecuali media.

Pada tahun 1941 Nurhasan memulai menyebarkan ajaran Lembaga Karyawan Islam. Persebaran dilakukan disekitar lingkungan keluarga dan masyarakat disekitar lingkungannya. Dalam sebuah kelompok atau perkumpulan perlu ditetapkan ketua. Sehingga pada bulan Desember 1941, Nurhasan dipilih dan ditetapkan oleh pengikutnya untuk menjadi Imam atau pemimpin dengan bai'at. Bai'at adalah pengikraran janji seseorang untuk sebuah komitmen yang

²⁰ Surat MUI, *op. cit.*, hlm. 4

²¹ Tempo, *log. cit.*

disaksikan oleh beberapa orang. Orang yang menyaksikan bai'at dari keimaman Nurhasan diantaranya adalah Almarhum Bapak Sabar dari Dukuh, Bangi, Kediri, Almarhum Bapak Abdul Rasyid dari Dukuh Bangi, Kediri, H. Sanusi dari Dukuh Bangi, Kediri, H. Abdul Salam dari woromarto, Kediri, H. Nur Asnawi dari Desa Balongjeruk, Kediri, H. Ahmad dari Burengan, Kediri.²²

Motifnya dalam mendirikan Lemkari adalah karena belum ada keamiran di Indonesia, pandangan para tokoh Lemkari bahwa ajaran Islam yang ada di Indonesia telah menyimpang dari khittah Islam yang memurnikan ajaran Islam tanpa ada intervensi dari pihak manapun termasuk pemerintah dan urusan politik, dan keinginan Nurhasan sebagai pendiri untuk menyebarluaskan ajaran-ajaran Lemkari kepada masyarakat. Adapun tujuan pokok yang akan dicapai adalah mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk mengikuti agama Islam yang murni dan benar yakni dengan beramir, bertaubat kepada allah dan berjamaah atau bergabung dengan Lemkari. Mengajak umat Islam Indonesia berpegang teguh kepada ajaran Islam yang khak yakni berpedoman kepada Al-quran dan Al-Hadist. Mengharapkan surga dan takut kepada api neraka, karena itu merupakan salah satu perintah allah.

Dari latar belakang kehidupan pendidikan sampai motif dan tujuan pendirian Lemkari tidak lepas dari alur kehidupan Nur Hasan. Pemikiran-pemikiran Nur Hasan serta motivnya dalam mendirikan Lemkari dipengaruhi oleh latar belakang kehidupannya. Riwayatnya sebagai santri diberbagai Pondok Pesantren membawanya untuk mencari khittah agama Islam. Jika dilihat dari

²² Surat Pernyataan MUI Jawa Timur, hlm.

sejarah perkembangan Islam di Indonesia, peran Islam sangat mempengaruhi keadaan negara. Aspek politik juga turut mewarnai perkembangan Islam. Misalnya peran Islam yang digambarkan oleh Masyumi dan kelompok Islam yang menggabungkan diri dengan partai politik.²³

Gambaran-gambaran tersebut membuat Nur Hasan mencari Khittah Islam dengan melakukan belajar Islam diberbagai tempat. Selain di dalam Indonesia juga di Mekah yang notabennya merupakan pusat Islam di dunia. Cita-cita Nur Hasan yang mengembalikan Islam ke Khittahnya membawanya pada usaha untuk mendirikan perkumpulan-perkumpula. yang mengamalkan ajaran-ajaran Islam sesungguhnya. Salah satu kiblatnya adalah di Mekah. Membuat sistem keamiran yang berfokus pada perkumpulan Islamnya, membuat komitmen dan janji dengan baiat, dan berjuang dan selalu bersama atau Jamaah. Ajaran-ajaran yang ia bawa dan sampaikan kepada masyarakat adalah bentuk ketidakpuasan Nur Hasan terhadap lembaga keagamaan Islam yang sudah mapan. Kemandirian lembaga Islam yang fokus terhadap Islam tidak ia dapatkan dalam lembaga-lembaga Islam yang telah mapan. Sehingga dalam menyikapi ini, Nur Hasan menyebarkan dan membuat perkumpulan Islam Jamaah dan nama-nama yang selalu terkait.

Namun usahanya dalam mewujudkan cita-citanya mendapatkan berbagai kendala. Mulai dari protes masyarakat sampai larangan dari pemerintah. Hal ini kemudian membawanya untuk mengundurkan diri dari kepemimpinan formal Islam Jamaah pada tahun 1972. Secara formal ia bukan pemimpin, namun ia tetap

²³ Sri Utaria, *Tipologi Politik Partai Islam di Indonesia Kontestan Pemilu 2004* (Yogyakarta: Jurusan Siyasah UIN Sunan Kalijaga, 2008) hlm, 29.

dianggap sebagai pendiri dan guru yang dimintai nasihat. Beliau kemudian meninggal pada 13 Maret 1982, meninggal karena kecelakaan di Cirebon.²⁴

2. Nurhasjim

Nurhasjim datang sebagai pembantu Imam yakni Nur Hasan.²⁵ Merupakan alumni dan mantan dosen Bahasa Arab IAIN dan Pendidikan Tinggi Dakwah Islam (PTDI) Ia juga merupakan orang kedua yang dihormati dan dianggap sebagai guru. Ia turut berperan dalam mengangkat citra Islam Jamaah menjadi gerakan kelas menengah yang sejajar dengan kelompok agama lain.²⁶ Peran tersebut juga ia implementasikan dengan menerbitkan dua buku tentang pokok ajaran Islam Jamaah. Diantaranya adalah *Tujuh Fakta Sebagai Syahnya Kepemimpinan Jamaah di Indonesia* dan *Menunda Baiat Merugikan Diri Sendiri*.

Dalam mengenalkan ajaran Islam Jamaah, ia memiliki gaya sendiri yang berbeda dengan Nur Hasan. Salah satunya adalah dengan membuat karya tulis yang dipublikasikan. Tulisan-tulisannya mampu mempercepat penyebaran Islam Jamaah kalangan akademisi dan intelektual.²⁷ Selain itu Nur Hasjim juga membuat tulisan-tulisan yang dimuat di media kabar. Salah satu contoh artikel yang dimuat di media surat kabar adalah :

²⁴ *Tempo*, 26 November 1988, Islam Jamaah, Setelah Katanya Meresahkan, hlm. 30.

²⁵ Islam Gaja Baru, *Tempo*, 03 Djuli 1971, hlm. 41

²⁶ Hilmi Muhammadiyah, *LDII: Pasang Surut Relasi Agama dan Negara*, hlm. 126.

²⁷ *ibid*, hlm. 126.

Gambar 2

Foto Drs. Nur Hasjim

Sumber: *Tempo*, 03 Juli 1971, hlm. 41

“Saudara kami undang ke Kediri”, katanja kepada sang tamu. “Saudara bukannya harus bersudjud atau mentjium tangan Bapak Ubaidah disana, tapi saudara bisa berdiskusi. (Tempo, 03 Djuli 1971).

Gambar diatas merupakan foto Nurhasjim ketika tulisannya yang berisi klarifikasi tentang Islam Jamaah dimuat di majalah Tempo. Klarifikasi diatas merupakan upaya Nur Hasjim dalam mengkomunikasikan keadaan Islam Jamaah kepada publik. Bahwa siapa saja yang menjadi tamu di Kediri tidak harus mencium atau tunduk sepenuhnya kepada pemimpin Islam Jamaah yakni Nur Hasan. Islam Jamaah dalam hal ini mencoba untuk membuka diri kepada masyarakat. Mereka hendak mensosialisasikan alirannya dengan menempuh jalan diskusi, bertatap muka secara langsung.²⁸

Sikap Nurhasjim tersebut ditujukan kepada orang-orang yang menganggap bahwa Nur Hasan adalah pemimpin semua Islam yang ada di Indonesia. Maksud

²⁸ Tempo, 3 Djuli 1971.

dari Imam adalah pemimpin untuk Lembaga Karyawan Islam. Karena bagaimanapun dalam struktur organisasi terdapat ketua dalam sebuah organisasi. Imam yang dibaiat dan disaksikan oleh banyak umat juga dikarenakan ilmu Nur Hasan yang dianggap lebih banyak dari lainnya. Untuk menghormati tersebut, maka anggota dan pengurus Lemkari menghendaki Nur Hasan sebagai pemimpin dengan metode bai'at. Menurut Hasjim, Nur Hasan dipercaya mengajarkan ajaran keagamaan di Lemkari karena Nur Hasan memiliki ilmu lebih dari yang lain. Ia juga memiliki Ijazah yang menyatakan dia lulus untuk mengajarkan ilmu kepada orang lain.

Nur Hasjim turut berperan dalam menyempurnakan sistem keamiran. Sistem keamiran oleh Nur Hasjim disistematisasikan dengan norma-norma keamiran, diantaranya adalah: *pertama*, keamiran bukanlah tandingan dari keamiran yang sah atau keamiran yang telah terbentuk. *Kedua*, keamiran dianggap sah apabila tidak bersangkutan dengan negara dan lembaga-lembaga organisasi. *Ketiga*, keimanan atau keamiran yang harus lurus setelah mendapatkan ujian dan percobaan.²⁹ Menurut pemikiran Nur Hasjim Keamiran atau keimanan dikatakan sah apabila tidak berkaitan dengan negara dan lembaga-lembaga organisasi seperti politik dan sebagainya.

C. Lembaga Karyawan Islam (LEMKARI) Jawa Timur

Lembaga Karyawan Islam (Lemkari) merupakan lembaga yang menampung mantan anggota Islam Jamaah atau sejenisnya di wilayah Jawa Timur. Lembaga

²⁹ Amin Haedari dan Titik Suwaryati, *Lembaga Karyawan Islam (LEMKARI) Laporan Studi Kasus Keagamaan* (Washington DC: Library Of Congress Photo Duplication Service, 1992), hlm. 17-18.

semacam ini juga ada didaerah lain namun menggunakan nama yang berbeda. Misalnya di Jawa Tengah adalah Yayasan Karyawan Islam (YAKARI), Jawa Barat dikenal dengan Lembaga Karyawan Dakwah Islam (LKDI), sedangkan di Jakarta adalah Karyawan Dakwan Islam (KADIM).³⁰ Pendirian Lemkari di Jawa Timur merupakan hasil dari petunjuk dan arahan dari berbagai pihak termasuk Pangdam VIII Brawijaya, Bpk. Mayjen Wijoyo Suyono.³¹ Gagasan pendirian Lemkari di Jawa Timur juga berasal dari murid Nur Hasan diantaranya adalah Nur Hasjim, R. Eddi Masiadi, Bahroni Hartanto, Soetjowirjoatmodjo, dan Wijono. Mereka menggagas Lemkari sebagai usaha menggiatkan aktivitas pengajian secara terbuka kepada masyarakat.³² Usaha tersebut merupakan upaya pengurus Lemkari agar kegiatan dan keberadaannya dapat diterima oleh masyarakat.

Pendirian Lemkari merupakan hasil dialog antara Nur Hasan dengan Kejaksaan Agung RI. Paska Kejaksaan Agung RI mengeluarkan surat larangan kepada Islam Jamaah, Nur Hasan menghadap ke Kejaksaan Agung RI untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan terhadap kesalah pahaman dan isu yang berkembang di masyarakat. Dalam diskusi tersebut Kejaksaan Agung RI memberikan saran kepada Nur Hasan untuk membuat wadah yang menampung dan memberikaan pembinaan terhadap anggota mantan Islam Jamaah. Selain itu Nur Hasan yang sudah dikenal sebagai pendiri Islam Jamaah harus mengundurkan

³⁰ Habib Setiawan, dkk., *After New Paradigm: Catatan Para Ulama Tentang LDII* (Depok: Pusat Studi Islam Madani Institut) hlm. 3.

³¹ *Hikayat Singkat Pondok Lemkari Burengan Banjaran Kediri*, 2 September 1986.

³² Hilmi Muhammadiyah, *LDII, Pasang Surut Relasi Agama dan Negara* (Depok: Elsas, 2013), hlm. 128.

diri dari kepemimpinan formal.³³ Agar masyarakat tidak kembali beranggapan bahwa ajaran-ajaran Nur Hasan yang diklaim sebagai ajaran sesat kembali diberikan kepada masyarakat, khususnya pengikut atau anggota. Adapun pembinaan yang dilakukan kepada mantan anggota Islam Jamaah adalah melepaskan doktrin ajarannya³⁴ dan menyesuaikan ajarannya dengan ajaran agama Islam yang lainnya. Doktrin ajaran yang dilepaskan adalah sistem keamiran, baiat, dan sanad. Hal tersebut untuk menghindari gejolak di masyarakat, khususnya pengamat agama dan tokoh-tokoh agama Islam.

Paska pertemuan dan persiapan untuk membentuk lembaga dilakukan, peresmian pendirian Lemkari kemudian dilakukan pada 3 Januari 1972, berpusat di Kediri. Pengembangan Lemkari terus digerakkan, salah satunya adalah dengan mengadakan reuni anggota Pondok Pesantren Burengan Kediri pada tanggal 9-10 Februari 1975. Agenda yang dihasilkan dari reuni tersebut adalah mempertimbangkan saran yang diberikan oleh ketua umum DPP Golkar yakni Amir Murtono S.H. Adapun saran yang beliau berikan adalah menyamakan nama lembaga-lembaga yang sama diberbagai daerah dengan nama LEMKARI Agar lembaga atau yayasan tersebut seragam dan tertib dalam keorganisasian.

Pendirian Lemkari ini menjadi awal pemisahan dengan Islam Jamaah. Meskipun latar belakang pendiriannya tidak lepas dari Islam Jamaah, namun

³³ Mirzani Anwar, Dampak Sosial Dari Pengembangan Pemikiran dan Pemahaman Keagamaan di Indonesia (Studi Kasus Kelompok Islam Jamaah di Pndok Pesantren Lemkari, Kediri Jawa Timur) (Jakarta: Departemen Agama RI, 1986), hlm. 8.

³⁴ Doktrin ajaran Islam Jamaah adalah salah satu penyebab Islam Jamaah menjadi kontroversi di kalangan masyarakat, khususnya pada kalangan tokoh-tokoh masyarakat yang berbasis Islam. Adapun ajaran-ajaran tersebut adalah keamiran, baiat, dan tidak memonopoli kebenaran bahwa jamaah Islam Jamaah yang paling benar.

Lemkari tetap mencoba memberikan pembinaan pengajaran keagamaan Islam yang sesuai dengan ajaran Islam pada umumnya. Sebagai lembaga yang terorganisir, Lemkari dipimpin oleh seorang ketua, sedangkan Islam Jamaah sebagai aliran dipimpin oleh seorang pemimpin.

Pengembangan Lemkari selain dari segi ajaran, dari segi organisasi juga dilakukan. Paska mengadakan reuni, Lemkari Jawa Timur mengadakan Musyawarah Kerja (MUKER) di Kediri pada 2-3 Februari 1976. Muker ini dilakukan sebagai wujud kelanjutan dari hasil kesepakatan peserta reuni Pondok Pesantren Burengan Kediri. Adapun hasil Muker yang dilaksanakan membentuk garis organisasi secara vertikal yakni dari pusat sampai ke cabang atau kelompok belajar seperti; tingkat pusat bernama Direktorium Pusat Lemkari, tingkat propinsi bernama perwakilan Lemkari Tk. I Propinsi, tingkat II bernama senat Lemkari Kabupaten atau Kodya, tingkat Kecamatan bernama Komisaris Lemkari Kecamatan, dan tingkat desa bernama *Study Grup* Lemkari atau kelompok belajar.³⁵

Lemkari di Jawa Timur dari tahun 1972-1980 berpusat di Kediri. Di Jawa Timur sendiri terdapat dua Pondok Pesantren yang dijadikan sebagai pusat pembinaan dan pengajaran anggotanya. Pondok Pesantren di dua daerah ini dilakukan untuk memberikan pembinaan dan pengajaran kepada anggotanya. Pondok Pesantren tersebut adalah di daerah Burengan Kediri dan Gadingmangu Jombang Jawa Timur.³⁶

³⁵ *ibid.*

³⁶ Pusat pengkaderan ini adalah Pondok Pesantren Lemkari. Digunakan sebagai tempat untuk menambah ilmu dan memperdalam keagamaan.

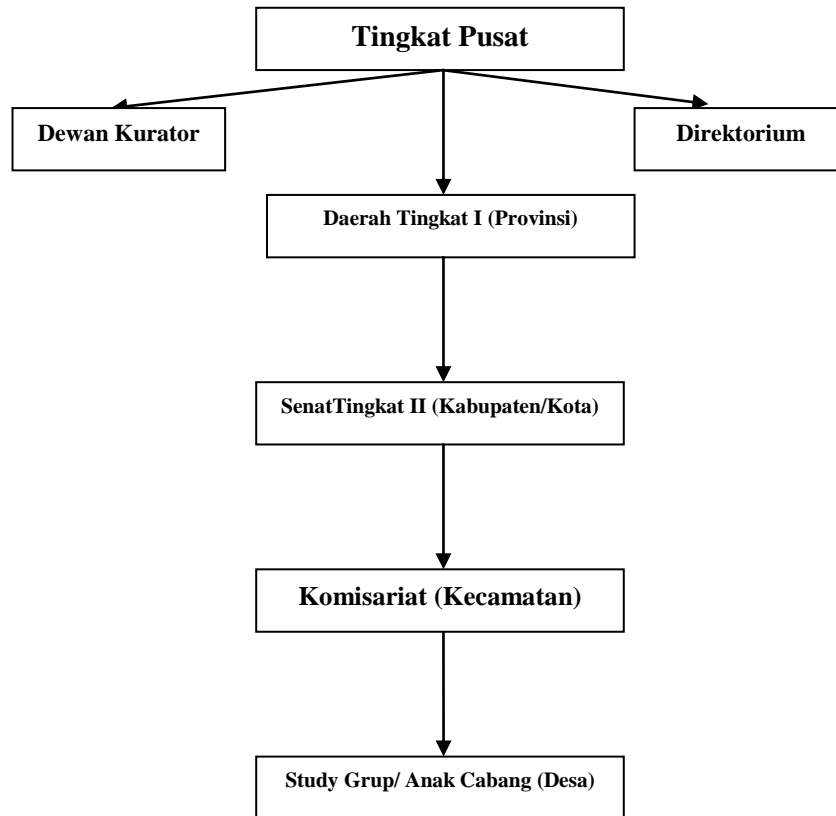
Pada tahun 1972-1981 kepemimpinan Lemkari dipegang oleh Bachroni Ahrtanto. Sedangkan pada tahun 1981-1985 kepemimpinan dipegang oleh Edi Marsiadi. Kepemimpinan tersebut berakhir pada tahun 1986 dan digantikan oleh Drs. H. A. Suarno. Sejak ditetapkannya Hasil Musyawarah Besar (MUBES) pada 10-12 Juni tahun 1981, Lemkari Propinsi Jawa Timur merupakan perwakilan di daerah tingkat I (Propinsi). Peran dan status Lemkari di Jawa Timur setelah ditetapkan keputusan tersebut adalah sebagai dewan perwakilan daerah tingkat I. Susunan kepengurusan pada tingkat I terdiri dari Ketua, wakil-wakil ketua, sekretaris, wakil-wakil sekretaris, bendahara, wakil-wakil bendahara, dan ketua-ketua biro.³⁷ Perubahan tersebut kemudian diikuti dengan amandemen pada Anggaran Rumah Tangga Lemkari pada tahun 1986, adapun perubahannya adalah sebagai berikut:

1. Struktur Organisasi

Dalam sebuah organisasi terdapat susunan pengurus yang jelas dan sistematis. Jalannya sebuah organisasi didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang terstruktur. Agar organisasi tersebut dapat berjalan dengan seimbang dan lancar. Dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Lemkari struktur kepengurusan Lemkari pada tahun adalah sebagai berikut:

³⁷ Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Lemkari tahun 1986 amandemen.

Gambar 3

Bagan Struktur Kepengurusan Lemkari

Sumber: Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Lembaga Karyawan Islam tahun 1986.

Dari bagan struktur kepengurusan Lemkari diatas dapat dilihat bahwa pada tingkat pusat Lemkari terdiri dari Dewan Kurator dan Direktorium. Dewan Kurator terdiri dari lima orang. Mereka bertugas untuk memberikan bimbingan dan pembinaan kepada direktorium dalam melaksanakan kegiatannya, sesuai dengan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Lembaga Karyawan Islam.³⁸ Sedangkan Direktorium Pusat terdiri dari ketua umum, ketua-ketua, sekretaris jenderal, wakil-wakil sekretaris, bendahara umum, dan ketua-ketua bidang. Pada tahun 1972-1981 Direktorium Pusat dan Direktorium berada di Kediri Jawa

³⁸ Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Lemkari tahun 1986

Timur. Karena Lemkari pada waktu itu merupakan lembaga yang mewadahi mantan anggota Islam Jamaah atau aliran sejenisnya di Jawa Timur. Namun setelah Mubes dilaksanakan pada tahun 1981, kedudukan Jawa Timur menjadi perwakilan daerah tingkat I Provinsi Jawa Timur. Sedangkan pusat dipindah alihkan ke Jakarta yakni Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Susunan perwakilan di daerah tingkat I (Propinsi) adalah Ketua, wakil-wakil ketua, sekretaris, wakil-wakil sekretaris, bendahara, wakil-wakil bendahara, dan ketua-ketua biro. Susunan senat daerah tingkat II adalah ketua, wakil-wakil ketua, sekretaris, wakil-wakil sekretaris, bendahara, wakil-wakil bendahara, dan ketua-ketua bagian. Susunan komisariat di tingkat kecamatan adalah ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara, ketua-ketua seksi. Susuna Study Grup (anak cabang) di tingkat kelurahan atau desa adalah ketua, wakil ketua, sekreteraris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara, dan kepala-kepala urusan.

2. Wewenang Pengurus Lemkari

Wewenang dari Dewan kurator adalah memberikan bimbingan dan pembinaan kepada direktorium dalam melaksanakan kegiatannya..³⁹ Perwakilan di daerah Tingkat I (Propinsi) berwenang untuk menentukan kebijaksanaan dan berkewajiban melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan. Daerah tingkat I sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan musyawarah tingkat I dan menjalankan kebijaksanaan umum

³⁹ Nama Lembaga Karyawan Dakwah Islam (LEMKARI) merupakan perubahan dari Lembaga Karyawan Islam yang merupakan hasil dari Musyawarah Besar Lemkari pada MUBES tahun 1986.

Perwakilan Daerah Tingkat I. Perwakilan daerah tingkat I berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kepada musyawarah daerah tingkat I.

Dibawah daerah tingkat I adalah Senat Daerah tingkat II. Senat Daerah tingkat II berwenang untuk menentukan kebijaksanaan dan berkewajiban melaksanakan segala ketentuan dan kewajiban di daerah tingkat II sesuai dengan AD/ART, keputusan-keputusan musyawarah besar, musyawarah besar luar biasa, keputusan-keputusan atau peraturan-peraturan organisasi tingkat pusat dan daerah tingkat I, keputusan musyawarah daerah tingkat I dan II. Dalam menjalankan kebijaksanaan umum senat daerah tingkat II merupakan badan pelaksana yang bersifat kolektif. Senat daerah tingkat II berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban pada musyawarah tingkat II. Komisaris tingkat Kecamatan berwenang untuk menentukan kebijaksanaan dan berkewajiban melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan di komisariat sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan atau peraturan-peraturan organisasi tingkat pusat, daerah tingkat I, daerah tingkat II dan komisariat.⁴⁰

Dalam menjalankan kebijaksanaan umum pimpinan komisariat merupakan badan pelaksana yang bersifat kolektif. Pimpinan komisariat berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban pada musyawarah komisariat. Rapat pimpinan Study Grup berwenang untuk menentukan kebijaksanaan dan berkewajiban melaksanakan segala ketentuan dan Study Grup sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan, musyawarah besar, musyawarah luar biasa, keputusan-keputusan atau peraturan-peraturan organisasi

⁴⁰ AD/ART Lemkari tahun 1986

tingkat pusat, daerah tingkat I, daerah tingkat II, komisariat, dan pimpinan Study Grup. Kebijakan pimpinan Study Grup bersifat kolektif. Pimpinan Study Grup berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban pada rapat anggota Study Grup.

3. Rekrutmen Pengurus Lemkari

Dalam struktur kepengurusan juga terdapat pola rekrutmen. Pengisian lowongan antar satu personalia Direktorium Pusat dilakukan oleh Direktorium Pusat berkonsultasi dengan Dewan Kurator dan kemudian dilaporkan Direktorat Pimpinan dalam waktu terdekat. Pengisian lowongan antar satu personalia Pimpinan Komisariat dan pimpinan Study Grup dilakukan masing-masing oleh Senat di Tingkat II dan komisariat yang bersangkutan atas usul Pimpinan Komisariat dan Pimpinan Study Grup yang bersangkutan. Peserta Musyawarah dan rapat-rapat terbagi kedalam beberapa forum diantaranya adalah Musyawarah Besar yang dihadiri oleh Dewan Kurator, Direktorium Pusat, Perwakilan Daerah Tingkat I, Senat Daerah Tingkat I.⁴¹

4. Keanggotaan dan Pengkaderan

Sifat keanggotaan Lemkari bersifat tidak mengikat dan terbuka untuk setiap Warga Negara Indonesia. Anggota eks. atau mantan anggota Islam Jamaah merupakan salah satu unsur anggota Lemkari. Hal ini merupakan hasil aspirasi dari anggota mantan Islam Jamaah. Tidak ada persyaratan tertentu. Cukup

⁴¹ AD/ART LEMKARI tahun 1986.

mengikuti pengajian atau kegiatan-kegiatan Lemkari, baik kegiatan keagamaan maupun kegiatan sosial lainnya.

Pada tahun 1972-1981 pengkaderan dilakukan di dua tempat. Pertama adalah pengkaderan yang dilakukan di pondok pesantren. Pengkaderan ini dilaksanakan secara berkala. Kegiatannya adalah mengadakan pengajian bersama di empat daerah pondok Lemkari. Diantaranya adalah di Kediri, Gadingmangu, Perak Jombang, dan di Kebon Jeruk Jakarta Barat. Hasil pengajian di empat daerah akan di transfer ke daerah-daerah melalui kegiatan pengajian yang diadakan di daerah. Kegiatan ini disebut sebagai pengajian sambung dari pusat kedaerah-daerah. Pusat yang dimaksud dalam Anggaran Dasardan Anggaran Rumah Tangga adalah ke empat daerah tersebut.

Pengkaderan di tingkat senat dilakukan dengan kegiatan pengajian secara rutin. Pengkaderan ditingkat senat, hanya dipersiapkan di wilayah tertentu saja (regional). Jika ada anggota yang berkeinginan untuk memperdalam ilmunya, mereka akan memilih dan disarankan untuk memperdalam ilmu di pondok-pondok pesantren Lemkari.

Dalam hal ubuliyah, terdapat karakteristik yang dilakukan oleh anggota Lemkari. Khotbah Jumat dalam Bahasa Arab semua, tetapi hal ini tidak hanya dilakukan oleh Lemkari. Ada beberapa organisasi keagamaan Islam lainnya yang melakukan hal demikian. Untuk karakter yang lebih spesifiknya tidak ada. Ada beberapa sebutan yang menjadi ciri khas dari dan untuk Lemkari diantaranya adalah, anggota Lemkari disebut Jamaah⁴², untuk ceramah mereka menggunakan

⁴²Jamaah adalah semua anggota yang tergabung dalam keanggotaan Lemkari.

istilah nasehat). Adapun yang menjadi motivasi mereka adalah pengajian yang dikemas secara menarik yakni dengan kegiatan manqul Al-Quran dan Al-Khadist dan Nasehat. Kekeluargaan yang mereka junjung sebagai rasa kebersamaan. Hal ini terbukti dari kegiatan mereka yakni dengan memberlakukan sistem *trobos*⁴³.

Dalam mencapai tujuannya Lemkari menjalankan usahanya kedalam bidang-bidang. Pada bidang keagamaan, mengusahakan peningkatan pendidikan agama dan mewujudkan toleransi beragama di pondok-pondok, masjid-masjid, dan masyarakat. Menyelenggarakan pengajian di pondok-pondok, masjid, masyarakat, dan lingkungan keluarga yang menghendakinya. Mengadakan ceramah-ceramah keagamaan yang berlandaskan Al-quran dan Hadist. Mendirikan perpustakaan untuk memperdalam mutu pengetahuan. Mendidik gurur-guru agama dalam usaha memperluas pengajaran agama.

Pada bidang pendidikan atau partisipasi kemasyarakatan, mengusahakan peningkatan pengetahuan umum bagi masyarakat luas. Menyelenggarakan pelajaran-pelajaran pengetahuan umum di pondok-pondok. Meyelenggarakan pelajaran-pelajaran kejuruan yang berhubungan dengan pembangunan masyarakat. Mengadakan pelatihan-pelatihan kerja dalam bidang pengembangan kemasyarakatan.⁴⁴

⁴³ *Trobos* merupakan aktivitas yang dilakukan pengurus atau orang yang diamanahi untuk pergi ke rumah anggota yang tidak aktif atau jarang aktif. *Trobos* juga bisa didefinisikan sebagai silaturahmi pengurus kepada anggota untuk menanyakan kepada anggota yang jarang atau tidak aktif tersebut atas faktor yang menyebabkan anggota tersebut tidak aktif.

⁴⁴ AD/ART Lemkari tahun 1986.

BAB III

DINAMIKA LEMBAGA KARYAWAN ISLAM (LEMKARI) JAWA TIMUR 1972-1989

A. Peran dan Kegiatan LEMKARI Jawa Timur

Lembaga Karyawan Islam sebagai lembaga yang bertanggungjawab menjaga dan memperbaiki mantan anggota Islam Jamaah serta berkewajiban memberikan pengawasan dan pembinaan. Program-program disusun dan diimplemetasikan agar Lemkari mendapat kepercayaan masyarakat dan pemerintah, serta dapat melanjutkan kegiatan dakwahnya di masyarakat. Pada tahun 1972 pusat Lemkari Jawa Timur adalah di Kediri, tepatnya di Pondok Pesantren Burengan Kediri. Paska Nur Hasan mengundurkan diri dari kepemimpinan formal kepengurusan Islam Jamaah, kedudukannya digantikan oleh Bachroni Hartanto. Bachroni Hartanto memimpin Lemkari bersama sekretaris umumnya Wijoyo B.A sejak tahun 1972-1981.¹

Dalam kepemimpinannya banyak perubahan dan pengembangan yang dilakukan untuk memberikan pembinaan dan pengajaran kepada anggota Lemkari dan mantan anggota Lemkari Jawa Timur. Selain di Kediri di Gadingmangu Jombang juga menjadi pusat pendidikan untuk memberikan pembinaan dan pengajaran. Struktur organisasi yang diterapkan oleh Lemkari dibuat seperti lembaga pendidikan, adapun strukturnya adalah dari Direktorium Pusat, sampai

¹ Khumaidah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, *Skripsi Sejarah Peradaban Islam* (Surabaya: Fakultas Adab Institus Agama Islam Negeri, 2006), hlm. 16.

pada tingkat anak cabang.² Karena tujuan dari dibentuknya Lemkari adalah untuk memberikan pembinaan dan pengawasan kepada anggotanya dan mantan anggota Islam Jamaah atau aliran sejenisnya.

Pondok Pesantren Lemkari di Burengan Kediri Jawa Timur merupakan pesantren induk. Menjadi pusat kegiatan dakwah serta tempat mengaji para santri tingkat dasar. Bentuk pengkaderan yang diberikan berupa pendidikan keagamaan dan pendidikan umum. Adapun gambaran proses pengkaderan Lemkari dapat dilihat dibawah ini (gambar 4).

Gambar 4
Ruang Belajar Pondok Burengan Kediri



Sumber: Tempo. 15 September 1979. hlm. 52

Gambar diatas menunjukkan kegiatan belajar mengajar di Pondok Pesantren Burengan Kediri Jawa Timur pada tahun 1979.³ Gambar tersebut dimuat dimajalah tempo. Hal ini menunjukkan bahwa Lemkari sudah menunjukkan sikap terbukanya terhadap masyarakat, khususnya kepada media. Salah satu upaya

² Habib Setiawan, After New Paradigm (Jakarta: Obor, 2008) hlm. 50.

³ Tempo, 15 september 1979. hlm. 52

untuk bersikap transparan dan terbuka kepada masyarakat. Dalam gambar tersebut terlihat kegiatan belajar-mengajar kader-kader yang difasilitasi dengan tempat duduk dan meja. Diantara laki-laki dan perempuan terdapat batasan berupa papan. Sedangkan untuk pemateri atau tenaga pengajar menyampaikan paparannya dengan berdiri. Hal tersebut adalah gambaran bagaimana anggota atau kader mendapat pembinaan di Pondok Burengan Kediri.

Kegiatan dari Lemkari di Jawa Timur ada empat macam diantaranya adalah pendidikan keagamaan, pendidikan pembangunan, kegiatan sosial dimasyarakat, pendidikan jasmani serta pembinaan generasi pemuda. Dalam pelaksanaan pendidikan Lemkari membaginya menjadi dua kelembagaan. *Pertama*, pendidikan keagamaan yang dilaksanakan di pondok-pondok pesantren Lemkari yang mengarah pada pusat pengkaderan dan pendidikan para dainya. *Kedua*, Pendidikan keagamaan yang dilaksanakan di masyarakat umum.⁴

Kritik dan desakan dari masyarakat serta Pemerintah membuat Lemkari harus membuat kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan ajaran agama Islam pada umumnya. Ajaran-ajaran yang dianggap sempalan dilarang untuk diberikan. Oleh karena itu dalam kegiatannya Lemkari memberikan pembinaan dan pengajaran pada bidang agama dan sosial. Selain untuk mencetak kader atau anggota yang menguasai bidang keagamaan sebagai bekal berdakwah, juga dibekali ilmu-ilmu sosial. Hal ini untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa selain berpengaruh dalam bidang agama Lemkari juga dapat memberikan gagasan sebagai solusi dari permasalahan masyarakat. Tujuan dari diberikannya ilmu-ilmu sosial juga sebagai

⁴ AD/ART Lemkari 1972.

salah satu bentuk perubahan dan pengembangan kegiatan Lemkari dalam proses pengkaderan. Bahwa peran Lemkari tidak hanya untuk anggotanya saja melainkan juga memiliki peran di masyarakat luas. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut Lemkari dalam hal proses pengkaderan merangkai kurikulum pendidikan agama dan mata pelajaran umum kepada kader atau anggotanya. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1
Berikut ini adalah perincian paket pelajaran untuk tingkatan pendidikan dalam proses pengkaderan Lemkari Jawa Timur:

Paket	Mata Pelajaran	Tk. Dasar	Tk. Lanjutan	Tk. Ahli
Paket Ilmu Agama	Alquran	+	+	+
	Himpunan hadist-hadist	+	+	-
	Hadist shoheh	+	+	-
	Hadist	+	+	-
	Hadist	=	+	+
	Hadist	=	+	+
	Hadist	=	+	+
	Hadist	=	-	+
	Hadist	=	-	+
	Hadist	=	-	+
	Hadist	+	+	+
Paket Pengetahuan Umum	pendidikan moral pancasila	+	+	+
	ilmu pengetahuan sosial	+	+	+
	pembangunan masyarakat desa	+	+	+
	metodologi dakwah	-	+	+
	anthropologi	-	+	+
	capita selecta		+	+
	bahasa indonesia	+	-	+
Pembinaan keterampilan dan kegiatan	pertanian	+	+	+
	peternakan	+	+	+
	perikanan	+	+	+
	industri rumah	+	+	+
	olah raga	+	+	+
	kepramukaan	+	+	+
Keterangan: Dalam pelajaran alquran sudah termasuk ilmu tafsir, terjemahan, pengertian dan bacaan. + (diberikan) - (tidak diberikan)				

Sumber: Amin Haeder dan Titik Suwaryati, Lembaga Karyawan Islam (LEMKARI) Laporan Studi Kasus Keagamaan (bentuk mikrofilm), (Washington D.C.: Library Of Congress Photo Duplication Service: 1992), hlm. 27-28.

Dari tabel diatas dapat dilihat daftar pelajaran yang digunakan untuk mengkader kader-kader Lemkari yang sedang menempuh pendidikan di pusat kegiatan Lemakri yang berada di Jawa Timur. Paket pelajaran yang diajarkan tidak hanya berbasis keagamaan. Pelajaran bidang umum juga diberikan. Hal ini untuk menunjukkan keseriusan Lemkari dalam memberikan bimbingan kepada kader-kadernya, khususnya kepada mantan anggota Lemkari.

Pada bidang keagamaan pelajaran yang diberikan adalah pemahaman Al-quran dan Al-hadist. Dalam pelajaran Al-quran terdiri dari ilmu tafsir, terjemahan, pengertian dan bacaan. Bidang keagamaan ini diberikan sebagai bekal berdakwahnya para santri. Santri yang telah lulus ujian akhir akan dikirim ke berbagai daerah untuk menyebarkan jaaran Islam yang selama ini mereka pelajari. Secara langsung atau tidak penyebaran Lemkari dilakukan dengan metode tersebut. Metodenya adalah dengan mengirim santri atau kader yang lulus ke suatu daerah, baik itu wilayah yang sudah didapati anggota Lemkari maupun belum. Tugas tersebut diberikan selama satu tahun. Namun untuk kader yang menghendaki penambahan masa tugas dapat diperpanjang dan disesuaikan dengan peraturan daerah tugasnya.⁵

Untuk bidang Pengetahuan umum pelajaran yang diberikan terdiri dari pendidikan moral pancasila, Ilmu Pengetahuan Sosial, Pembangunan Masyarakat Desa, Metodologi dakwah, antropologi, capita selecta, dan Bahasa Indonesia. Ilmu Pengetahuan Umum diberikan sebagai bekal kader dalam menghadapi masyarakat ketika bertugas. Sehingga dalam kompetisi kehidupan bermasyarakat

⁵ Wawancara dengan H. Juni dikediamannya, 6 Januari 2015.

kader Lemkari tidak tertinggal jauh dari lainnya. Sehingga ilmu-ilmu yang diberikan pada pendidikan formal juga diberikan oleh Lemkari kepada para kadernya.

Bidang pembinaan dan kegiatan juga diberikan diantaranya adalah pertanian, peternakan, perikanan, industri rumah, olahraga, dan kepramukaan. Pelajaran yang diberikan dibagi menjadi tiga tingkat yakni tingkat dasar, tingkat lanjutan dan tingkat ahli.⁶ Bidang-bidang ini diberikan agar kader dapat menghadapi tantangan yang ada di masyarakat. Selain menguasai bidang dakwah dan ilmu pengetahuan umum, *skill* dalam strategi bertahan juga dibutuhkan. Pasalnya dalam kehidupan nyata selain melakukan dakwah, mereka juga memerlukan keahlian sebagai salah satu cara menunjang kehidupan mereka secara finansial. Oleh karena itu selama menempuh program pembinaan dan pengajaran mereka dibekali berbagai keahlian.

Pendistribusian pelaksanaan pendidikan keagamaan Lemkari di Jawa Timur pada skala masyarakat umum adalah mengkoordinir tenaga-tenaga pengajar didaerahnya pada tiap-tiap senat. Memberikan ceramah-ceramah atau penataran bagi senat-senat Lemkari di Jawa Timur. Bahan ceramah Lemkari Jawa Timur didapatkan dari Direktoratium Pusat.⁷

Selain melakukan pengkaderan dalam pendidikan keagamaan dan pengetahuan umum, Lemkari di Jawa Timur juga mendirikan Pusat Pelayanan Pertanian atau *Mixed Farming* pada tahun 1972 Pondok Burengan Kediri.

⁶Marzani Anwar, *Laporan Hasil Penelitian Tentang Dampak Sosial Dari Perkembangan Pemikiran dan Pemahaman Keagamaan di Indonesia 1985-1986* (Jakarta: Departemen Agama, 1986), hlm 45).

⁷ AD/ART Lemkari tahun 1972.

Pelayanan ini didirikan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat terkait pertanian, *Mixed Farming* juga mendapatkan proyek. Adapun proyek tersebut adalah para santri atau pengelola mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah berupa pinjaman empat (4) hektar lahan pertanian. Lahan pertanian yang diberikan oleh pemerintah tersebut untuk dijadikan tanah percontohan, penggarapan, persemaian bibit, pengairan, dan pengobatan tanaman. Respon Pemerintah terhadap Lemkari dari sini dapat dilihat, bahwa pemerintah Kediri bersedia memberikan pinjaman kepada kader Lemkari. Hal tersebut merupakan modal untuk mendapatkan kepercayaan dari pemerintah lainnya. Selain pemerintah, kepercayaan masyarakat juga perlu untuk membuktikan bahwa Lemkari dapat berjalan sesuai dengan tujuan awalnya.

Dari program-program tersebut dapat dilihat dampak program pembinaan atau hasilnya kepada prosentase jumlah mantan anggota Lemkari. Adapun hasilnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2
Prediksi perkembangan presentase pola penurunan jumlah eks-Islam Jamaah yang
dibina oleh Lemkari periode tahun 1986-1989

Tahun	Prediksi Jumlah Warga Lemkari	Perkiraan Warga Eks-Islam Jamaah	
		Presentase (%)	Usia
1986	500.000	0,270%	20
1987	598.200	0,226%	21
1988	715.686	0,189%	22
1989	856.247	0,158%	23

Sumber: Habib Setiawan, *After New Paradigm: Catatan Para Ulama Tentang LDII*, (Jakarta: Pusat Studi Islam Madani Institute, 2008) hlm. 169

Tabel diatas merupakan tabel yang menunjukkan prosentase jumlah anggota Lemkari. Data tersebut diambil dari jumlah kader yang terdapat di Jawa Timur.

Data diambil dari tahun 1986-1989 menunjukkan prosentase warga eks Islam Jamaah. Dari tabel diatas dapat dilihat keadaan mantan anggota Islam Jamaah yang setiap tahunnya mengalami penurunan. Kendati demikian prosentase ini belum dapat menunjukkan bahwa program-program Lemkari dalam memberikan pembinaan kepada mantan anggota Lemkari telah berhasil. Pasalnya dikalangan masyarakat pada umumnya dan para tokoh agama Islam khususnya pada tahun-tahun tersebut masih menunjukkan sikap skeptisnya terhadap Lemkari. Hal demikian juga didukung oleh keputusan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada tahun 1988 terkait larangan operasional terhadap pengurus Lemkari tingkat I Provinsi Jawa Timur.

Kegiatan Lemkari di Jawa Timur selalu menjadi sorotan. Selain karena menjadi pusat Lemkari di Jawa Timur juga menjadi pusat pendidikan Lemkari. Oleh karena itu Pondok Burengan Kediri selalu memancing rasa ingin tahu banyak orang untuk mengetahui perkembangan Lemkari secara langsung. Rasa peduli dengan memberikan bantuan juga diterima oleh Lemkari Pondok Burengan Kediri Jawa Timur. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 3

Daftar pejabat negara yang melakukan kunjungan kerja dan memberikan bantuan kepada Lemkari Jawa Timur tahun 1979-1986 adalah antara lain:

No.	Nama	Jabatan	Tahun
1	Bp. Alamsyah	Sekr. Menteri Agama	1979
2	K.H. Tohir Wijaya	-	1983 & 1985
3	-	Kesra Prop. Tk. Jatim	1981
4	-	Pegawai Balai Penelitian Agama Jakarta	1981 & 1982
5	H. Musytari Yusuf	Sekretaris MUI	1981
6	-	Bp. Gubernur Jawa Timur	1978 dan 1983
7	-	Tim Komisi Kesra DPA Jakarta	1983
8	Adam Malik	Bp. Wakil Presiden	1981
9	-	Ustad -2 dari Kuala Lumpur	1979
10	-	Rombongan Kapolwil Kediri tanggal	28 Juli 1986
11	-	Rombongan Kapolda Jatim	2 September 1986

Sumber: Hikayat Singkat Pondok Lemkari Burengan Banjaran Kediri, 2 September 1986.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Lemkari sebagai lembaga yang mewadahi mantan anggota Islam Jamaah, mendapat kunjungan dari beberapa orang termasuk pejabat negara. Tahun 1978 Gubernur Jawa Timur melakukan kunjungan. Pada tahun 1979 Lemkari mendapat kunjungan dari Sekretaris Menteri Agama Bapak Alamsyah dan dua Ustad dari Kuala Lumpur. Kunjungan juga dilakukan oleh Kesra Propinsi tingkat Jawa Timur, pegawai Balai Penelitian Agama Jakarta, sekretaris MUI dan Wakil Presiden Adam Malik pada tahun 1981. Pegawai Balai Penelitian Agama kembali berkunjung pada tahun 1982. Pada tahun 1983 kunjungan dilakukan oleh K.H Tohir Wijaya, tim komisi Kesra DPA Jakarta. K. H Tohir kembali tercatat melakukan kunjungan di tahun 1985. Pada tahun 1986 kunjungan diterima dari rombongan Kapolwil Kediri dan rombongan Kapolda Jatim.

Kunjungan yang dilakukan oleh daftar nama-nama tersebut adalah untuk melakukan kunjungan kerja dan memberikan bantuan kepada Lemkari. Belum ada catatan yang menunjukkan jenis bantuan yang diberikan. Namun kunjungan kerja yang dilakukan oleh beberapa pejabat dan aparat pemerintahan menunjukkan bahwa Lemkari berada didalam pengawasan pemerintahan. Peninjauan secara langsung tidak hanya dilakukan oleh pemerintah wilayah Jawa Timur saja. Pemerintah RI seperti Wakil Presiden dan Sekretaris Menteri Agama juga melakukan kunjungan kerja langsung ke Lemkari, tepatnya di Pondok Pesantren Burengan Kediri. Hal ini disebabkan oleh Jawa Timur, khususnya Kediri merupakan pusat kegiatan organisasi, dakwah sampai pengkaderan Lemkari pada tahun 1972-1980-an.

B. Respon Masyarakat Jawa Timur Terhadap Lemkari di Jawa Timur

Media masa merupakan media untuk memberi informasi kepada masyarakat. Peran media dalam menyebarkan informasi sangat efektif. Sejak tahun 1970-an pemberitaan LEMKARI pada beberapa media masa cukup masif, hampir disetiap media masa terdapat pemberitaan LEMKARI, seperti pada majalah *Tempo*, *Merdeka*, dan *Surabaya Post*. Bahkan terdapat laporan secara eksklusif oleh majalah *Tempo*. Pada majalah *Tempo* terdapat rubrik agama. Rubrik tersebut kemudian pada beberapa masa dipenuhi dengan pemberitaan yang berkaitan dengan LEMKARI.

Pada tahun 1971 LEMKARI menjadi eksis dengan beragam asumsi dari berbagai pihak. Asumsi-asumsi tersebut kemudian dikuatkan diberbagai penerbitan media masa seperti majalah maupun surat kabar. Lemkari selalu menjadi kontroversi karena ajaran-ajarannya yang seringkali dianggap meresahkan masyarakat. Keresahan masyarakat ini kemudian disampaikan kepada Pemerintah. Pemerintah berusaha mengakhiri keresahan masyarakat dengan mengeluarkan putusan yang dilegalkan melalui Surat Keputusan.

Agama tidak dapat dilepaskan dari sebuah komunitas kepercayaan. Begitu pula dengan Islam yang tidak dapat lepas dari variasi komunitas kepercayaan yang menyatakan diri sebagai organisasi atau perkumpulan Islam dengan beragam faham. Sehingga muncul banyak organisasi Islam yang beragam. Seperti Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, Lembaga Karyawan Islam dan sebagainya. Lembaga Karyawan Islam atau Lemkari merupakan salah satu variasi komunitas

kepercayaan berbasis Islam.⁸ Keragaman komunitas yang berbalut agama tidak dapat dibendungkan. Pertahanan untuk mempertahankan eksistensi sebuah komunitas tersebut harus dicapai agar kegiatan dakwahnya dapat diterima dan berkembang di masyarakat.

Lembaga Karyawan Islam (Lemkari) merupakan salah satu organisasi keagamaan yang baru. *Islam Gaja Baru* pada judul artikel yang termuat di Tempo edisi Juli tahun 1971 memperkuat unsur pembaharuan pada organisasi tersebut. Lemkari berdiri diatas lembaga keagamaan yang telah mapan. Kemunculannya pada sekitar tahun 1970-an tidak serta merta diterima oleh masyarakat dan lembaga keagamaan lainnya. Menurut *Troeltsch*, suatu sekte atau komunitas baru muncul sebagai akibat dari konflik batin (ketidak puasan) terhdap prinsip nilai agama dengan lembaga-lembaga masyarakat yang telah mapan.⁹ Dalam hal ini Lemkari muncul sebagai wujud ketidak puasan pendiri dan para anggota Lemkari terhadap lembaga keagamaan yang sudah ada dan mapan sebelum Lemkari terbentuk. Keberadaan Lemkari yang secara tiba-tiba dan tanpa sosialisasi secara terbuka membuat banyak pihak merasa bahwa Lemkari adalah organsiasi keagamaan baru yang eksklusif. Kesempatan ini kemudian dibaca oleh beberapa pihak untuk menggali kelemahan dan mengeksposnya di berbagai media. Hal ini terlihat pada kemunculan ketegangan-ketegangan sosial yang terjadi dimasyarakat. Komunitas agama yang seharusnya membantu Pemerintah mewujudkan stabilitas keamanan dan kedamaian harus terusik karena asumsi

⁸ Hilmi Muhammadiyah, *LDII: Pasang Surut Relasi Agama dan Negara* (Depok:Elsas, 2013), hlm 25.

⁹ Thomas O'dea, *Sosiologi Agama* (Jakarta: Rajawali, 1992), hlm. 10.

beberapa pihak dan lembaga kemasyarakatan yang mengklaim ajaran mereka sebagai ajaran sempalan.

Sejak tahun 1970-an Lemkari tingkat pusat maupun daerah menjadi perbincangan hangat di berbagai media maupun lisan dilingkungan masyarakat. Di Jawa Timur misalnya, muncul banyak spekulasi tentang Lemkari, mulai dari sebagai ajaran sempalan, ajaran yang menyimpang, dan sebagainya.

Siapa kira-kira ketua Agama Islam? pertanyaan ini umumnja dianggap lutju, karena setelah melihat ajaran agama ini orang selalu menjimpulkan: untuk Islam, tidak ada seorang kepala. Sedang gelar-gelar sematjam Imam, seperti juga Kijai, tidak merudjukkan kepada suatu djabatatan rohani. Tapi tidak seperti itu kejakinan kalangan *Islam Djamaah* jang selain disohor-sohorkan sebagai kelompok jang menguasai “kekuatan-kekuatan dalam (Sumber: *Tempo*, 03 Djuli 1971, hlm 41).

Statemen diatas ditujukan Tempo kepada Lemkari terkait ajaran Lemkari yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam pada umumnya. Kata Imam yang dimaksud Tempo adalah pemimpin atau ketua Islam yang dipercaya oleh Lemkari. Pengukuhan ketua Lemkari dilakukan dengan bai'at atau prasetya. Bai'at adalah ikrar atau janji yang diperuntukkan seorang dalam sebuah komitmen. Asumsi ini kemudian menciptakan ketegangan dianatar lembaga kemasyarakatan. Hal ini pula yang menyebabkan Lemkari mendapat serangan dari berbagai pihak seperti lembaga kemasyarakatan dan Pemerintah. Prasetya dalam hal ini didefinisikan sebagai pintu penyerahan kehidupan rohani setiap orang kepada Imam.

Upaya sosialisasi mulai dilakukan secara masif ketika Lemkari melalui Nur Hasan megenal sosok Nur Hasjim, alumni dan mantan dosen di IAIN dan PTDI. Nur Hasjim berusaha meluruskan ajaran Lemkari di depan Lembaga Penelitian

Ilmu Agama dan Kemasyarakatan (LPIAK) yang telah dibentuk oleh IAIN Tjiputat Jakarta. Muljanto selaku ketua LPIAK mengundang Nur Hasjim sebagai narasumber dari perwakilan Lembaga Karyawan Islam (LEMKARI). Nur Hasjim mengemukakan dasar-dasar dan patokan umum yang dipercaya oleh umat muslim secara universal. Pada tengah bagian presentasi, Nur Hasjim sesekali menyebutkan dasar ajaran Lemkari dalam forum tersebut. Menurutnya, pondok yang dibangun di Burengan Kediri merupakan produk pembangunan dari Lemkari yang dibangun secara semangat. Dasar dari pembangunan ini adalah perlunya penyederhanaan definisi Islam. Oleh karena itu masyarakat, khususnya anggota Lemkari perlu untuk diajarkan Al-Quran dan al-hadist sebagai pedoman kehidupan mereka baik individu maupun sosial. Penyederhanaan dilakukan bukan untuk menyederhanakan kandungan Alquran dan Al-hadist, melainkan agar dapat tercapainya pemahaman yang mendasar pada masyarakat, khususnya setiap anggota Lemkari.

Sjahan salah satu anggota LPIAK berpendapat bahwa setiap umat muslim yakni pengurus maupun anggota Lemkari seharusnya bersikap lebih fleksibel dalam menanggapi tuntutan-tuntutan baru dan tidak hanya menjelaskan kalimat-kalimat yang bermakna kosong.¹⁰ Hal ini seperti teori yang dikemukakan oleh Turner bahwa masyarakat yang berada pada masa peralihan akan mengalami krisis, sehingga membutuhkan gerakan penguatan untuk membangkitkan semangat. Gerakan penguat tersebut dibangkitkan untuk membangkitkan emosi keagamaan. Hal tersebut kemudian berdampak pada gerakan organisasi yang

¹⁰ Islam Djamaah: IAIN dan Sesudahnya, *Tempo*, 13 November 1971.

awalnya terkesan biasa-biasa saja berubah menjadi gerakan atas nama agama dan menjadi kekuatan bagi organisasi tersebut.¹¹

Lemkari pada mulanya hanya memfokuskan kegiatannya pada bidang dakwah tanpa ikut campur dengan kehidupan politik dan kenegaraan.¹² Namun dalam perkembangannya tujuan tersebut pudar dan merambah pada kegiatan yang masif. Selain mengadakan kegiatan pokok berupa pengajian, Lemkari pada tahun 1970-an mulai membantu partai politik, yakni Golkar.¹³ Isu yang mengaitkan Lemkari dengan Golkar pun merambah sampai ke berbagai media. Seperti pada media masa Tempo terbitan 19 November 1988. Bahwa setelah tidak dibawah panji Golkar, badai menggoyang Lemkari. Berbagai serangan dilakukan oleh berbagai pihak tokoh masyarakat agama Islam.

Di Jawa Timur sendiri Lemkari diributkan dimana-mana. lembaga Karyawan Islam pada tahun 1981 dirubah menjadi Lembaga Karyawan Dakwah Islam. Awalnya berkedudukan di Kediri, namun pada tahap perubahan nama tersebut kedudukan Lemkari juga dipindah ke Jakarta. Ketika masih berpusat di Kediri Jawa Timur, lembaga ini dibentuk sebagai organisasi keislaman yang menjadi wadah penampung eks anggota Islam Jamaah.

Sebelum Lemkari muncul sebagai organisasi yang legal dan dipercaya Pemerintah untuk membantu menampung dan membina *eks* anggota Islam Jamaah, terdapat ajaran-ajaran yang dianggap sempalan. Ajaran ini diantaranya

¹¹ Hilmi Muhammadiyah, *op., cit*, hlm. 21-22.

¹² AD/ART Lemkari 1972

¹³ Lampiran Surat Pernyataan dan Seruan Bersama MUI dan Ormas Islam Dati I Jatim. (MUI Dati I Jatim), hlm. 8.

bernama Darul Hadist atau Islam Jamaah, Yayasan Quran Hadist, Yayasan Pendidikan Islam jamaah (YPID) dan sejak tahun 1971 berubah menjadi Pondok Golkar. Namun nama-nama tersebut kemudian dilarang oleh Kejaksaan Agung,¹⁴ karena dianggap menyimpang dan dapat menyulut konflik di masyarakat.

Hal lain yang diangkat di media tentang hal yang berbeda dari Lemkari adalah Jamaah, amir, baiat. Tidak ada Jamaah kecuali amir, tak ada amir kecuali ada baiat, dan tidak ada baiat kecuali taat. Semua hal tersebut saling berkaitan dan disimpulkan pada satu hal yakni organisasi yang eksklusif. Lemkari diasumsikan sebagai organisasi eksklusif karena mereka berjamaah, berkumpul hanya dengan sesama anggota Lemkari saja. Mempercayai amir atau pemimpin organisasi mereka yakni Imam dari mereka. Baiat adalah mengikrarkan janji seseorang kepada seorang pimpinan. Semua fenomena tersebut kemudian memunculkan kekhawatiran masyarakat. Mereka berasumsi bahwa gejala-gejala yang dilakukan oleh Lemkari dapat berdampak pada eksklusifitas masyarakat terhadap kehidupan beragama dan bersosial dengan masyarakat lain.

Lembaga karyawan Islam juga diisukan sebagai organisasi yang berlindung dibawah Golkar. Setelah diteliti oleh DPP Golkar dengan hasil bahwa Lemkari telah bersih dari ajaran Islam Jamaah, maka pada tahun 1972 Lemkari diumumkan masuk keluarga besar Golkar.¹⁵ Namun setelah keluar UU No. 3/ 1985 dan UU No. 8/1985 tentang partai politik, Golkar dan keormasan, membuat Lemkari jauh

¹⁴ Hartono Ahmad Jaiz (ed), *Bahaya Islam Jama'ah Lemkari-LDII* (Jakarta: 2008 (cet.8)), hlm. 3.

¹⁵ Lemkari Diributkan Dimana-mana, *Tempo*: 19 November 1988, hlm. 40.

dan harus berpisah dari Golkar. Kabar ini kemudian membawa rumor bahwa Lemkari tidak akan bertahan dan kokoh tanpa bantuan dari Golkar.

Golongan Karya atau Golkar mengeluarkan klarifikasi yang menyatakan drinya tidak ada kaitannya dengan Islam Jamaah, Lemkari dan sebagainya. Klarifikasi ini muncul sebagai bentuk respon dari pernyataan beberapa media yang menyatakan bahwa Lemkari ada kaitannya dengan Islam Jamaah.¹⁶

Menurut Golkar, akhir-akhir ini telah berkembang berita tendensius tentang Islam Jamaah. Berita tersebut sempat mengundang pendapat berbagi kalangan masyarakat, yang oleh pihak tertentu dimanfaatkan untuk kepentingan politiknya, bahkan sampai menimbulkan tindakan sepihak dari sekelompok rakyat yang main hakim sendiri terhadap oknum-oknum yang diduga menganut ajaran “Islam Jamaah”.

Oleh karena itu, Golkar mengajak masyarakat dan pers untuk memelihara stabilitas Nasional yang dinamis dan kerukunan hidup antar umat beragama, terutama antar umat Islam sendiri. Golkar memberi rekomendasi kepada Pemerintah untuk menindak lanjuti pihak-pihak yang telah berusaha memecah belah masyarakat, khususnya pada umat Islam.

Pada tahun 1988 Lemkari pernah mengundang K.H. Misbach Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur. Dalam acara yang bertempat di Surabaya tersebut, rencananya Ketua MUI diberi ruang untuk memberikan doa pemantapan bersama anggota Lemkari.¹⁷ Namun undangan tersebut ditolak. Alasan atas

¹⁶ Menurut DPP Golkar: Golkar Tak Ada Hubungannya dengan “Islam Jamaah”, *Kompas*: 26 September 1979.

¹⁷ Islam Jamaah, Setelah Katanya Meresahkan, *Tempo*, 26 November 1988.

penolakan tersebut adalah karena Lemkari masih mengamalkan ajaran-ajaran Darul Hadist atau Islam Jamaah. Di Jawa Timur sorotan terhadap Lemkari tidak dapat terbendung.¹⁸ Ketua MUI tersebut mencoba mengulas kembali Lemkari yang masih dianggapnya sebagai ajaran yang berkaitan dengan Darul Hadist, seperti pada statementnya.

Ulama dan kaum muslimin agaknya tak lupa pada apa yang terjadi di tahun 1970-an. Ketika itu para pengikut Islam Jamaah getol menyebarkan ajarannya. Para tokoh dan pemuka masyarakat dicoba dirangkul..... (Tempo, 26 November 1988).

Menurutnya Jamaah Ubaidah gampang dikenali karena penampilannya. Celananya diatas mata kaki, K.H. Misbach menyebutnya sebagai “celana anti banjir”. Mereka juga mengharamkan makmum shalat pada orang non-jamaah. Mereka juga menyebut “kafir-kitabi” kepada umat Islam lain. Pengikut mesti menggunakan hadist manqul. Menurutnya, MUI mengambil langkah tegas seperti itu dulu. Mereka tetap berpegang teguh bahwa Lemkari harus dibubarkan. Kalau Lemkari dibiarkan, sama saja dengan membiarkan mereka mendirikan negara dalam negara, sebab menurutnya para anggota Lemkari lebih taat kepada amir daripada terhadap orang lain, termasuk pada Pemerintah.

Organisasi Lemkari ada dibutuhkan untuk meluruskan ajaran-ajaran yang dianggap sempalan seperti Islam Jamaah, Darul Hadist dan sebagainya.¹⁹ Drs. Shodiq, Kepala bagian Humas Departemen Agama mengatakan di Tempo, bahwa

¹⁸ *Ibid*, hlm. 30

¹⁹ Antara Dibubarkan dan Tidak, *Tempo*, 26 November 1988, hlm. 33.

apa yang dilakukan Lemkari, seperti di Jawa Timur yang sedang dihebohkan MUI itu, hanya melegalisasi dan tidak mampu membina. Padahal tujuan adanya Lemkari adalah untuk membina. Sedangkan pengurus Lemkari Pusat sudah berupaya menyadarkan mereka. Maraknya pemberitaan terkait Lemkari membuat Pemerintah merasa bahwa hal tersebut harus diselesaikan. Namun Pemerintah belum dapat mengambil keputusan apapun tanpa ada komunikasi langsung dengan sumbernya. Pihak Lemkari juga sudah siap atas setiap putusan Pemerintah. Apabila pada akhirnya Pemerintah membubarkan Lemkari, maka Lemkari hanya bisa berpasrah, kata Sjamsuddin Zahar, Sekjen Lemkari di *Tempo*.²⁰ Menurut Lemkari adalah organisasi sosial keagamaan dan tidak mengharuskan anggotanya berpikiran seragam. Oleh karenanya, meskipun dilarang Lemkari pada waktu itu akan melanjutkan misi organisasinya, yakni berdakwah baik secara personal ataupun kelompok.

Kemunculan aliran-aliran sempalan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah tipisnya keimanan seseorang dan ketidaktahuan tentang ajaran agama yang benar. Munculnya ajaran sempalan juga berkaitan dengan proses berkembangnya masyarakat. Dalam masyarakat yang sedang berkembang akan muncul dislokasi sosial. Dislokasi sosial muncul karena perubahan yang baru dalam masyarakat itu sendiri. Misalnya orang yang tiba-tiba kaya menjadi miskin, atau sebaliknya. Perubahan-perubahan inilah yang dapat mengakibatkan mereka kehilangan pegangan dan berpaling dengan hal baru. Seperti pada artikel *Tempo*, 26 November 1988, pengajian-pengajian Lemkari

²⁰ *ibid*, hlm. 33-34.

sampai ke daerah-daerah terpencil. Sudah banyak yang merasakan manfaatnya. Karena itu banyak pula Jamaah Lemkari yang merasa nyaman dan tidak terusik dengan usul pembubarannya. Seperti pada wawancara Tempo kepada Jamilah²¹ seorang Mahasiswi di Perguruan Tinggi Negeri Yogya. Dia telah dua tahun mengaji dilingkungan Lemkari. Awalnya ia diajak temannya untuk mengaji, lalu ia merasakan dampak dari pengajian yang telah diikutinya seperti pada statementnya yang menyatakan bahwa ia mendapatkan jalan keluar dalam mengatasi kebingungan saya soal beragama. Menurutnya pada edisi Tempo tersebut, penjelasan yang disampaikan pada pengajian tersebut mengenai hidup sebenarnya, manfaat agama, hingga soal akhirat, pelajaran lalu mmeningkat ke soal shalat, tentang keimanan dan jemaah. Hal demikian juga disampaikan Wahab²² kepada Siti Nurbaiti dari Tempo. Bahwa semua yang disampaikan dalam pengajian mengacu langsung kepada Quran dan Hadis. Belajar agama bukan hanya dari pendapat orang-orang tertentu saja. Pelajaran yang ia dapatkan juga berasal dari guru sebelumnya, yang juga belajar dari guru sebelumnya. Hal ini kemudian yang disebut dengan sambung atau *manqul*.

Menurut Taufik Abdullah, peneliti LIPI kepada wartawan Tempo Muchsin Lubis, bahwa secara umum, suatu aliran disebut sempalan jika dianggap telah menyimpang dari ortodoksi, mayoritas serta mengganggu sstem nilai dan kekuasaan. Pada umumnya sempalan akan menjadi masalah jika menimbulkan perbedaan dan mayoritas. Misalnya pada kasus Sekh Siti Jenar yang dikucilkan

²¹ Nama Jamilah ini merupakan nama samaran yang diterbitkan *Tempo* pada edisi 26 November 1988 dengan judul artikel Sambung Rasa dari Dapur Imam.

²² NaWahab ini merupakan nama samaran yang diterbitkan *Tempo* pada edisi 26 November 1988 dengan judul artikel Sambung Rasa dari Dapur Imam.

oleh Wali Songo. Wali Songo tidak lagi membicarakan benar atau tidaknya ajaran Siti Jenar. Tetapi menganggap Siti Jenar tidak benar karena mengganggu sistem nilai dan kekuasaan, sehingga masjid-masjid menjadi kosong. Ajaran Siti Jenar dianggap sempalan karena dianggap meresahkan masyarakat dan kekuasaan. Salah satu yang menimbulkan masalah ditengah kaum sempalan adalah karena mereka dianggap eksklusif, sehingga hal tersebut memancing reaksi.²³

Pada tahun 1988 nama Lemkari sekali lagi dikaitkan dengan ajaran sempalan yang pernah dilarang oleh Pemerintah, yakni Darul Hadist. *Kegiatan Darul Hadist Meningkat Lagi di Jatim*, judul artikel pada salah satu surat kabar harian *Jawa Pos*. Kembali masifnya kegiatan Darul Hadis di Jawa Timur dikhawatirkan dapat kembali mengulang keresahan masyarakat, apabila aparat keamanan tidak segera mengambil tindakan.²⁴ Ajaran dan perkumpulan yang telah dilarang ini dianggap sebagai ajaran yang ekstrim. Hal ini mereka lihat dari respon dan sikap anggota Darul Hadis kepada jamaah diluar Darul Hadis. Sikap ekstrim ini misalnya terlihat pada anggapan orang-orang Darul Hadist yang menganggap kafir orang diluar anggota Darul Hadis. Secara praktis, penganut Darul Hadis tidak berkenan shalat berjamaah ataupun kegiatan keagamaan lainnya di luar jamaahnya. Dalam artikel ini juga disebutkan, bahwa salah satu pengurus MUI berasal dari Bojonegoro memberikan informasi kepada Menko Kesra, bahwa Darul Hadis memanfaatkan Lemkari sebagai tempat bernaung untuk menghidupkan ajarannya kembali. Tokoh-tokoh Darul Hadist mengajukan untuk mendirikan Lemkari sebagai wadah untuk membina mereka, Pemerintah memberi

²³ *Ibid.*

²⁴ *Kegiatan Darul Hadits Meningkat Lagi di JATIM, Jawa Pos*, 5 Juli 1988, hlm. 2

persetujuan dengan syarat bahwa mereka tetap menjalankan dan menaati peraturan Pemerintah melalui Surat Keputusan Jaksa Agung yang diterbitkan pada tahun 1971.

Ulama dari Bojonegoro tersebut juga mengatakan bahwa aparat keamanan di Jawa Timur dan kejaksaan memang terus berupaya melakukan pembinaan kepada kelompok ini. Tetapi hal tersebut belum maksimal, hal ini disebabkan terbentur oleh induk Lemkari. MUI sebagai salah satu Ormas Islam juga memberikan saran kepada tim pembinaan bahwa, suatu ajaran atau kegiatan yang bertentangan dengan hukum-hukum agama yang berlaku, ditindak lanjuti berdasarkan hukum dan disesuaikan dengan aturan keagamaan. Menurut Humas Kanwil Depad Jatim Sugandhi kepada redaksi Jawa Pos menyatakan bahwa aktivitas kelompok Darul Hadis di Jawa Timur cukup menonjol. Seperti pada daerah Sumenep, Bangkalan, Bojonegoro, Lamongan, Jombang, Surabaya. Di Bojonegoro juga dicurigai terdapat salah seorang Kepala Desa yang mengikuti ajaran tersebut. Menurut Sugandhi (dalam wawancara bersama Redaksi Jawa Pos), jumlah pasti dari pengikut Darul Hadis sulit untuk dideteksi. Sebab menurutnya, kegiatan mereka terselubung.²⁵

Berdasarkan hasil laporan pengawasan dilapangan yang dilakukan oleh tim Pemda Jatim menyatakan bahwa ada indikasi orang Lemkari tersusupi orang-orang yang tidak bersih lingkungan, yakni orang-orang yang masih mengamalkan ajaran Darul Hadis. Masalah ini menjadi tantangan luar biasa bagi warga Lemkari,

²⁵ *ibid.*

kata Tony Soenarto S.H dalam surat kabar harian Jawa Pos.²⁶ Pasalnya kepengurusan Lemkari gagal mengemban misinya, yakni membina anggotanya agar terhindar dari ajaran Darul Hadis.

Adapun sikap yang masih dilakukan adalah tiga prinsip Darul Hadis, yakni *fathonah*, *bithonah* dan berbudi luhur.²⁷ Dari hasil pengawasan juga masih ditemukan sistem keamiran. Keamiran disini diasumsikan sebagai amir atau pemimpin yang kedudukannya langsung dibawah rasul, nabi Muhammad. Tim penelitian yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Jawa Timur dalam artikel Jawa Pos juga menyebutkan, bahwa sistem *mankul*²⁸ masih ada. Setelah kabar tentang hasil laporan penelitian dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Jawa Timur beredar, muncul kembali usulan-usulan atau dukungan dari beberapa ulama untuk membubarkan Lemkari. Ulama Jatim dan Said ketua DPD Golkar Jatim mendukung pembubaran Lemkari. Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur mengumpulkan ulama se-Jatim untuk mendapatkan penjelasan tentang tindakan MUI Jatim bersama Ditsospol Jatim, Kejati Jatim, dan Polda Jatim dalam menghadapi Lemkari. Semua Ulama yang hadir mendukung sikap MUI bersama Pemerintah untuk membekukan Lemkari.²⁹ Para ulama tersebut juga mengusulkan kepada MUI bahwa seharusnya Lemkari juga dibubarkan. Hal ini untuk

²⁶ Lemkari Disusupi Oknum Tak Bersih Lingkungan, *Jawa Pos* 8 November 1988.

²⁷ Fathonah didalam artikel Jawa Pos dimaksud sebagai kecerdasan yang menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada agar tidak tampak wajah yang sebenarnya. Bithonah adalah semua anggota Darul Hadis harus merahasisakan sesuatu dalam ajaran dan anggotanya. Sedangkan berbudi luhur adalah bebrbuat baik sebagai kedok untuk menghindari dunia luar. *ibid*, hlm. 2.

²⁸ Yang dimaksud *mankul* disini adalah seseorang baru sah atau diakui keislamannya jikasudah melakukan baiat kepada amir. Hal tersbut menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat dan resah.

²⁹ Ulama Jatim Usulkan Pembubaran Lemkari, *Jawa Pos*, 15 November 1988.

mengantisipasi dan mencegah munculnya ajaran yang serupa. Untuk mendukung kasi tersebut Ketua MUI Jatim K.H. Misbach mengusulkan kepada MUI tingkat II Jatim membuat laporan tertulis tentang kegiatan Lemkari didalamnya. Untuk pembinaan Lemkari sebagai Ormas akan dilakukan Sospol. Namun dalam pembinaan keagamaan akan dilakukan oleh MUI.

Lemkari oleh Pemerintah Daerah Jatim dibekukan, bukan organisasinya melainkan pengurus-pengurusnya. Menurut Kiai Misbach dalam artikel di Jawa Pos memuat bahwa tidak ada jalan lain kecuali membekukan kegiatannya. Pembekuan Lemkari juga akan diikuti dengan kegiatan sosialisasi kepada Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) untuk diberi penjelasan tentang akibat dan cara untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dari aksi pembekuan tersebut. Misalnya tentang pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap mantan anggota Lemkari. Harapan dari ketua MUI Jatim tersebut adalah agar mantan anggota bergabung ke ormas agama lainnya seperti NU atau Muhammadiyah.³⁰ Kaditsopol, Hasril dalam sebuah artikel Jawa Pos juga mengatakan bahwa Lemkari tidak dibubarkan tetapi dibekukan. Pertimbangannya adalah agar Pemerintah lebih mudah melakukan pengawasan. Jika dibubarkan secara langsung, maka hal tersebut dapat mempersulit pengawasan Pemerintah terhadap Lemkari. Selain itu akan ada lembaga baru yang masih menggunakan ajaran-ajaran Lemkari.³¹ Pembekuan Lemkari juga diutarakan oleh Mayjen Sugeng Subroto Pangdam V/Brawijaya, bahwa langkah

³⁰ Akhirnya, Lemkari Jatim Dibekukan, *Jawa Pos* 22 November 1988, hlm. 2.

³¹ *ibid.*

pembekuan ini merupakan langkah awal untuk membubarkan Lemkari.³² Rencana pembekuan Lemkari merupakan salah satu hasil rapat antara Pangdam, Kaditsospol Jatim, Kakanwil Depag, dan MUI Jatim. Menurutnya dalam sebuah artikel Jawa Pos tersebut pembubaran secara langsung bukanlah jawaban, melainkan upaya yang kurang konsepsional. Jika tiba-tiba dibubarkan, maka anggota-anggotanya tidak akan terdata dan dapat membentuk lembaga yang baru. Di Jawa Timur, Lemkari memiliki tiga pondok pesantren yang cukup besar, diantaranya adalah Pondok Pesantren Lemkari di Burengan Kediri, Gading Mangu Perak Jombang, dan Kertosono Nganjuk.

Pada tanggal 23 November 1988, Kaditsospol Jatim Hasril Harun memanggil pengurus Lemkari Jatim. Panggilan tersebut mengagendakan untuk menjelaskan rencana Pemda Jatim yang akan membekukan Lemkari Jatim.³³ Pertemuan dilakukan secara tertutup. Secara organisatoris Lemkari diserahkan kepada Pemerintah Daerah Jatim. Sedangkan secara pembinaan keagamaan dan operasional dakwah akan diserahkan kepada Departemen Agama dan MUI. Dalam pertemuan tersebut Lemkari juga menjelaskan bahwa Lemkari telah berusaha membina eks anggota Darul Hadis ke ajaran Islam yang benar.³⁴

Menurut Sayidiman³⁵ masalah Islam yang terjadi bukan kesalahan dari ajaran Islamnya, melainkan cara seseorang atau kelompok dalam

³² Pembekuan Lemkari Baru Langkah Awal, *Jawa Pos*, 23 November 1988, hlm. 2.

³³ Minta Kesempatan Dibina Sekali Lagi, *Jawa Pos*, 24 November 1988, hlm. 2.

³⁴ Penjelasan tersebut disampaikan oleh Tony yang merupakan salah satu anggota Kaditsospol. *ibid.* hlm. 2.

³⁵ Mantan gubernur Lemhanas dan seorang pengamat masalah-masalah sosial

menginterpretasikan serta menerapkannya. Ada dua hal yang dapat menjadi penyebabnya diantaranya adalah, faktor pendidikan agama baik dalam lingkungannya maupun di lembaga-lembaga pendidikan. Pendidikan agama masih memfokuskan pada masalah-masalah ritual saja. Kedua adalah kurangnya peran pemuda Indonesia dalam memberikan penerangan ajaran Islam yang berhubungan dengan pembaharuan. Ia berharap pula kepada tokoh dan pemimpin Islam di Indonesia untuk membimbing umatnya ke arah kemajuan.³⁶ Berakhirnya masa pembekuan belum ditentukan secara pasti. Hal tersebut bergantung pada keputusan Pemerintah Daerah dan pejabat yang berwenang. Di Jawa Timur MUI Jawa Timur merupakan lembaga yang sangat mendukung Lemkari dibekukan atau dibubarkan.³⁷ Di Kediri Pemerintah Kediri yakni Bupati Kediri tidak membekukan Organisasi Lemkari.³⁸ Menurut Asmono Bupati Kediri, peningkatan pembinaan kepada Lemkari harus dilakukan. Menurutnya dalam sebuah surat kabar, pembubaran bukanlah solusi akhir, karena jika organisasi tersebut dibubarkan, maka dapat tumbuh lagi. Menurutnya, hal yang ditunggu adalah bukan pembubaran Lemkari tetapi pernyataan dan kenyataan dari anggota Lemkari bahwa mereka telah meninggalkan ajaran-ajaran yang dianggap sempalan dan kembali kepada ajaran yang benar.

³⁶ Sayidiman Menyoroti Masalah Umat Islam, *Jawa Pos*, 25 November 1988.

³⁷ *ibid.* hlm. 2.

³⁸ Bupati Kediri Tak Akan Bekukan Organisasi Lemkari, *Surabaya Post*, 4 Maret 1989.

C. Respon Pemerintah Jawa Timur Terhadap Lemkari di Jawa Timur

Sebagai Pemerintah Daerah Tingkat I, Provinsi Jawa Timur juga memiliki andil dalam pola pembangunan nasional. Sejak ditetapkannya peraturan Otonomi Daerah, Provinsi Jawa Timur berwenang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan daerahnya. Kendati demikian segala keputusan dan peraturan yang ditetapkan harus disesuaikan dengan Konstitusi, Dasar Negara, dan peraturan pemerintah pusat. Berbagai kebijakan dibuat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kebijakan yang berkaitan dengan ketentraman, keamanan sampai pada urusan kemasayarakatan dicanangkan, termasuk dalam urusan keagamaan. Pengambilan keputusan ini tetap didasarkan pada keputusan pemerintah pusat. Adapun peraturan yang menjadi acuan dalam mengambil kebijakan tentang organisasi kemasyarakatan yang berbasis agama khususnya Islam adalah sebagai berikut.

Pertama, Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama yang ditetapkan pada 27 Januari 1966. Bahwa dalam rangka mengawasi Negara dan masyarakat, cita-cita revolusi Nasional dan pembangunan Nasional menuju ke masyarakat adil dan makmur, perlu pengadaaan peraturan untuk mencegah penyalah gunaan atau penodaan agama.³⁹ Oleh karena itu Pemerintah menetapkan peraturan yang mengatur hal tersebut. Adapun redaksi dari peraturan tersebut adalah setiap orang dilarang dengan sengaja menceritakan dimuka umum, menganjurkan atau

³⁹ Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalah Gunaan dan/atau Penodaan agama, Jakarta: 27 Januari 1966.

mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai keagamaan lain yang bertujuan untuk menjelekkan atau menjatuhkan pokok-pokok ajaran tersebut.

Apabila ada yang melanggar ketentuan tersebut, maka akan diberikan perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu. Apabila pelanggaran tersebut dilakukan oleh organisasi atau aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan bahwa organisasi atau aliran kepercayaan itu terlarang. Apabila pelanggaran tetap dilakukan, maka mereka akan mendapatkan hukuman pidana penjara selama-lamanya lima tahun.⁴⁰

Peraturan ini juga dijelaskan pada lembaran selanjutnya pada penjelasan atas keputusan tersebut. Berdasarkan sila pertama pada Pancasila (Ketuhanan Yang Maha Esa) tidak dapat dipisahkan dari agama. Karena agama merupakan tiang dalam berkehidupan manusia dan bagi bangsa Indonesia. Agama dengan beragam komunitasnya telah berkembang dan muncul diberbagai daerah Indonesia. Keberagaman tersebut berupa aliran-aliran, organisasi-organisasi kebatinan, kepercayaan masyarakat, baik yang diasumsikan sebagai ajaran yang benar maupun menyimpang dari ajaran dan hukum agama. Hal tersebut kemudian menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum, memecah persatuan Nasional dan menodai agama. Pemerintah mencegah hal tersebut dengan menetapkan peraturan yang mengatur peristiwa tersebut. Adapun tujuan dari penetapan ketentuan ini

⁴⁰ *ibid*, hlm. 2.

adalah untuk melindungi ketentraman bersama dan mencegah adanya penyimpangan atas ajaran-ajaran keagamaan.

Kedua, Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.01/Ber/mdn-mng/1969. Tentang pelaksanaan tugas aparaturnya pemerintah dalam menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadah agama oleh pemeluk-pemeluknya yang ditetapkan pada tahun 1969. Dalam peraturan ini Kepala Daerah berwenang memberikan kesempatan kepada setiap usaha penyebaran agama dan pelaksanaan ibadah oleh pemeluk-pemeluknya, sepanjang kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Kepala daerah juga bertugas untuk membimbing dan mengawasi agar pelaksanaan penyebaran agama dan ibadah oleh pemeluk-pemeluknya tersebut tidak menimbulkan perpecahan antar umat bergama, tidak disertai intimidasi, bujukan, paksaan atau ancaman dan sejenisnya, dan tidak melanggar hukum serta keamanan dan ketertiban umum. Dalam melaksanakan tugasnya, Pemerintah Daerah dibantu oleh Departemen Agama setempat.⁴¹

Kepala Perwakilan Departemen Agama dapat pula memberikan bimbingan, pengarahan dan pengawasan terhadap mereka yang memberikan penerangan atau berupa penyuluhan atau ceramah agama seperti khotbah-khotbah pada setiap rumah ibadah yang bertujuan untuk mencapai persatuan antar semua golongan masyarakat dan saling menghargai antar umat beragama. Kepala Perwakilan

⁴¹ Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 01/Ber;mdn-mng tahun 1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Mendjamin Ketertiban dan Kelantjaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadah Agama Oleh Pemeluk-pemeluknya.

Departemen Agama setempat berusaha agar penerangan agama yang diberikan oleh siapapun tidak bersifat menyerang atau menjelekkan agama lain.

Jika timbul perselisihan atau pertentangan anantara pemeluk-pemeluk agama yang disebabkan kegiatan penyebaran, penyuluhan, ceramah atau pendirian rumah ibadah, maka Kepala Daerah segera mengadakan penyelesaian yang adil dan tidak memihak. Apabila masalah tersebut menyalahi hukum, maka penindakan akan disesuaikan dengan hukum yang berlaku. Masalah-masalah keagamaan lainnya yang timbul dan diselesaikan oleh Kepala Departemen Agama segera dilaporkan kepada kepala Daerah setempat.⁴²

Ketiga, Intruksi Menteri Agama No. 11 tahun 1979 tentang tugas pendataan dan pembinaan aliran-aliran atau paham keagamaan yang ditetapkan di Jakarta pada 22 November 1979. Bahwa dalam menangani masalah yang berkaitan dengan aliran-aliran atau paham-paham keagamaan, Menteri Agama menginstruksikan kepada Departemen Agama untuk mendata dan membinanya.⁴³ Salah satunya adalah tugas yang diberikan kepada Jenderal Bimas Islam dan urusan Haji untuk melakukan pembinaan dan bimbingan aktif kepada aliran atau paham keagamaan agar kembali ke induk agamanya masing-masing. Untuk mewujudkan manusia Indonesia beragama yang berpedoman pada Pancasila. Memelihara hubungan kerja sama sebaik-baiknya dengan instansi-instansi yang memiliki hubungan dalam tugas ini.

⁴² Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 01/Ber;mdn-mng tahun 1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Mendjamin Ketertiban dan Kelanjutan Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama Oleh Pemeluk-pemeluknya.

⁴³ Instruksi Menteri Agama No.11 tahun 1979 tentang *Tugas Pendataan Dan Pembinaan Aliran-aliran/ Paham-paham Keagamaan*. Jakarta: 22 November 1979.

Mandat juga diberikan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Agama untuk meningkatkan dan mengintensifkan penelitian dan pendataan Aliran-aliran atau Faham-faham keagamaan. Memberikan laporan pelaksanaan tugas tersebut diatas saran-saran kepada Menteri Agama. Kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi ditugaskan untuk mengumpulkan dan memelihara data atau informasi mengenai aliran atau faham-faham keagamaan ditempatnya.

Keempat, Keputusan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang tata cara pelaksanaan penyiaran agama dan bantuan luar negeri kepada lembaga keagamaan di Indonesia yang ditetapkan di Jakarta pada 2 Januari 1979. Agar dalam penyiaran dan penyebaran agama dapat berjalan dengan tertib, maka Menteri agama dan Menteri Dalam Negeri menetapkan Keputusan tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia. Adapun tujuannya adalah untuk memberikan pengaturan dan pengarahan bagi usaha-usaha penyiaran Agama serta usaha-usaha untuk memperoleh dan atau menerima bantuan luar negeri kepada Lembaga keagamaan di Indonesia sehingga cara pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berlangsung dengan tertib dan aman. Mengokohkan dan mengembangkan kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia. Memperkuat stabilitas Nasional yang sangat penting bagi kelangsungan dan berhasilnya pembangunan nasional.

Penyiaran agama yang dimaksud adalah kegiatan-kegiatan yang bentuk, sifat dan tujuannya untuk menyebar-luaskan ajaran suatu agama.⁴⁴ Pengawasan yang dilakukan ini bermaksud mengawasi penyelenggaraan penyiaran agama dan bantuan luar negeri kepada lembaga keagamaan. Bantuan luar negeri adalah segala bentuk bantuan yang berasal dari luar negeri yang berwujud bantuan tenaga, barang dan atau keuangan, fasilitas pendidikan dan bentuk bantuan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah negeri asing, organisasi atau perseorangan di luar negeri kepada lembaga keagamaan dalam rangka pembinaan, pengembangan dan penyiaran agama di Indonesia. Lembaga keagamaan adalah organisasi, perkumpulan, yayasan dan lain-lain bentuk kelembagaan lainnya termasuk perorangan yang tujuannya membina, mengembangkan dan atau menyiarkan agama. Kepala perwakilan Departemen yang berwenang adalah Kepala kantor wilayah atau Perwakilan Departemen di Daerah tingkat I dan tingkat II yang berwenang dalam urusan keagamaan.

Tatacara pelaksanaan penyiaran agama adalah dilakukan dengan semangat kerukunan, tenggang rasa, saling menghargai dan saling menghormati antara sesama umat beragama dan berlandaskan pada hak atas kemerdekaan seseorang untuk memeluk agama yang dipercayainya. Hal yang dilarang dalam penyiaran agama adalah:

“Menggunakan bujukan dengan atau tanpa pemberian barang, uang pakaian, makanan, dan atau minuman, pengobatan, obat-obatan dan bentuk-bentuk pemberian apapun lainnya agar orang atau kelompok orang yang telah memeluk atau menganut agama yang lain untuk berpindah dan memeluk/menganut agama yang disiarkan. Menyebarkan pamflet, majalah, buletin,

⁴⁴ Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga Keagamaan Di Indonesia, Jakarta: 2 Januari 1979.

buku, dan bentuk-bentuk barang penerbitan cetakan untuk mempengaruhi orang atau kelompok orang yang telah memeluk atau menganut agama yang lain. Melakukan kunjungan dari rumah ke rumah umat yang telah memeluk atau menganut agama yang lain.”

Segala bentuk pengawasan, pembinaan, dan pengembangan yang dilakukan oleh Perwakilan Departemen yang berwenang melakukan koordinasi dengan Kepala Daerah Tingkat I (Provinsi) maupun tingkat II (Kabupaten atau Kota).⁴⁵

Semua peraturan dan kebijakan yang diberlakukan oleh Pemerintah merupakan bentuk pengawasan Pemerintah dan Tanggungjawab Pemerintah kepada masyarakat. Dalam sejarahnya, baik Pemerintahan Soekarno maupun Soeharto sama-sama menganggap Islam bersama organisasi atau kelembagaannya sebagai fenomena yang perlu untuk diwaspadai dan diawasi.⁴⁶ Hal ini tidak hanya dikaitkan dengan konteks yang pernah dibawa Islam dalam memperjuangkan ideologi Islam sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai upaya mengantisipasi dan mencegah aksi-aksi yang dapat memicu terganggunya stabilitas negara seperti konflik dan sebagainya. Pada masa Orde Baru, Pemerintah menata hubungan antara masyarakat dan negara maupun antar masyarakat dengan melakukan restrukturisasi politik dan sosial.⁴⁷ Konflik yang terjadi diredam dengan kuat oleh Pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Soeharto sebagai pemimpin rezim Orde Baru memandang tiga golongan politik, diantaranya adalah golongan Nasionalis, golongan spiritual (agama), dan Golongan Karya (Golkar).

⁴⁵ Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, *Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga Keagamaan Di Indonesia*, Jakarta: 2 Januari 1979.

⁴⁶ Bahtiar Effendy, *Masyarakat Agama dan Pluralisme Keagamaan: Perbincangan Mengenai Islam, Masyarakat Madani, dan Etos Kewirausahaan* (Yogyakarta: Galang Press, 2001), hlm. 70.

⁴⁷ Starlita, dkk (ed), *Indonesia Dalam Arus Sejarah: Orde Baru dan Reformasi* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. tt), hlm. 55.

Sehingga pada masa Orde Baru dibuat UU atau keputusan-keputusan tentang keagamaan sebagai alat mengawasi dan mengatur jalannya keagamaan tersebut.

Menteri Agama H. Alamsyah berpendapat, bahwa pemerintah tidak pernah membatasi kegiatan dakwah.⁴⁸ Dakwah berkaitan dengan Menteri Agama. Sedangkan politik merupakan urusan Menteri Dalam Negeri. Dakwah dapat dilakukan oleh siapa saja, asalkan dilakukan dengan pengertian yang benar, tetap memegang teguh dasar negara dan turut menjaga stabilitas keamanan dan kedamaian.

Begitu pula dengan jalannya pemerintahan di tingkat Propinsi Jawa Timur. Dari adanya keputusan-keputusan dari Pemerintah Pusat tersebut kemudian, Pemerintah Propinsi mengeluarkan keputusan-keputusan tentang daerahnya. Pemerintah Propinsi sendiri mengeluarkan dua keputusan tentang keagamaan, khususnya Lemkari di Jawa Timur. *Pertama*, keputusan untuk membekukan pengurus perwakilan Lemkari Propinsi Daerah Tingkat I Jatim. Adapun hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan keputusan ini adalah. *Pertama*, bahwa Pembangunan Nasional merupakan membangun manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Sehingga dalam rangka pelaksanaan khususnya dalam kehidupan beragama perlu lebih ditingkatkan pembinaan kerukunan intern umat beragama, antar umat beragama, dan antara umat beragama dengan pemerintah. *Kedua*, Keberadaan perwakilan Lembaga Karyawan Dakwah Islam (LEMKARI) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur telah memberikan kesempatan, keleluasan dan ruang bagi tumbuh dan

⁴⁸ *Surabaya Post*, 4 Februari 1981, Menag: Pemerintah Tak Pernah Membatasi Dakwah.

berkembangnya ajaran Darul Hadist/ Islam Jamaah/ dan sejenisnya. Pasalnya nama-nama lembaga tersebut telah dilarang oleh Jaksa Agung dengan Surat Keputusan Nomor KEP-089/D.A/10/1971. Hal demikian kembali menjadi sumber keresahan masyarakat dan terganggunya keamanan dan ketertiban umum di Jawa Timur. *Ketiga*, Meskipun Pengurus Perwakilan Lembaga Karyawan Dakwah Islam (LEMKARI) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur telah diberikan petunjuk-petunjuk serta peringatan-peringatan sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun yang bersangkutan belum dapat membenahi diri dari anasir-anasir yang tetap berpegang pada ajaran Darul Hadist atau Islam Jamaah yang terlarang.

Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut kemudian Pemerintah Daerah Jawa Timur melakukan pembekuan terhadap Pengurus Perwakilan Lembaga Karyawan Dakwah Islam (LEMKARI) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur. Keputusan kedua yang diambil oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur terkait Lemkari adalah membentuk tim pembinaan dan pengawasan Tingkat I Jawa Timur.⁴⁹

Adapun tugas dari tim pembinaan dan pengawasan ini adalah untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap warga atau pengurus Lembaga Karyawan Dakwah Islam (LEMKARI) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Setelah dilakukan pembekuan terhadap pengurusnya, mengevaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang telah dilakukan, dan melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa

⁴⁹ Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor: 619 tahun 1988. Tentang Tim Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Lemkari Propinsi Daerah tingkat I Jatim.

Timur. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, tim yang telah dibentuk harus bekerja secara maksimal dan penuh tanggung jawab, demi berhasilnya program yang dilakukan Pemerintah dalam upaya mencapai keamanan dan kedamaian di daerah Jawa Timur. Penanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk kelompok selain dari nama-nama yang tercantum didalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur. Segala biaya yang berkaitan dengan tugas tersebut dibebankan kedalam Anggaran Belanja Rutin Direktorat Sosial Politik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur (APBD) tahun 1988/1989. Susunan anggota yang tergabung dalam tim pembinaan dan pengawasan kepada LEMKARI adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Susunan Keanggotaan Tim Pembinaan dan Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan Lembaga Karyawan Dakwah Islam (LEMKARI) Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Timur

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Instansi
1	Hasril Harun	Penanggung Jawab	Kadit Sospol Prop Dati I Jawa Timur
2	Drs. Moch Soebirin	Ketua	Kakanwil Departemen Agama Prop. Jawa Timur
3	Emil B. Pamenan, S.H.	Wakil Ketua	Ass. Intel Kejaksaan Tinggi Prop. Jawa Timur
4	Drs. H. Bisri Affandi, M.A.	Wakil Ketua	Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya
5	Arif Santoso, S.H	Sekretaris	PAKEM Tingkat I Jawa Timur
6	R. Tony Soenarto, S.H.	Wakil Sekretaris I	Kasubdit Pembinaan Umum dan Masyarakat Dit. Sospol Prop. Jawa Timur
7	Drs. Sun'an Karwalip	Wakil Sekretaris II	Biro Bintal Kantor Gubernur
8	Letkol R.M. Hanafia	Anggota	Kodan V/ Brawijaya
9	Letkol Pol. Abdullah Ma'ruf	Anggota	Polda Jawa Timur
10	Deddy Pridasa, S.H.	Anggota	Kejaksaan Tinggi Jatim
11	HM. Sugandi, B.A	Anggota	Kanwil Departemen Agama Prop. Jawa Timur
12	Suprayitno, S.H	Anggota	Kanwil Departemen Kehakiman Prop. Jawa Timur
13	Drs. Badrun Moenir	Anggota	Karo Bintal Kantor Gubernur
14	Soeprapto, S.H	Anggota	Karo Hukum Kantor Gubernur
15	Sukardjo	Anggota	Dit Sospol Prop. Jatim
16	Suryadi, S.H.	Anggota	Dit Sospol Prop. Jatim

Sumber : Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Buku II. Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Tentang Susunan Keanggotaan. (Gubernur Jawa Timur, 1988) hlm. 1918-1919.

Dari tabel diatas dapat dilihat nama-nama tim pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan Lembaga Karyawan Dakwah Islam (LEMKARI) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut tidak hanya dari satu departemen, misalkan Departemen Agama. Berbagai departemen dilibatkan kedalamnya. Termasuk bidang agama, sosial, lembaga hukum sampai lembaga keamanan. Hal ini menunjukkan bahwa masalah Lemkari di Jawa Timur tidka hanya mempengaruhi bidang keagamaan di Jawa Timur saja. Bidang sosial juga dapat terpengaruh. Misalnya terjadi aksi protes pada kegiaian pengajian pada tahun 1980 an didepan mushollah Lemkari di Jawa Timur.⁵⁰ Menurut keterangan salah satu anggota Lemkari yang bergabung sejak tahun 1980-an, kegiatan pengajian Lemkari sempat terjadi kericuhan. Beberapa warga dari golongan Islam lainnya melakukan protes dengan menuntut kegiatan tersebut berhenti. Aksi protes tersebut tidak lantas membuat Lemkari menghentikan pengajiannya. Setelah aksi protes tersebut, pengajian Lemkari tetap berlanjut, namun dengan mendapat pengawasan dari pihak kepolisian. Pengawasan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik berlebihan pada daerah tersebut. Pada bidang akademisi juga terdapat wakil dalam tim tersebut. Pasalnya untuk mendapatkan penilaian dan analisis objektif, selain pelaku atau pihak lainnya juga diperlukan pengamat dalam mengambil setiap keputusan.

⁵⁰ Wawancara dengan Mutmainah, di kediamannya pada 6 Januari 2015.

BAB IV

KESIMPULAN

Lembaga Karyawan Islam atau Lemkari merupakan organisasi yang berdiri sebagai lembaga keagamaan dalam memberikan pembinaan dan pengajaran. Adapun pembinaan dan pengajaran diberikan kepada masyarakat pada umumnya dan mantan anggota Islam Jamaah khususnya. Organisasi ini disahkan pada 3 Januari 1972, berpusat di Kediri Jawa Timur. Organisasi ini lahir dari aspirasi mantan anggota Islam Jamaah untuk diberi kesempatan sekali lagi dan dibina. Ijin pendirian diberikan dengan syarat Lemkari tidak menggunakan dan menyebarkan ajaran Islam Jamaah dan menyesuaikan ajarannya dengan ajaran agama Islam yang telah mapan. Dalam perkembangannya jalannya Lemkari mengalami pasang surut.

Organisasi berbasis Islam ini memiliki peran penting dalam pengajaran dakwah khususnya dalam membina Islam Jamaah yang dianggap sebagai penyebar ajaran sempalan. Beridirinya Lemkari dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya adalah sosial, politik dan budaya. Dalam hal sosial, Islam Jamaah atau aliran sejenisnya yang dianggap sempalan diklaim masyarakat sebagai ajaran sempala. Oleh karena itu masyarakat, khususnya tokoh-tokoh masyarakat Islam melarang Islam Jamaah beroperasi. Dari segi politik, Islam jamaah tidak memiliki kekuatan dalam mempertahankan eksistensinya. Pemerintah merupakan pemegang kekuasaan, untuk mengantisipasi konflik di kalangan masyarakat, pemerintah kemudian melarang Islam Jamaah. Dalam segi budaya, ajaran-ajaran

yang dibawa Islam Jamaah dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama Islam yang telah mapan.

Lemkari kemudian muncul dan menjadi lembaga untuk membina dan mengawasi mantan anggota Islam Jamaah. Berbagai program untuk membina kadernya dilakukan. Adapun kegiatan Lemkari dibagi menjadi empat, diantaranya adalah pendidikan keagamaan, pendidikan pembangunan, memberikan partisipasi dimasyarakat, dan pendidikan jasmani serta pembinaan generasi pemuda. Salah satu produk dari kegiatannya adalah program *Mixed Farming*. Program tersebut merupakan salah satu program yang mulai mendapat kepercayaan Pemerintah. Pasalnya selain menjadi percontohan pertanian, program tersebut juga dipercaya pemerintah untuk mendapat pinjaman. Pinjaman tersebut berupa tanah seluas empat hektar. Perbaikan secara organisatoris juga dilakukan. Pada Musyawarah Kerja I di Kediri, dihasilkan penyatuan nama disetiap daerah dengan menggunakan nama Lemkari. Namun pada tahun 1981 pusat Lemkari dipindah ke Jakarta. Lemkari di Jawa Timur sejak itu berkedudukan sebagai Dewan Pemimpin Daerah (DPD) yang bertugas.

Meskipun program dan upaya transparansi dilakukan oleh Lemkari, namun para tokoh Islam menganggap bahwa Lemkari masih mengajarkan ajaran-ajaran Islam Jamaah. Oleh karena itu mereka mengajukan surat kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melarang Lemkari. Dengan berbagai pertimbangan dan hasil riset dari para tokoh agama dan pengamat Islam, Pemerintah Jawa Timur Melarang Lemkari pada tahun 1988. Namun yang dibekukan adalah pengurus Lemkari tingkat I Propinsi Jawa Timur. Pembinaan dan pengawasan dari

Pemerintah dikerahkan dengan membentuk tim pembinaan dan pengawasan Lemkari di Jawa Timur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Arsip dan Penerbitan Pemerintah

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Karyawan Islam (LEMKARI). 1972. (Lembaga Karyawan Islam (LEMKARI)).

Amandemen ART Lembaga Karyawan Islam (LEMKARI). 1986. (Lembaga Karyawan Islam (LEMKARI)).

Hikayat Singkat Pondok Lemkari Burengan Banjaran Kediri. 1986. (Pengurus Pondok Lemkari Burengan Banjaran Kediri).

Instruksi Menteri Agama No.11 Tahun 1979 Tentang Tugas Pendataan dan Pembinaa Aliran-aliran/ Faham-faham Keagamaan. 1979. (Menteri Agama).

Keputusan Bersama Menteri Agama dn Menteri Dalam Negeri No. 01/BER/mdn-mng/1969 Tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Mendjamin Ketertiban dan Kelantjaran Pelaksanaan Pengembangan Dan Ibadat Agama Oleh Pemeluk-pemeluknya. 1969. (Menteri Agama).

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor: 618 Tentang Pembekuan Pengurus Perwakila Lembaga Karyawan Dakwah Islam (LEMKARI) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tahun 1988. (Perpustakaan BAPEDA JATIM).

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 1 Tahun 1979 Tentang Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia. 1979. (Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri).

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 187 Th 1987 Tentang Pengangkatan Anggauta Tim Aistensi TNI_ABRI Masuk Desa Departemen Agama. 1987. (Menteri Agama RI).

Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalah-Gunaan dan/atau Penodaan Agama. 1965. (Sekretariat Negara)

Surat Penjelasan Masalah Lembaga Karyawan Islam (Lemkari) Kepada Ketua Umum Majelis Ulama DKI Jakarta. 1979. (Direktorat Pusat Lembaga Karyawan Islam Pusat).

Surat Pernyataan dan Seruan Bersama MUI dan Ormas Islam Dari I Jawa Timur No. 030/MUI/JTM/IV/1989. 1989. (Majelis Ulama Indonesia Dati Jawa Timur).

B. Buku-buku

Alisjahbana S, Takdir. 1986. *Antropologi Baru*. Jakarta: PT. Dian Rakyat.

Anwar, Marzani. 1986. Dampak Sosial Dari Perkembangan Pemikiran dan Pemahaman Keagamaan di Indonesia 1985-1986 dalam *Laporan Hasil Penelitian*. Jakarta: Departemen Agama.

Cahyana, Ludhy. 2003. *Islam Jamaah Dibalik Pengadilan Media Masa*. Yogyakarta: Benang Merah.

Cahyono, Heru. 1992. *Peran Ulama Dalam Golkar 1971-1980: Dari Pemilu Sampai Malari*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Djamaludin, Amin. 2008. *Kupas Tuntas Kesesatan dan Kebohongan LDII Lembaga Dakwah Islam Indonesia: Jawaban Atas Buku Direktori LDII*. Jakarta: LPPI.

Fatwa, A. M. 2011. *Demokrasi Teitis: Upaya Merangkai Integrasi Politik dan Agama di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Hamid, Abd. Rahman & Muhammad Saleh Majid. 2008. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.

Hardjito, Dydiet. 1997. *Teori Organisasi dan Teknik Pengorganisasian*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Ismail, Faisal, dkk. 1999. *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama: Wacana Ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Jaiz, Hartono Ahmad. 2008. *Bahaya Islam Jamaah Lemkari-LDII*. Jakarta: LPPI.

Kadarmanta, A. 2008. *Antisipasi Disintegrasi Negeri Ini: Sebuah Wacana Mengantisipasi Terjadinya Perpecahan Negeri Ini*. Jakarta: PT. Forum Media Utama.

Kansil, C.S.T & Julianto. 1985. *Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia*. Jakarta: Erlangga.

- Khumaidah. 2006. Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, *Skripsi Sejarah Peradaban Islam (SPI)*. Surabaya: Fakultas Adab Institut Agama Islam Negeri.
- Kuntowijoyo. 1994. *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____. Kuntowijoyo. 2005. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- LPPI. 1998. *Bahaya Islam Jama'ah Lemkari*. Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam LPPI.
- Muhammdaiyah, Hilmi. 2013. *LDII (Pasang Surut Relasi Agama dan Negara)*. Depok: Elsas.
- Nn. *Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia*.tt. Surabaya:Satya Nusantara.
- Nashori, Fuat. 1994. *Membangun Paradigma Psikologi Islam*. Yogyakarta: SIPRESS.
- Nurulaen, Yuyun. 2012. *Lembaga Permasalahan Masyarakat & Solusi (Perspektif Sosiologi Islam)*. Bandung: Marja.
- Poesponegoro, Marwati Djoened & Nugroho Notosusanto. 1992. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ricklefs, M.C. 1991. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Setiawan, Akhmad. 1998. *Perilaku Birokrasi Dalam Pengaruh Kekuasaan Jawa*. Yogyakarta: IKAPI.
- Setiawan, Habib. 2008. *After New Paradigm: Catatan Para Ulama tentang LDII*. Jakarta: Obor.
- Setiawan, Lukman. "Jamaah Islam Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Studi Deskriptif: Konstruksi Sosial Islam Jamaah LDII Terhadap Ajaran Agama Islam LDII di Desa Wonorejo Kecamatan Tandes Kota Surabaya". Dalam tulisan *Skripsi* Surabaya: FISIP, Universitas Airlangga, 2011/2012.

Soebijono, dkk. 1993. *Dwi Fungsi ABRI: Perkembangan dan Peranannya dalam Kehidupan Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Gajahmada University Press.

Stratlita, dkk (ed). tt. *Indonesia Dalam Arus Sejarah: Orde Baru dan Reformasi*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.

Suryanegara, Ahmad Mansur. 2008. *Api Sejarah 2*. Bandung: Salamadani.

Tim Penyusun Buku Hubungan Sipil-Militer. 1999. *Hubungan Sipil Militer: Peran, Kontribusi dan Tanggungjawab Sipil Militer dalam Penyelenggaraan Negara*. Jakarta: Grasindo.

Tirtoprodjo, Susanto. 1993. *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*. Jakarta: PT. Pembangunan Jakarta.

C. Koran dan Majalah

Jawa Pos, 5 Juli, 8, 15, 16, 22, 23, 24 November 1988, 29 Desember 1988, 3 Januari 1989.

Surabaya Post, 4 Februari 1981, 25 Februari 1986, 4 Maret 1989.

Tempo, 3 Juli, 13 November 1971. 15 September 1979, 19, 26 November 1988.

D. Internet

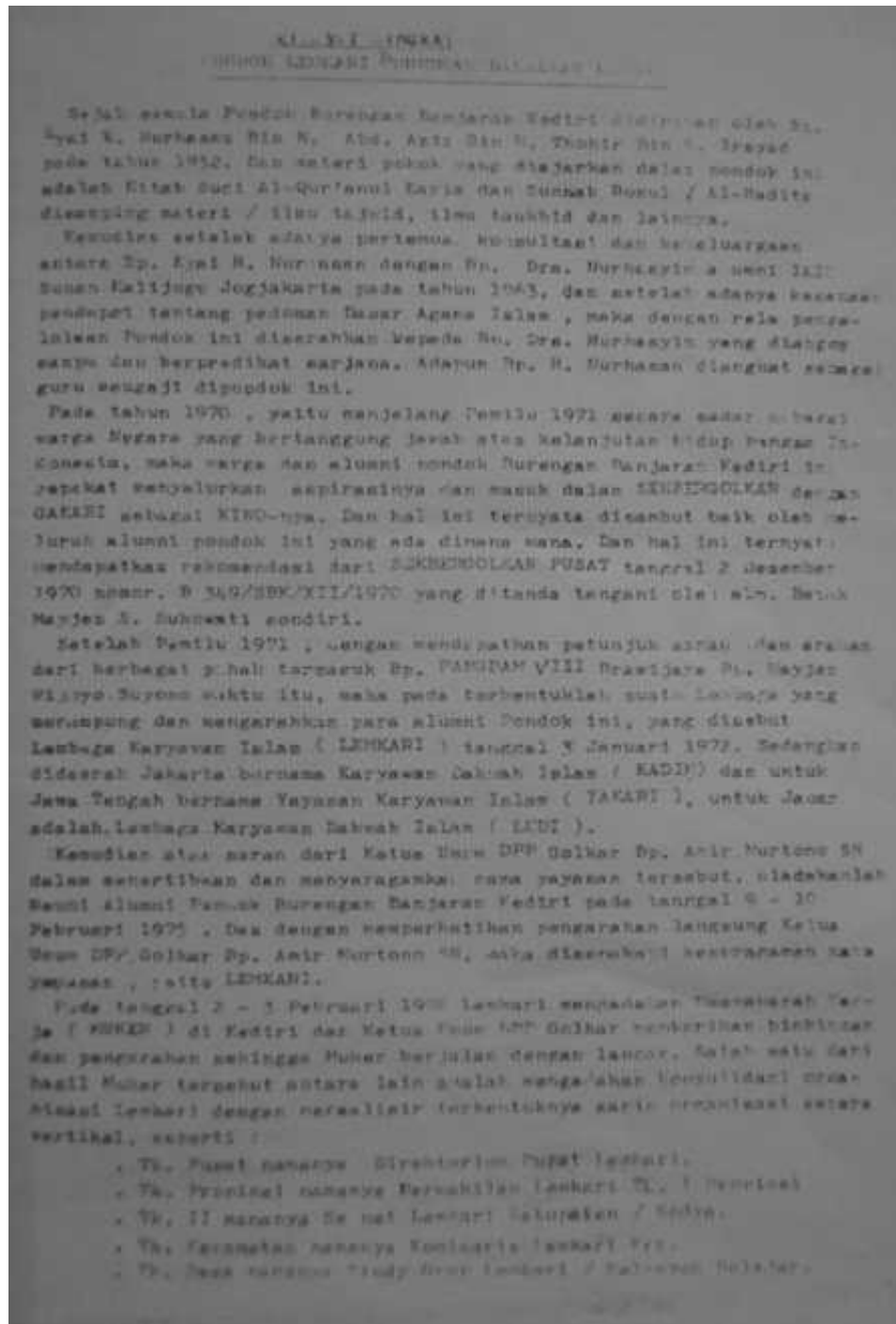
<http://www.ldii.or.id> Data diakses pada Sabtu, 05-04-2014 pukul 11:42.

Surat perpanjangan legalitas terdaftarnya LDII (Surat Keterangan Terdaftar No. 01-00 00/0116/D.III.4/XII/2012) dalam <http://www.ldii.or.id> Data diakses pada , 05-04-2014 pukul 11:50.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Hikayat Singkat Pondok Lemkari Burengan Banjaran Kediri

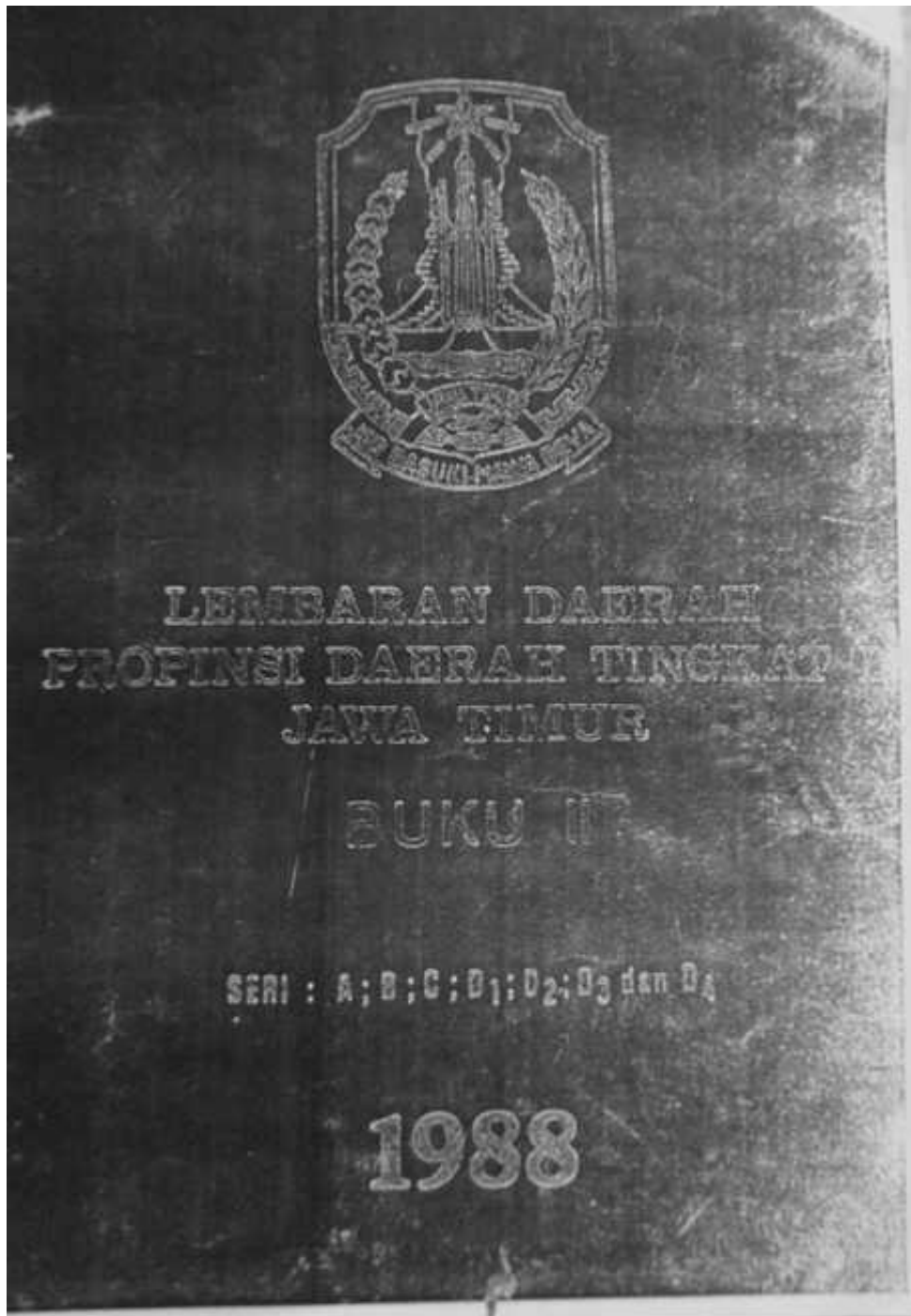


Tanggal 7 April 1976, 1-...
dan Kementerian Dalam Negeri dan luar... dengan ini adalah sebagai berikut:
Salah satu dari...
Dan tanggal 7 April 1982 tepatnya pada tanggal 10 - 12 Maret 1982 dilaksanakan pertemuan antara Kepala Kantor di Jakarta dan langsung dengan perwakilan pemerintah pusat dari Menteri Agama RI, Menteri Sosial RI, Menteri Koperasi RI, dan juga Ketua Umum DPP Golkar.
Dari hasil dari pertemuan tersebut telah diadakan salah satu diantaranya adalah menyebarkan nama Lembaga Paryaman Jalan menjadi Lembaga Yayasan Dakwah Islam (LEWADI).
Dan baru baru ini ternyata tanggal 2-4 Mei 1986 dilakukannya MUBES Lekhari ke-III di Pondok Gede Jakarta.
Dan supaya mengenai pengelolaan pondok Lekhari Burengan Banten Kediri... adalah salah satu tempat pengembangan mental umat Islam agar semakin dan keteguhan mereka tidak mudah goyah terhadap ancaman...
Alloh, dan pembinaan pengetahuan dan fisik agar tahan banting sebagai tempat berkembang untuk menguji kemerdekaan PI melalui cara terpuji...
yang ada di bangsa Indonesia sebagai masyarakat adil makmur sejahtera lahir batin yang diridhoi oleh Alloh Yang Maha Esa.
Dan pengelolaan pondok Lekhari Burengan Banten Kediri 1-1 diserahkan kepada...
Dan dari kontribusi dan contrivasiya sejak 1953 sampai sekarang 1986 jumlahnya tidak dapat dihitung lagi karena begitu banyaknya dan sifat aktif yang banyak disini kebanyakan adalah sifat temporer, sementara saat ada liburan sekolah dan lain-lain. Dan untuk saat ini yang masih tetap berada dipondok ada sebanyak 1350 orang.
Adapun para pejabat ternas wa, mengadakan kunjungan berje dan memberikan bantuan /tali kasih k pondok Lekhari Burengan Banten Kediri antara lain :
1. Sekr Menteri Agama, tahun 1979.
2. K.H. Tohir Tijaya , tahun 1985, 1986.
3. Sekda Prop Tk. Jatim , tahun 1981.
4. Peg. Balai Penelitian Agama Jakarta , tahun 1981, 1982
5. Sekretaris MUI (M. Musyari Yusuf) Tahun 1981.
6. Dy. Gubernur , tahun 1978 , 1983
7. Tim Sosial Pusat DPP Jakarta, tahun 1983.
8. Dy. Th Presiden Idris Galla km, tahun 1981.
9. Ketua-2 dari Kuala Lumpur tahun 1979.
10. Rombongan KAPOLDA Kediri tgl. 28 Juli 1986..
11. Rombongan KAPOLDA JATIM tgl. 2 September 1986.
12. H. Mangach Aca Ngumawati Kediri, 8 September 1986.
42 19 79

Sumber: Hikayat Singkat Pondok Lemkari Burengan Kediri, 2 September 1986

Lampiran 2

Keputusan Gubernur Tentang Pembekuan Pengurus Perwakilan Lemkari Di Jawa
Timur



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR No. 616A/D3
SERI D3

KEPUTUSAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
NOMOR : 618 TAHUN 1988

TENTANG
PEMBEKUAN PENGURUS PERWAKILAN
LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM (LEMKARI)
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

- NG : a. Bahwa hakekat pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya, maka dalam rangka pelaksanaan khususnya dalam kehidupan beragama perlu lebih ditingkatkan pembinaan kerukunan intern Umat beragama, antar Umat beragama dan antara Umat beragama dengan Pemerintah ;
- b. Bahwa keberadaan Perwakilan Lembaga Karyawan Dakwah Islam (LEMKARI) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur telah memberikan kesempatan dan keleluasaan bagi tumbuh dan berkembangnya ajaran Darul Hadits/Islam Jama'ah/Jama'ah Qur'an Hadits/Yayasan Pendidikan Islam Jama'ah/Yayasan Pondok Pesantren Nasional yang telah dilarang oleh Jaksa Agung dengan Surat Keputusan Nomor KEP-089/D.A/10/1971, sehingga meresahkan masyarakat dan berakibat terganggunya keamanan dan ketertiban Umum di Jawa Timur ;
- c. Bahwa terhadap Pengurus Perwakilan Lembaga Karyawan Dakwah Islam (LEMKARI) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur telah diberikan petunjuk-petunjuk serta peringatan-peringatan sesuai dengan peraturan yang berlaku, ternyata yang bersangkutan belum mampu membenahi diri dari anasir - anasir yang tetap berpegang pada ajaran Darul Hadist/Islam Jama'ah yang terlarang, maka perlu melaku-

1912

kan tindakan pembekuan terhadap pengurus Perwakilan Lembaga Karyawan Dakwah Islam (LEMKARI) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

- MENGINGAT :**
1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintah di Daerah ;
 2. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan ;
 4. Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-089/D.A./10/1971 tentang pelarangan terhadap aliran-aliran Darul Hadits, Jama'ah Qur'an Hadits, Islam Jama'ah, JPID, JAPPENAS, dan lain-lain Organisasi yang bersifat/berajaran serupa.
- MEMPERHATIKAN:**
- a. Hasil laporan Tim Pemantau kegiatan Lembaga Karyawan Dakwah Islam (LEMKARI) di Jawa Timur tanggal 31 Oktober 1988 ;
 - b. Hasil rapat Koordinasi antara Instansi terkait dengan MUI Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 Nopember 1988 ;
 - c. Pertimbangan Pang Dam V/Brawijaya selaku Ketua BAKORSTANASDA Jawa Timur tanggal 21 Nopember 1988 ;
 - d. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tanggal 24 Nopember 1988 Nomor : R-1257/K.5/Dks.3/11/1988 tentang kegiatan Lembaga Karyawan Dakwah Islam (LEMKARI) ;
 - e. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur tanggal 21 Nopember 1988 Nomor : Wm.01.05/BA.01.1/1105/R/1988 tentang kegiatan Organisasi (LEMKARI) di Jawa Timur ;
 - f. Surat Ketua MUI Jawa Timur tanggal 15 Nopember 1988 Nomor 010/MUI/JTM/XI/1988 tentang Usul Pembubaran Lembaga Karyawan Dakwah Islam (LEMKARI) Jawa Timur.

1913

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG PEMBEEKUAN PENGURUS PERWAKILAN LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM (LEMKARI) PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, dibekukan Pengurus Perwakilan Lembaga Karyawan Dakwah Islam (LEMKARI) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Pasal 2

Sebagai tindak lanjut dari tindakan pembekuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini, maka pembenahan Organisasi dilakukan secara koordinatif dengan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur Cq. Direktorat Sosial Politik selaku Pembina Umum Organisasi Kemasyarakatan, sedangkan Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Keagamaan menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah Departemen Agama dan Instansi/Lembaga terkait lainnya yang pelaksanaannya dilakukan secara terpadu.

Pasal 3

Untuk melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana termaksud dalam pasal 2 Keputusan ini, dibentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Tingkat I Jawa Timur dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal 25 Desember 1988 ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal : 24 Desember 1988

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

ttd.

SOELARSO

1914

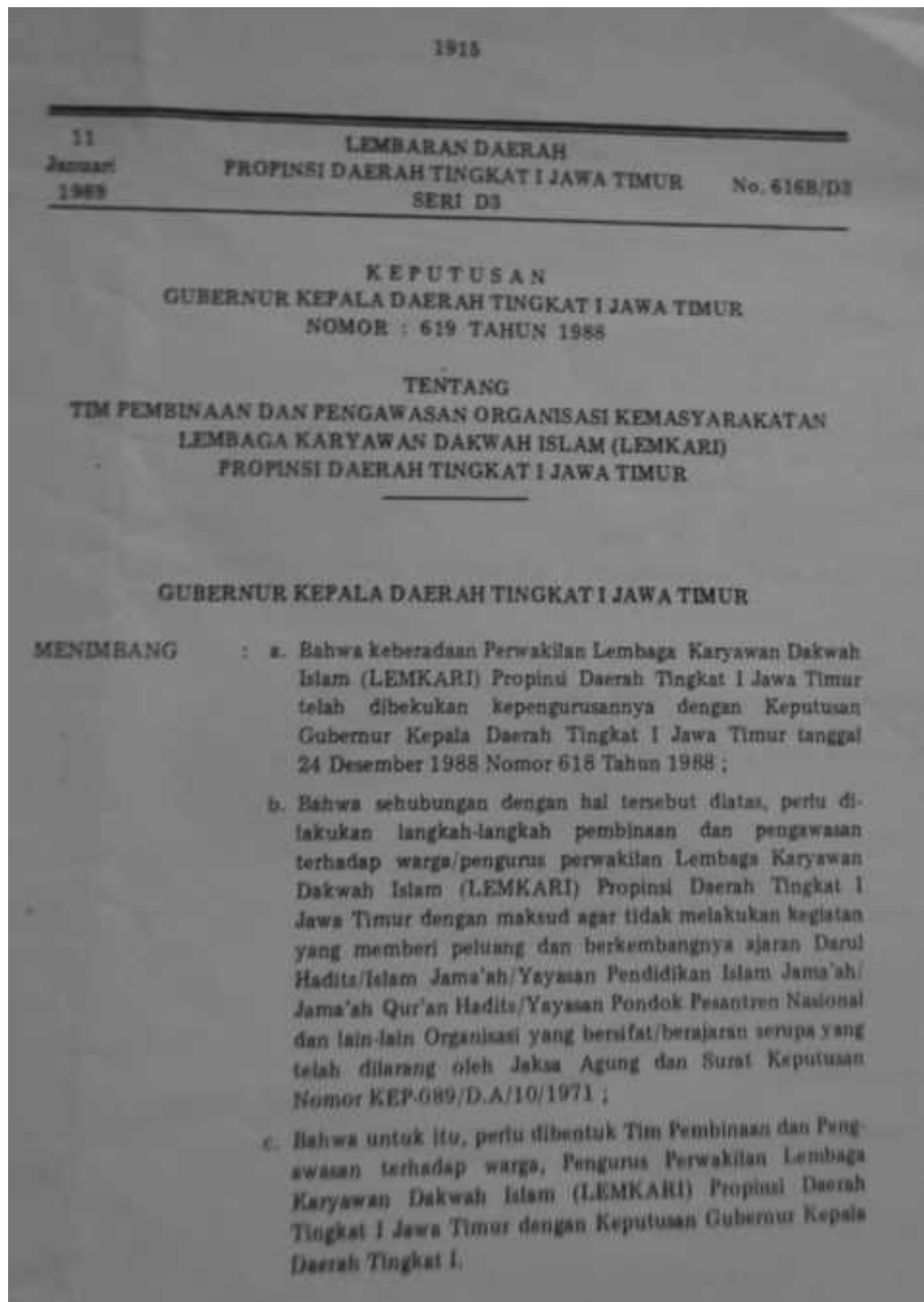
AN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Menteri Dalam Negeri ;
2. Sdr. Dirjen Sospol Depdagri ;
3. Sdr. Pang Dam V/Brawijaya ;
4. Sdr. Kapolda Jawa Timur ;
5. Sdr. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ;
6. Sdr. Kakanwil Departemen Agama Jawa Timur ;
7. Sdr. Kakanwil Departemen Kehakiman Jawa Timur ;
8. Sdr. Kakanwil Departemen Penerangan Jawa Timur ;
9. Sdr. Kakanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Timur ;
10. Sdr. Pengurus Perwakilan Lembaga Karyawan Dakwah Islam (LEMKARI)
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.

Sumber: Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1988, hlm. 1911-1914

Lampiran 3

Keputusan Gubernur Tentang Pembinaan dan Pengawasan Organisasi
Kemasyarakatan Lemkari Propinsi Jawa Timur



1916

INGINGAT

1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan ;
4. Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-089/D.A/10/1971 tentang Pelarangan terhadap Aliran-aliran Darul Hadits, Jama'ah Qur'an Hadits, Islam Jama'ah, JPID, JAPPENAS dan lain-lain Organisasi yang bersifat/berajaran serupa ;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 24 Desember 1988 Nomor 618 Tahun 1988 tentang Pembekuan Pengurus Perwakilan Lembaga Karyawan Dakwah Islam (LEMKARI) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

MEMUTUSKAN

NETAPKAN

: KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH ISLAM (LEMKARI) PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Pasal 1

Dengan Keputusan ini dibentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Lembaga Karyawan Dakwah Islam (LEMKARI) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, dengan susunan keanggotaan tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tim dimaksud pasal 1 Keputusan ini, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap warga/ Pengurus Perwakilan Lembaga Karyawan Dakwah Islam

1917

(LEMKARI) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur setelah dilakukan Pembekuan terhadap kepengurusannya ;

- b. Mengevaluasi Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan yang telah dilakukan ;
- c. Melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada pasal 2 diatas Tim menyusun program kerja, dan melaksanakannya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas, penanggung jawab dapat membentuk kelompok pelaksana tugas.

Pasal 5

Segala biaya yang timbul dengan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Rutin Direktorat Sosial Politik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur (APBD) Tahun 1988/1989
Pasal 2.14.1.1131.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal : 24 Desember 1988

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR**

ttd.

SOELARSO

1918

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMURTANGGAL : 24 DESEMBER 1988
NOMOR : 619 TAHUN 1988

SUSUNAN KEANGGOTAAN

1.	N A M A	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI
	2	3	4
	HASRIL HARUN	Penanggung Jawab	Kadit Sospol Prop Dati I Jawa Timur
	Drs. MOCH SOEBIRIN	Ketua	Kakanwil Departemen Agama Prop Jawa Timur
	EMIL B. PAMENAN, SH	Wakil Ketua	Ass Intel Kejaksaan Tinggi Prop Jawa Timur
	Drs. H. BISRI AFFAN-DI, MA	Wakil Ketua	Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya
	ARIEF SANTOSO SH	Sekretaris	PAKEM Tingkat I Jawa Timur
	R. TONY SOENARTO, SH	Wakil Sekretaris I	Kasubdit Pembinaan Umum dan Masyarakat Dit. Sospol Prop Jawa Timur
	Drs. SUN'AN KARWALIP	Wakil Sekretaris II	Biro Bintal Kantor Gubernur
	Letkol R.M. HANAFLA	Anggota	Kodam V/Brawijaya.
	Letkol Pol ABDULLAH MA'RUF.	Anggota	Polda Jawa Timur
	DEDDY PRIDASA, SH	Anggota	Kejaksaan Tinggi Jatim.

1919

1	2	3	4
11.	HM. SUGANDI, BA	Anggota	Kanwil Departemen Agama Prop Jawa Timur.
12.	SUPRAYITNO, SH	Anggota	Kanwil Departemen Kehakiman Prop Jawa Timur.
13.	Drs. BADRUN MOENIR	Anggota	Karo Bintal Kantor Gubernur
14.	SOEPRAPTO, SH	Anggota	Karo Hukum Kantor Gubernur
15.	SUKARDJO	Anggota	Dit Sospol Prop Jatim.
16.	SURYADI, SH	Anggota	Dit Sospol Prop Jatim.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

ttd.

S O E L A R S O

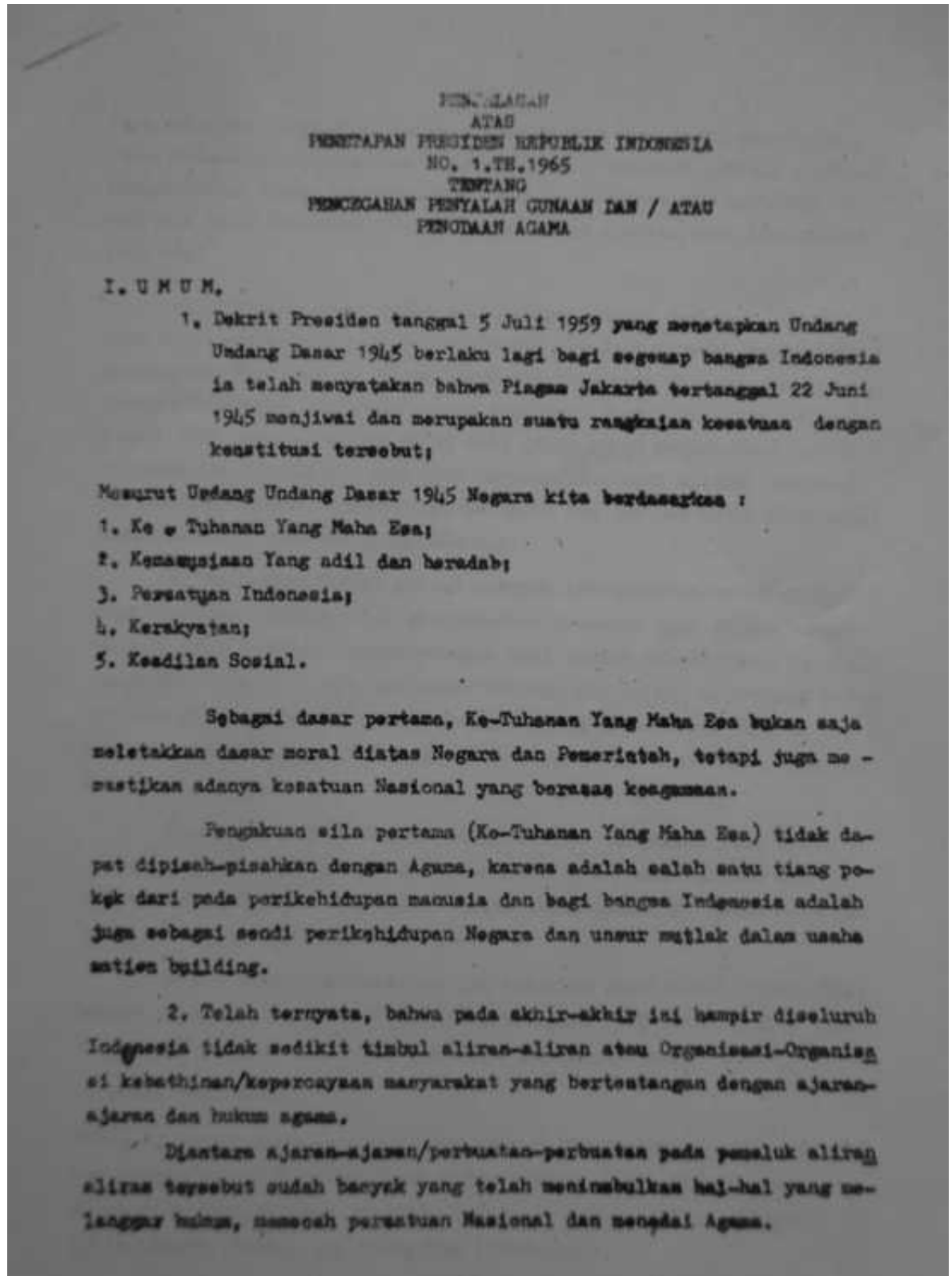
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. :
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri ;
 2. Sdr. Dirjen Sospol Depdagri ;
 3. Sdr. Pang Dam V/Brawijaya ;
 4. Sdr. Kapolda Jawa Timur ;
 5. Sdr. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ;
 6. Sdr. Kakanwil Departemen Agama Jawa Timur ;
 7. Sdr. Kakanwil Departemen Kehakiman Jawa Timur ;
 8. Sdr. Kakanwil Departemen Penerangan Jawa Timur ;
 9. Sdr. Kakanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Timur ;
 10. Sdr. Kepala Biro Bina Mental Spiritual, Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 11. Sdr. Anggota Tim dimaksud.

Sumber: Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1988, hlm. 1915-1919

Lampiran 4

Pencegahan Penyalah Gunaan dan/atau Penodaan Agama



Dari kenyataan teranglah, bahwa aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang menyalah gunakan dan/atau mempergunakan Agama sebagai pokok, pada akhir-akhir ini bertambah banyak dan telah berkembang kearah yang sangat membahayakan Agama-Agama yang ada.

3. Untuk mencegah berlarut-larutnya hal-hal tersebut diatas yang dapat membahayakan persatuan bangsa dan Negara, maka dalam rangka kewaspadaan Nasional dan dalam Demokrasi Terpimpin dianggap perlu dikeluarkan Penetapan Presiden sebagai realisasi Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang merupakan salah satu jalan untuk menyelururkan ketatanegaraan dan kragamaan, agar oleh ngecap/diseluruh wilayah Indonesia ini dapat menikmati ketenteraman beragama dan jaminan untuk memanaikan ibadah menurut agamanya masing-masing.

4. Bertabung dengan maksud memupuk ketenteraman beragama inilah maka Penetapan Presiden ini pertama-tama mencegah agar-jangan sampai terjadi penyelewengan -penyelewengan dari ajaran-ajaran agama yang berangkutan (pasal 1 - 3); dan kedua kalinya aturan ini melindungi ketenteraman beragama tersebut dari pemedaan/penghinaan serta dari ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang beresendikan Ka-Tuhanan Yang Maha Esa (pasal 4). e

5. Adapun penyelewengan-penyelewengan keagamaan yang nyata-nyata merupakan pelanggaran pidana dirasa tidak perlu diatur lagi dalam peraturan ini, oleh karena telah cukup diatur dalam berbagai bagian aturan pidana yang telah ada.

Dengan penetapan Presiden ini tidaklah sekali-kali dimaksudkan hendak mengganggu gugat hak hidup Agama-agama yang sudah diakui oleh Pemerintah sebelum ini. Presiden ini diumngatkan.

I. PASAL INPMI PASAL.

Pasal 1. Dengan kata-kata " Dimuka Umum " dimaksudkan apa yang diartikan dengan kata itu dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah - Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khong Tju (Confusius).

Hal ini dapat dilihat dari dalam sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia. Karena semua agama ini adalah agama-agama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, maka mereka semua mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 Undang Undang Dasar juga mereka mendapat bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal ini.

Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya : Yahudi, Zaratrustrisme, Shinto, Theosian dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 dan mereka diizinkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain.

Tertutup badan/aliran kebatukan, Pemerintah berusaha menyalurkan kearah pandangan yang sehat dan menuju ke-Gebang Yang Maha Esa.

Hal ini sesuai dengan ketentuan M.P.R.S. NO. XI/MPRS/1950, lampiran 1 Bidang I, angka 6.

Dengan ketetapan " Kegiatan Keagamaan " diarahkan segala macam kegiatan yang bersifat keagamaan, misalnya memajukan suatu aliran sebagai agama, mempergunakan istilah dalam menjelaskan atau menganalisa ajaran-ajaran kepercayaannya ataupun melakukan ibadah-ibadahnya dan sebagainya. Perekam-perekam ajaran agama dapat dikontrol oleh Departemen Agama yang untuk itu mempunyai alat-alat/cara-cara untuk menyelidikinya.

Pasal 2. Sesuai dengan kepribadian Indonesia, maka terhadap orang-orang ataupun penganut-penganut sesuatu aliran kepercayaan maupun anggota-anggota Pengurus Organisasi yang melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1, untuk pergerakannya diawasi cukup diberi sanksi seperlunya.

Apabila pelanggaran itu dilakukan oleh organisasi atau penganut-penganut aliran kepercayaan dan mempunyai sifat yang cukup serius bagi masyarakat yang beragama, maka Presiden berwenang untuk menubarkan organisasi itu dan untuk mengizinkan sebagai organisasi atau aliran terlarang dengan akibat-akibatnya (jo. pasal 169 UUP).

2. 3), Pemberian hukuman 1 tahun yang diatur dalam pasal ini, adalah tindakan lanjutan terhadap unsur-unsur yang tetap mengabaikan peringatan tersebut, dalam pasal 2.

Oleh karena aliran kepercayaan biasanya tidak mempunyai bentuk seperti organisasi/perhimpunan dimana mudah dibedakan siapa pengurus dan siapa anggotanya, maka mengenai aliran-aliran kepercayaan, hanya penganutnya yang masih terus melakukan pelanggaran dapat dikenakan pidana sedang pemuka aliran sendiri, yang menghentikan kegiatannya tidak dapat dituntut.

Mengingat sifat idiel dari tindak pidana dalam pasal ini maka ancaman pidana 5 tahun dirasa sudah wajar.

Pasal 4. Maksud ketentuan ini telah cukup dijelaskan dalam penjelasan umum diatas. Cara mengeluarkan pernyataan atau melakukan perbuatan dapat dilakukan dengan lisan, tulisan ataupun perbuatan lain.

Huruf a. Tindakan pidana yang dimaksud disini, ialah semata-mata (pada polteknya) ditunjuk kepada niat untuk memusuhi atau menghina.

Dengan demikian, maka uraian-uraian tertulis maupun lisan yang dilakukan secara obyektif, sakelirk dan ilmiah mengenai sesuatu agama yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan, bukanlah tindak pidana menurut pasal itu.

Huruf b, orang yang melakukan tindak pidana tersebut disini, disamping mengganggu ketenteraman orang beragama, pada dasarnya menghina nilai pertama dari Negara secara total, dan oleh karenanya adalah pada tempatnya, bahwa perbuatannya itu dipidana sepenuhnya.

Pasal 5. Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NO. 2726.

INSTRUKSI MENTERI AGAMA NO. 11 TAHUN 1979

T E N T A N G

TUGAS FUNKSI DAN PEMBINAAN ALIRAN-ALIRAN/FAHAM-FAHAM KEAGAMAANM E N T E R I A G A M A

Menimbang : bahwa dalam rangka menangani masalah yang berhubungan dengan Aliran-aliran/Faham-faham Keagamaan dipandang perlu mengintensifkan tugas pendataan dan pembinaan aliran-aliran/faham-faham Keagamaan tersebut.

Mengingat : 1. Keputusan Presiden RI No. 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;

2. Keputusan Presiden RI No. 45 tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen jo. No. 30 tahun 1978 tentang Perubahan Lampiran 14 Keputusan Presiden No. 45 tahun 1974 ;

3. Keputusan Menteri Agama No. 18 tahun 1975 (disempurnakan) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama jo. No. 5 tahun 1979 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden RI No. 30 tahun 1978 ;

4. Instruksi Menteri Agama No. 4 tahun 1978 tentang Kebijakanaksanaan mengenai Aliran Kepercayaan jo. No. 14 tahun 1978 tentang Tindak Lanjut Instruksi Menteri Agama No. 4 tahun 1978.

M E M O R I A N D U M

Kepada : 1. Direktur Jenderal Bina Islam dan Urusan Haji di Jakarta ;

2. Direktur Jenderal Bina Kristen/Protestan di Jakarta ;

3. Direktur Jenderal Bina Katolik di Jakarta ;

4. Direktur Jenderal Bina Hindu dan Budha di Jakarta ;

5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Agama di Jakarta ;

6. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/Setingkat di Seluruh Indonesia ;

7. Para Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotaya di Seluruh Indonesia

Dituk :

Untuk : Disamping melaksanakan tugas-tugas pokok yang ditentukan supaya mengindahkan dan melaksanakan juga ketentuan-ketentuan serta kebijaksanaan sebagai berikut :

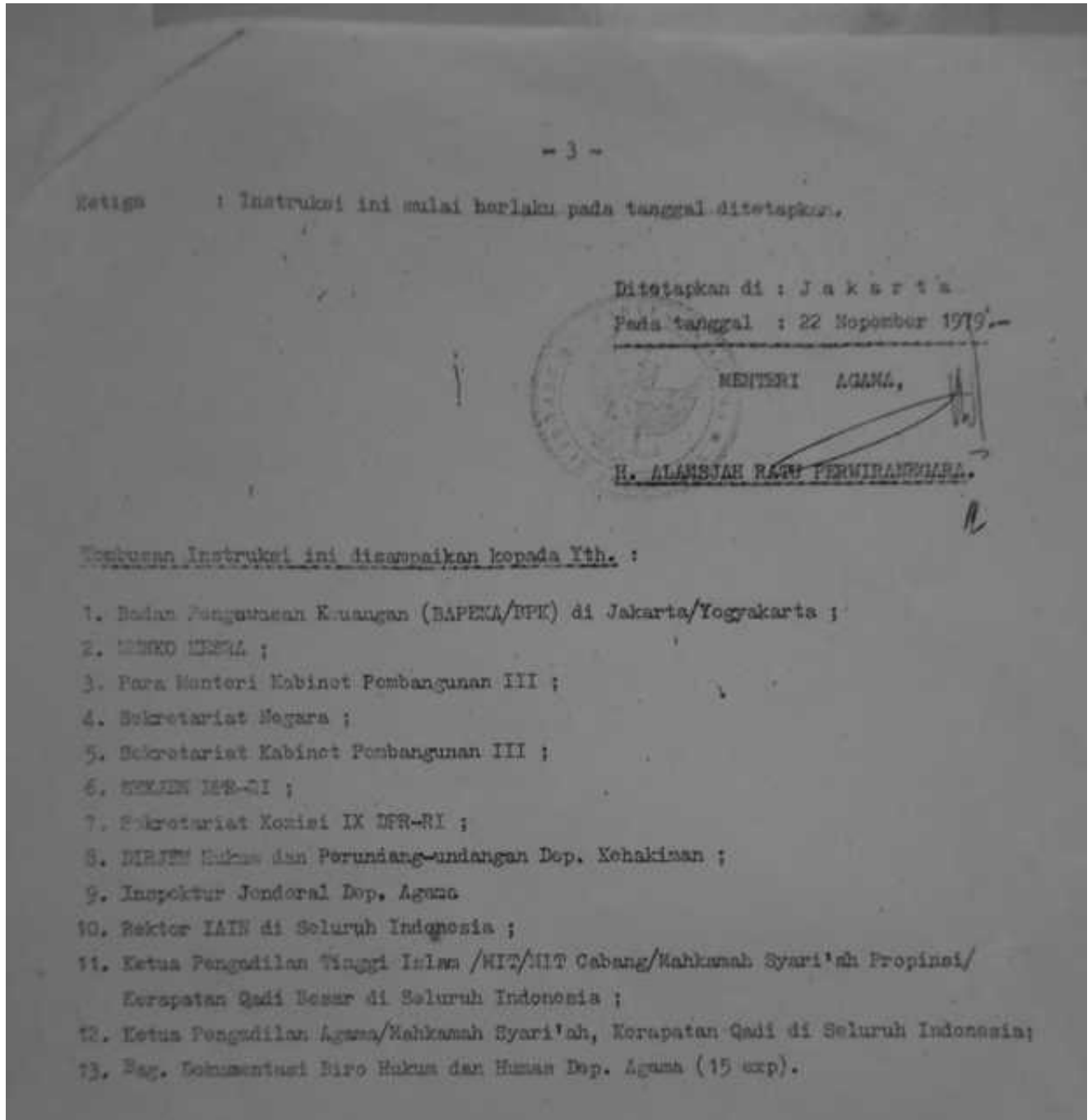
1. Direktur Jenderal Bina Islam dan Urusan Haji ;
 - Direktur Jenderal Bina Kristen/Protestan ;
 - Direktur Jenderal Bina Katolik ;
 - Direktur Jenderal Bina Hindu dan Budha,
- seperti :

2. Melaksanakan

- 2 -

- a. Melakukan pembinaan dan bimbingan aktif terhadap aliran-aliran/Faham-faham Keagamaan agar kembali ke induk Agamanya masing-masing, dalam rangka mewujudkan manusia Indonesia beragama yang Pancasila
 - b. Memelihara hubungan kerja sama sebaik-baiknya dengan instansi-instansi yang mempunyai hubungan tugas di bidang ini.
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Agama supaya :
- a. Meningkatkan dan mengintensifkan penelitian dan pendataan Aliran-aliran/Faham-faham Keagamaan ;
 - b. Memberikan laporan pelaksanaan tugas tersebut di atas dan saran-saran kepada Menteri Agama.
3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/Setingkat untuk melaksanakan :
- a. kepada Kasub. Pengendalian Pelaksanaan Program, agar mengumpulkan dan memelihara data/informasi mengenai Aliran-aliran/Faham-faham Keagamaan di daerahnya ;
 - b. kepada Bidang Penerangan Agama Islam, dan satuan-satuan kerja yang tugasnya di bidang Penerangan Agama Kristen (Protestan), Katolik, Hindu dan Budha, agar melakukan pembinaan dan bimbingan aktif terhadap Aliran-aliran/Faham-faham Keagamaan yang menjadi wewenang dan tanggung jawab masing-masing ;
 - c. yang tersebut pada angka 3 a. dan b. di atas supaya mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas tersebut diatas secara hierarkis dan periodik kepada atasan masing-masing, dan memelihara hubungan kerja sama fungsional dengan instansi-instansi yang mempunyai tugas di bidang ini.
4. Para Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotanya, untuk melaksanakan :
- a. kepada Urusan Umum pada Sub Bagian Tata Usaha, untuk mengumpulkan dan memelihara data mengenai Aliran-aliran/Faham-faham Keagamaan di daerahnya ;
 - b. kepada satuan-satuan kerja yang tugasnya di bidang penerangan agama, untuk melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap Aliran-aliran/Faham-faham Keagamaan, yang menjadi wewenang dan tanggung jawab masing-masing ;
 - c. yang tersebut pada angka 4 a. dan b. di atas, supaya mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas tersebut di atas secara hierarkis dan periodik serta memelihara hubungan kerja sama fungsional dengan instansi-instansi yang mempunyai tugas di bidang ini.
- Kedua : Segala ketentuan yang bertentangan dengan Instruksi ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

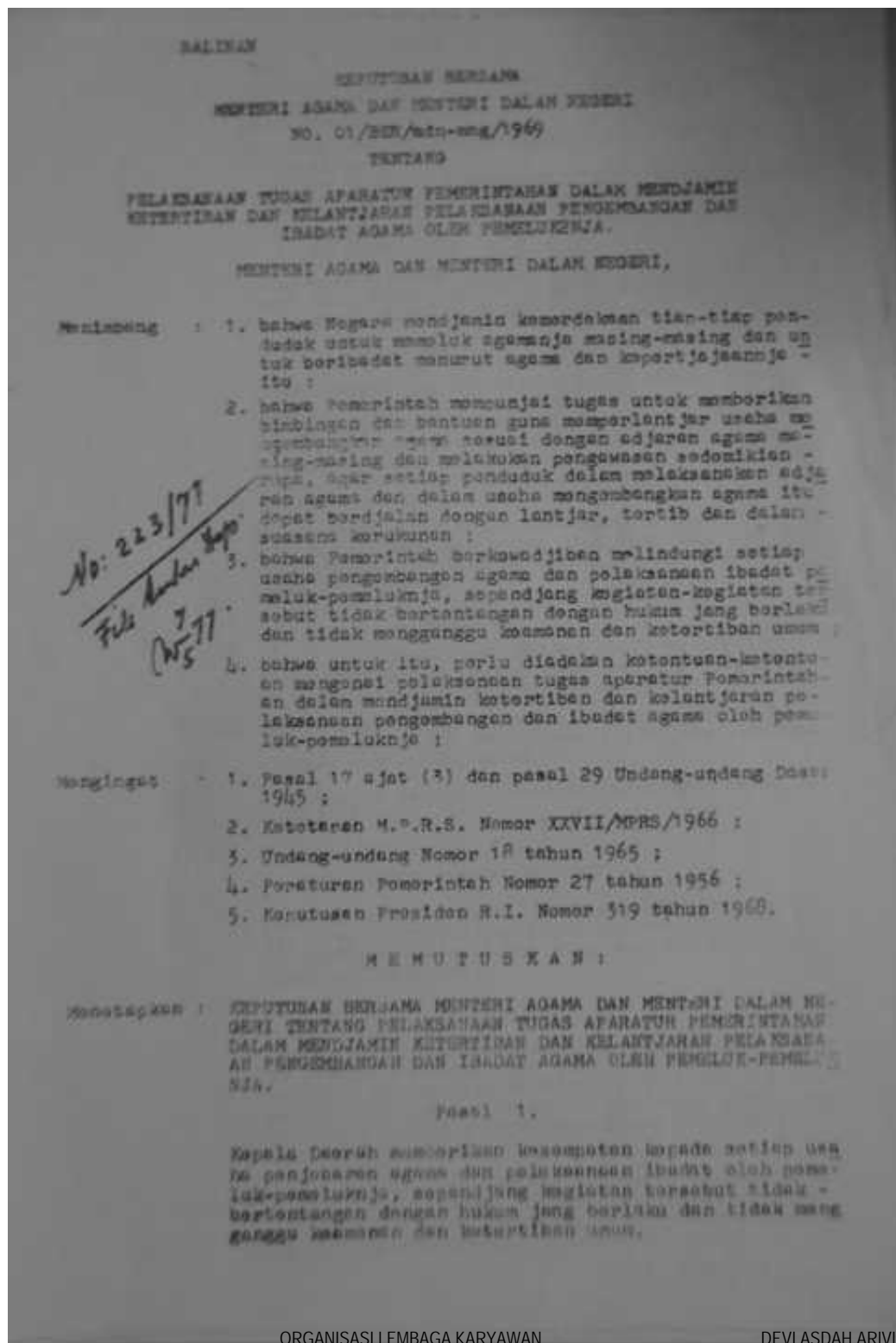
Ketiga :



Sumber: Penetapan Presiden RI No. 1 Tahun 1965

Lampiran 5

Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama Oleh Pemeluk-pemeluknya



Pasal 2.

- (1) Kepala Daerah membimbing dan mengawasi agar pelaksanaan penjabaran agama dan ibadat oleh pemeluk-pemeluknya tersebut :
 - a. tidak menimbulkan perpecahan diantara umat beragama ;
 - b. tidak disertai dengan intimidasi, budjurma, paksaan atau anjungan dalam segala bentuknya ;
 - c. tidak melanggar hukum serta kesusilaan dan ketertibatan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya tersebut pada ayat (1) pasal ini, Kepala Daerah dibantu dan menggunakan alat Kepala Perwakilan Departemen Agama setempat.

Pasal 3.

- (1) Kepala Perwakilan Departemen Agama memberikan bimbingan, pengarahan dan pengawasan terhadap mereka yang memberikan penerangan/penjuluhan/tjeramah agama/chetbah-chetbah di rumah-rumah ibadat, yang sifatnya menuju kepada persatuan antara semua golongan masyarakat dan saling pengertian antara pemeluk-pemeluk agama yang berbeda-beda.
- (2) Kepala Perwakilan Departemen Agama setempat berusaha agar penerangan agama yang diberikan oleh si apapun tidak bersifat menjerang atau menjolokkan agama lain.

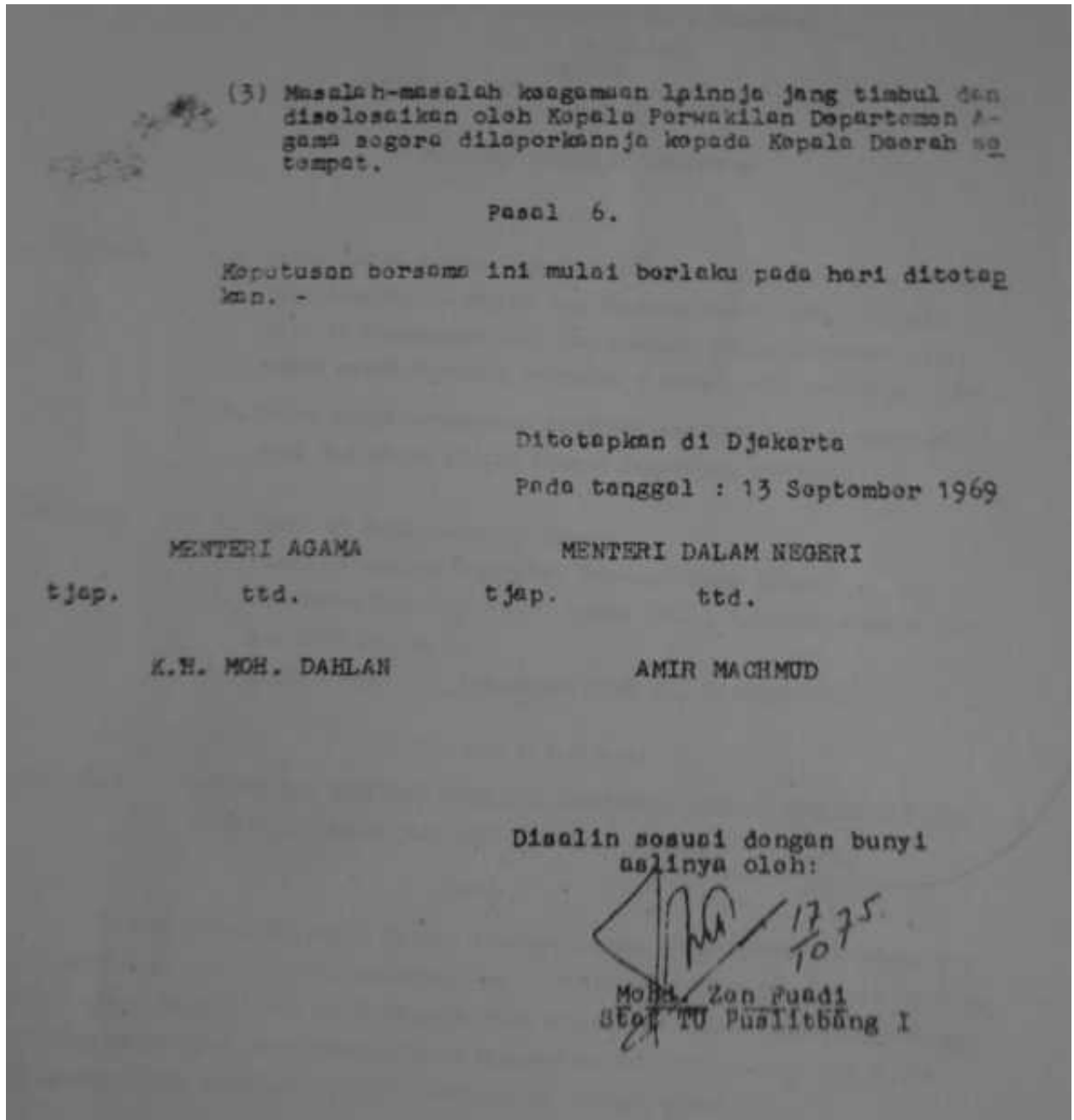
Pasal 4.

- (1) Setiap pendirian rumah ibadat perlu mendapatkan idjin dari Kepala Daerah atau pejabat pemerintahan dibawahnya yang dikuasakan untuk itu.
- (2) Kepala Daerah atau pejabat yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberikan idjin yang dimaksud, setelah mempertimbangkan :
 - a. pendapat Kepala Perwakilan Departemen Agama setempat ;
 - b. planologi ;
 - c. kondisi dan keadaan setempat..
- (3) Apabila dianggap perlu, Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk itu dapat meminta pendapat dari organisasi-organisasi keagamaan dan ulama/rohaniawan setempat.

Pasal 5.

- (1) Dika timbul perselisihan atau pertentangan antara pemeluk-pemeluk agama yang disebabkan karena kegiatan penjabaran/penerangan/penjuluhan/tjeramah/chetbah agama atau pendirian rumah ibadat, maka Kepala Daerah segera mengadakan penyelesaian yang adil dan tidak memihak.
- (2) Dalam hal perselisihan/pertentangan tersebut mengakibatkan tindakan pidana, maka penyelesaiannya harus diserahkan kepada alat-alat penegak hukum yang bertanggung jawab diselesaikan berdasarkan hukum.

(5) Manalah

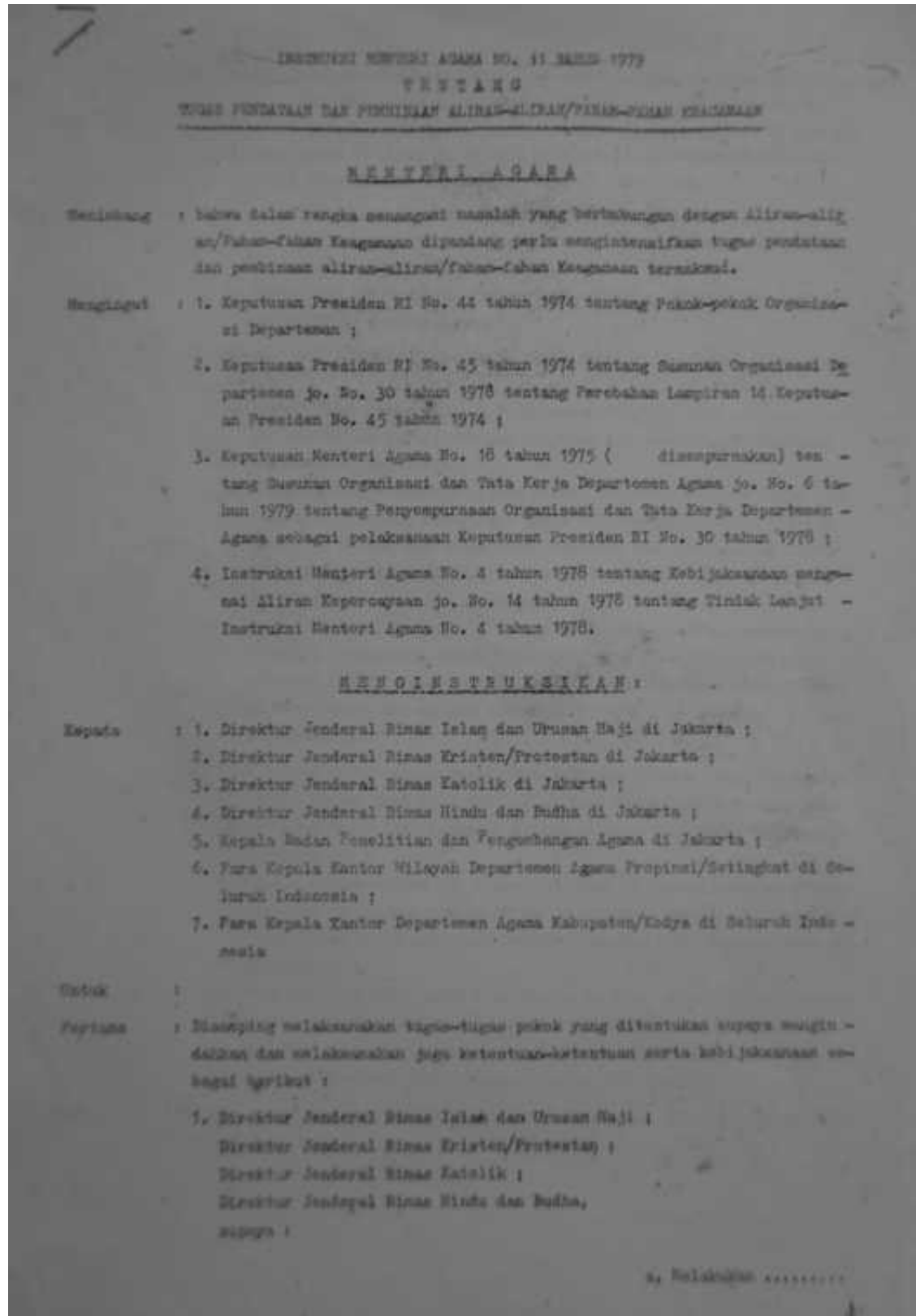


Sumber: Keputusan Bersama Menteri Agama dan menteri Dalam Negeri No. 01

Ber/mdn-mng/1969

Lampiran 6

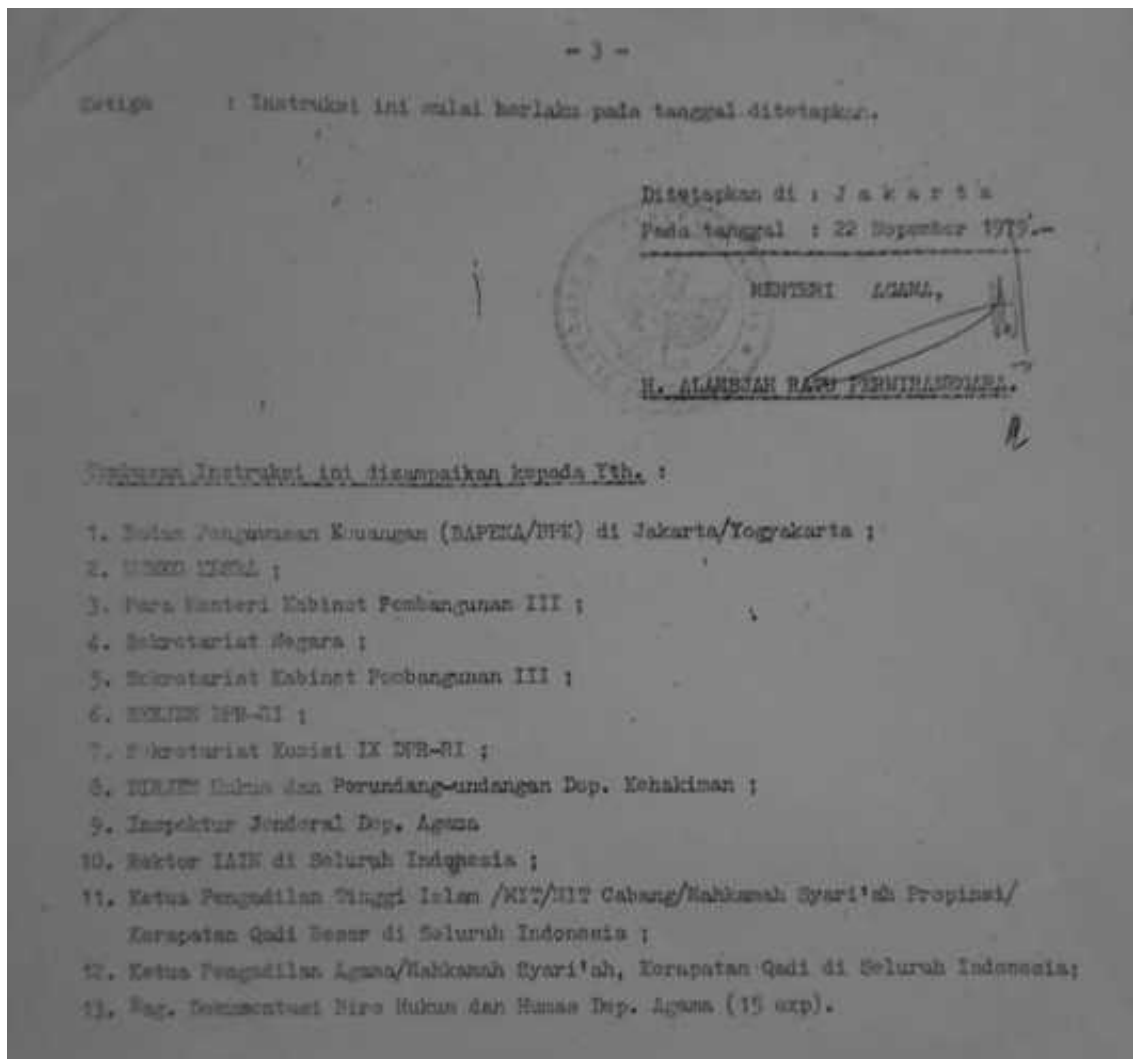
Tugas Pendataan dan Pembinaan Aliran-aliran atau Faham-faham Keagamaan



- 2 -

- a. Melakukan pembinaan dan bimbingan aktif terhadap Aliran-aliran/Faham-faham Keagamaan agar kembali ke induk Agamanya masing-masing, dalam rangka mewujudkan manusia Indonesia beragama yang Pancasila.
 - b. Memelihara hubungan kerja sama sebaik-baiknya dengan instansi-instansi yang mempunyai hubungan tugas di bidang ini.
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Agama supaya :
- a. Meningkatkan dan mengintensifkan penelitian dan pendataan Aliran-aliran/Faham-faham Keagamaan ;
 - b. Memberikan laporan pelaksanaan tugas tersebut di atas dan saran-saran kepada Menteri Agama.
3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/Setingkat untuk melaksanakan :
- a. kepada Kasub. Pengendalian Pelaksanaan Program, agar mengumpulkan dan memelihara data/informasi mengenai Aliran-aliran/Faham-faham Keagamaan di daerahnya ;
 - b. kepada Bidang Penerangan Agama Islam, dan satuan-satuan kerja yang tugasnya di bidang Penerangan Agama Kristen (Protestan), Katolik, Hindu dan Budha, agar melakukan pembinaan dan bimbingan aktif terhadap Aliran-aliran/Faham-faham Keagamaan yang menjadi wewenang dan tanggung jawab masing-masing ;
 - c. yang tersebut pada angka 3 a. dan b. di atas supaya bertanggung jawabkan pelaksanaan tugas tersebut diatas secara hierarkis dan periodik kepada atasan masing-masing, dan memelihara hubungan kerja sama fungsional dengan instansi-instansi yang mempunyai tugas di bidang ini.
4. Para Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotanya, untuk melaksanakan :
- a. kepada Urusan Umum pada Sub Bagian Tata Usaha, untuk mengumpulkan dan memelihara data mengenai Aliran-aliran/Faham-faham Keagamaan di daerahnya ;
 - b. kepada satuan-satuan kerja yang tugasnya di bidang penerangan agama, untuk melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap Aliran-aliran/Faham-faham Keagamaan, yang menjadi wewenang dan tanggung jawab masing-masing ;
 - c. yang tersebut pada angka 4 a. dan b. di atas, supaya bertanggung jawabkan pelaksanaan tugas tersebut di atas secara hierarkis dan periodik serta memelihara hubungan kerja sama fungsional dengan instansi-instansi yang mempunyai tugas di bidang ini.
5. Kepala ketentuan yang bertentangan dengan Instruksi ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

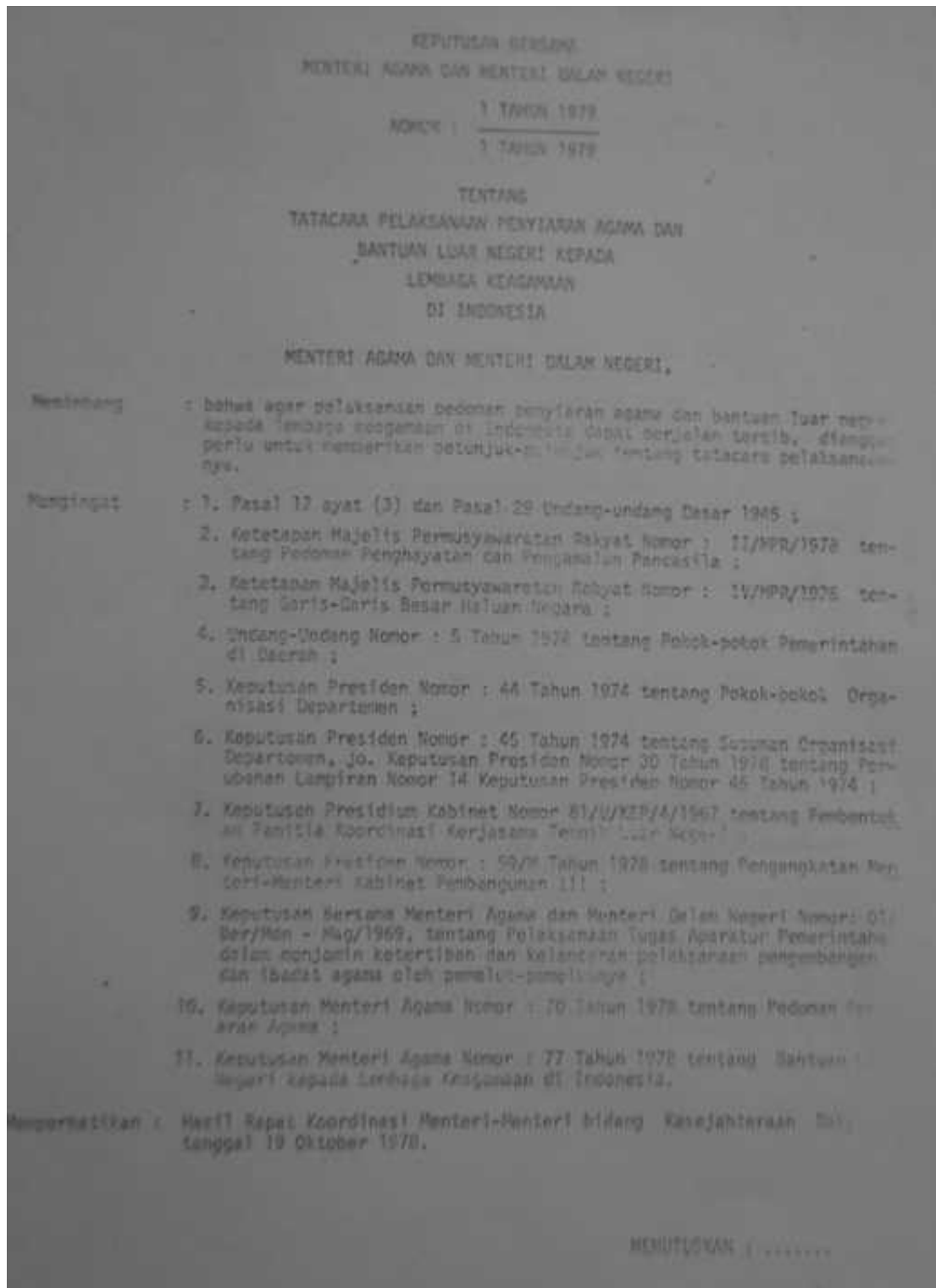
Ketiga :



Sumber: Instruksi Menteri Agama No. 11 Tahun 1979

Lampiran 7

Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri Kepada
Lembaga Keagamaan



- 7 -

KEPUTUSAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATACARA PELAKSANAAN PENYIARAN AGAMA DAN BANTUAN LUAR NEGERI KEPADA LEMBAGA KEAGAMAAN DI INDONESIA.

Bab I

T U J U A N

Pasal 1

- (1) Keputusan Bersama ini ditetapkan dengan tujuan untuk :
 - a. memberikan pengaturan dan pengawasan bagi usaha-usaha penyiaran Agama serta usaha-usaha untuk memperoleh dan atau menerima bantuan luar negeri kepada lembaga keagamaan di Indonesia sehingga cara pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berlangsung dengan tertib dan senasib.
 - b. mengkokohkan dan mengembangkan kerukunan hidup diantara sesama umat beragama di Indonesia serta menantapkan stabilitas nasional yang sangat penting artinya bagi kelangsungan dan berhasilnya pembangunan nasional.
- (2) Keputusan Bersama ini tidak dimaksudkan untuk membatasi usaha-usaha pembinaan, pengembangan dan penyiaran Agama di Indonesia.

Bab II

PENGERTIAN

Pasal 2

Didalam Keputusan Bersama ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Penyiaran Agama, adalah segala kegiatan yang bentuk, sifat dan tujuannya untuk menyebarkan ajaran suatu agama.
- (2) Pengawasan, adalah pengawasan terhadap penyelenggaraan penyiaran agama dan bantuan luar negeri.
- (3) Bantuan Luar Negeri, adalah segala bentuk bantuan finansial, tenaga, barang dan atau jasa dari luar negeri yang berwujud bantuan tenaga, barang dan atau jasa, fasilitas pendidikan dan bentuk bantuan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Negara asing, organisasi atau perseorangan di luar negeri kepada lembaga keagamaan dalam rangka pembinaan, pengembangan dan penyiaran agama di Indonesia.

(4)

- 3 -

- (4) Lembaga Keagamaan, adalah organisasi, perkumpulan, Yayasan dan lain-lain bentuk kelembagaan lainnya termasuk perorangan yang usahanya bertujuan membiayai, mengembangkan dan atau menyebarkan agama yang dari segi pelaksanaan kebijaksanaan Pemerintah termasuk dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Departemen Agama.
- (5) Kepala Perwakilan Departemen yang berwenang adalah Kepala Kantor Wilayah atau Perwakilan Departemen di Daerah Tingkat I dan Tingkat II yang ruang lingkup tugas dan wewenangnya meliputi masalah agama.

Bab III

TATACARA PELAKSANAAN PENYIARAN AGAMA

Pasal 3

Pelaksanaan penyiaran agama dilakukan dengan semangat kerukunan, longgar rasa, saling menghargai dan saling menghormati antara sesama umat beragama serta dengan dilandaskan pada penghormatan terhadap hak dan kemerdekaan seseorang untuk memeluk/menganut dan melakukan ibadat menurut agamanya.

Pasal 4

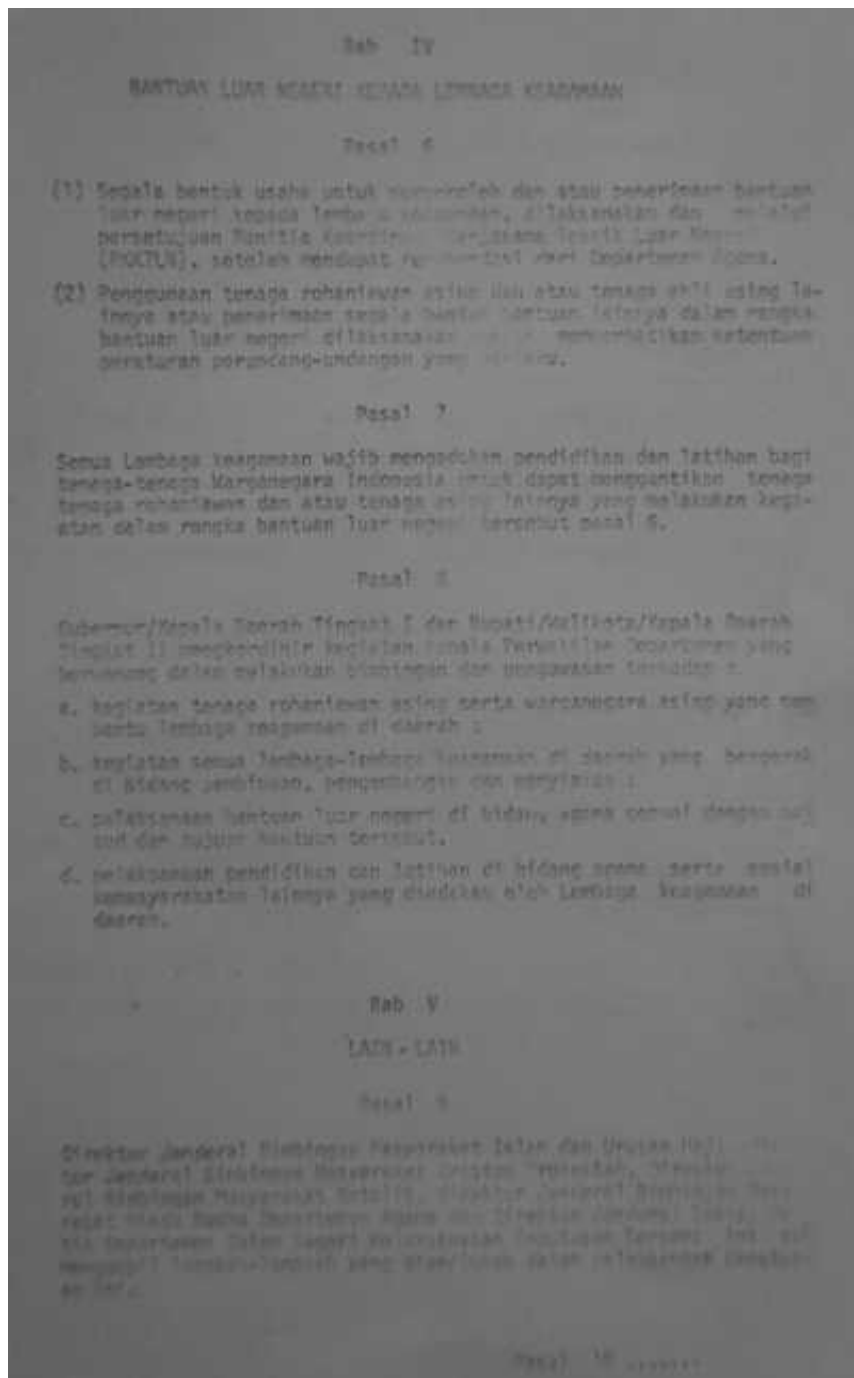
Pelaksanaan penyiaran agama tidak dibenarkan untuk ditujukan terhadap orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama lain, dengan cara :

- a. menggunakan bujukan dengan atau tanpa pemberian barang, uang, kain, makanan dan atau minuman, pengobatan, obat-obatan dan tuk-bentuk pemberian apapun lainnya yang oleh orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama lain, telah melindas dan dapat mengantar orang yang dilindas untuk berpindah agama;
- b. menyebarkan brosur, pamflet, selebaran, gambar, foto, dan bentuk-bentuk barang dan atau benda lainnya yang oleh orang atau kelompok orang yang telah memeluk/menganut agama lain;
- c. melakukan kunjungan dari rumah ke rumah ke orang yang telah memeluk / menganut agama yang lain.

Pasal 5

- (1) Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II mengkoordinir kegiatan Kepala Perwakilan Departemen yang berwenang dalam melakukan bimbingan dan pengawasan atas segala kegiatan pembinaan, pengembangan dan penyiaran agama oleh Lembaga Keagamaan sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berlangsung sesuai dengan ketentuan pasal 4 Keputusan Bersama ini, serta lebih menumbuhkan kerukunan hidup antara sesama umat beragama.
- (2) Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II mengkoordinir kegiatan Kepala Perwakilan Departemen yang berwenang dalam melakukan bimbingan terhadap kehidupan Lembaga Keagamaan dengan mengikut sertakan Majelis-majelis agama di daerah tersebut.

Bab IV



Sumber: Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1

tahun 1979

Lampiran 8

Kegiatan Darul Hadist Meningkatkan Lagi di Jatim



Sumber: Jawa Pos, 5 Juli 1988, hlm. 2

Lampiran 9

Ulama Jatim Usulkan Pembubaran Lemkari



Sumber: Jawapos, Selasa 15 November 1988

Lampiran 10

Said Setujui Usul Pembubaran Lemkari

JAWA POS, RABU PON 16 NOVEMBER

Said Setujui Usul Pembubaran Lemkari

Surabaya, JP.- "Saya setuju Lemkari (Lembaga Karyawan Dakwah Indonesia) dibubarkan," kata Moh. Said, ketua DPD Golkar Jatim, kepada *Jawa Pos* di kediamannya Selasa kemarin. Hal itu ditegaskan Said menanggapi usulan ulama Jatim agar Lemkari dibubarkan.

Namun, kata Said, pembubaran tersebut harus dibarengi dengan pembinaan yang intensif dari ulama dan Depag maupun organisasi-organisasi keagamaan Islam terhadap orang-orang bekas pengikut Lemkari.

Sebab bila pembinaan tersebut tidak dilakukan, kata Said, dikhawatirkan Lemkari yang ternyata masih menjalankan ajaran Islam Jamaah ini, akan muncul lagi dalam bentuk Ormas yang lain.

"Pengalaman sudah membuktikan. Semula namanya Darul Hadits, setelah dilarang membentuk lagi Islam Jamaah. Dan setelah dilarang, muncul lagi dengan nama Lemkari. Jadi, saya setuju usulan ulama Jawa Timur agar Lemkari dibubarkan," kata Said.

Said menegaskan kembali bahwa Lemkari tidak ada kaitannya dengan Golkar. "Seingat saya, selama sepuluh tahun terakhir ini Golkar tidak pernah secara organisatoris mengaitkan Lemkari," kata orang nomor satu di Golkar Jatim ini.

Keanggotaan Golkar, kata Said, bersifat perorangan. Bila ada kader Golkar yang menjadi pengurus Lemkari, tambahnya, hal tersebut bukan berarti Lemkari ada kaitannya dengan Golkar.

Namun, Said tidak mengelak ketika Soedharmono SH masih menjadi ketua umum Golkar, pernah mengunjungi masjid Lemkari di Gading Mangu Perak di Jombang. "Pak Dharmono mau datang ke Perak itu karena sudah *kadung* ada kesanggupan datang," kata Said.

Sebab itulah, kata Said, acara Soedharmono lantas disusun menjadi tiga kunjungan. Pertama, berkunjung ke Alhidayah Pandaan, kedua bersilaturahmi dengan KH Musta'in Romli almarhum di PP Darul Ulum Jombang, baru kemudian mengunjungi masjid Lemkari di Perak. "Seja dulu saya tidak pernah datang ke acara-acara yang dilaksanakan Lemkari," kata Said.

Bila ternyata hasil penelitian menunjukkan Lemkari masih melaksanakan ajaran Islam Jamaah yang telah dilarang pemerintah, Said juga menegaskan, bila ada anggota Golkar mengikuti ajaran tersebut, secara otomatis gugur keanggotaannya. Sebab, hal tersebut bertentangan dengan ikrar Golkar.

"Golkar ini kan organisasi besar yang mendukung dan menjadi pilar pemerintah. Lha kalau ada orang menjalankan ajaran yang dilarang pemerintah, tentunya Golkar juga harus membantu pemerintah mengamankan kebijaksanaannya," kata Said.

Dalam menghadapi masalah Lemkari, kata Said, pihaknya telah memberi petunjuk kepada Golkar di tingkat II agar membantu pemerintah dan MUI dalam mengatasi masalah tersebut. "Pertengahan Desember nanti kami juga akan mengumpulkan MDI (Majelis Dakwah Islam) agar bisa ikut melaksanakan aktifitas mengajak orang-orang yang mengikuti ajaran Islam Jamaah, kembali ke ajaran agama Islam yang benar," kata Said.

Untuk pengumpulan suara dalam Pemilu, kata Said, Lemkari memang cukup efektif. "Begitu pimpinannya memerintahkan ke sana, anak buahnya akan patuh dan mati-matian membela perintah tersebut," kata Said.

"Karena Lemkari melaksanakan ajaran yang merusak tatanan masyarakat, kalau saya, gak oleh suara *uwis*," kata Said kemudian.

(mas)

Sumber: 16 November 1988

Lampiran 11

Akhirnya Lemkari Jatim Dibekukan

Akhirnya, Lemkari Jatim Dibekukan

Sarabaya, JP.

Akhirnya, Pemda Jatim membekukan kegiatan Lemkari (Lembaga Karyawan Dakwah Islam). Keputusan tersebut diambil setelah diadakan rapat yang diikuti Pangdam V/Brawijaya Mayjen Sugeng Subroto, Kadisospol Jatim Hasril Harun, Kakandepag Jatim Drs M. Sobirin, dan enam pengurus MUI (Majelis Ulama Indonesia) Jatim di kediaman Pangdam di Jalan Raya Darmo 100, Senin kemarin.

"Semua yang hadir dalam pertemuan itu sepakat untuk segera membekukan kegiatan Lemkari di Jatim," kata KH Mishbach, ketua MUI Jatim, kepada *Jawa Pos* tadi malam.

Berdasarkan data yang berhasil di-himpun tim memantau kegiatan Lemkari Jatim, kata Kasi Mishbach, tidak ada jalan lain untuk menghadapi Lemkari selain membekukan kegiatannya.

Pertimbangan lain diambilnya tindakan tegas tersebut, lanjutnya, adalah adanya usulan ulama seluruh Jatim agar Lemkari dibubarkan. Kemudian, ketua DPD Golkar Jatim Moh. Said tidak keberatan bila Lemkari dibubarkan.

Pembekuan segera dilaksanakan, kata Kasi Mishbach, setelah SK pembekuan gubernur dikeluarkan. "Sekarang SK pembekuannya sedang disusun," tambahnya.

Kasi Mishbach juga menjelaskan, dalam waktu dekat unsur yang terkait dalam Pakem Jatim akan memanggil semua unsur Pakem di tingkat II, untuk diberi penjelasan menghadapi akibat dari adanya pembekuan tadi. Misalnya, tentang pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap mantan anggota Lemkari.

Mantan anggota Lemkari, kata Kasi Mishbach, diharapkan mengabungkan diri ke Ormas-ormas yang ada. "Misalnya, mereka bisa bergabung ke NU atau Muhammadiyah," kata Kasi Mishbach.

Isyarat bahwa Lemkari Jatim akan dibekukan kegiatannya, sebenarnya sudah dikemukakan Kadisospol Jatim Hasril Harun kepada *Jawa Pos* Sabtu lalu. Hasril mengatakan, sikap akhir Pemda Jatim berpijak dari laporan tim yang dibentuk untuk memantau kegiatan itu.

"Laporan yang masuk memang membuktikan bahwa Lemkari di Jatim masih melaksanakan ajaran Islam Jamaah yang dilarang pemerintah," tegasnya, ketika ditemui saat mengikuti kunjungan Ketua Umum DPP Golkar Wahono di Jatim.

Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Sugeng Subroto sendiri, dalam kesempatan yang sama mengatakan bahwa masalah Lemkari ini sempat diomongkan dengan Ketua umum DPP Golkar Wahono. "Ya, masalah penanganannya nanti, khumahnya di Jatim," kata panglima kala itu.

Dengan adanya pembicaraan soal Lemkari dengan Wahono itu, kata panglima, tidak berarti Lemkari itu ada kaitannya dengan Golkar. "Tapi karena di antara pengurus Lemkari itu ada yang menjadi anggota Golkar," kata panglima.

Hasril mengatakan, Lemkari tidak dibubarkan tapi dibekukan karena ada beberapa pertimbangan. Salah satu di antaranya, yakni untuk memudahkan pengawasan terhadap mantan anggota yang Lemkari itu sendiri. Kalau dibubarkan, agak sulit dilakukan pengawasan maupun pembinaannya. "Di samping itu, mereka bisa membentuk lembaga baru dan melakukan kegiatan keagamaan yang serupa," papar Hasril.

Ditanya apakah ada pengenaan sanksi hukum dengan adanya pengenaan sanksi itu, Hasril mengangguk-kan kepalanya. "Akan ada tindakan hukum yang dikenakan kepada oknum-oknum pengurus tertentu," ujarnya.

Kadisospol ini memang masih belum bersedia menyebutkan siapa oknum yang dimaksud maupun jumlahnya. Masalahnya saat ini masih diteliti aparat yang berwenang, sejauh mana bobot kesalahan yang mereka lakukan. "Tapi sanksi hukum pasti ada. Dan perkiraan saya akan berkembang, dalam arti jumlah oknum yang akan terkena sanksi itu," jelasnya. (mus/dh/mf/am).

Sumber: Jawa Pos, 22 November 1988

Lampiran 12

Pembekuan Lemkari Baru Langkah Awal



Sumber: Jawa Pos, 23 November 1988, hlm. 2

Lampiran 13

Minta Kesempatan Dibina Sekali Lagi



Sumber: Jawa Pos, 24 November 1988, hlm. 2

Lampiran 14

Beberapa Tokoh Lemkari Jatim Mengundurkan Diri



Sumber: Jawa Pos, 29 Desember 1988, hlm. 2

Lampiran 15

Ketua Lemkari Jatim Juga Mengundurkan Diri



Sumber, Jawa Pos, 2 Januari 1989, hlm. 2

